

BIODATA PENULIS



Angel Damayanti adalah dosen tetap pada Program Studi HI, Fisipol UKI Jakarta dengan peminatan pada Keamanan Internasional. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Keamanan dan Hubungan Luar Negeri (Cesfas) Fisipol UKI dan kerap diundang menjadi narasumber di berbagai kementerian dan Lembaga negara, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) serta Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK/PTIK). Setelah lulus dari HI UKI pada tahun 2000, ia melanjutkan perjalanan akademiknya di Universitas Indonesia (2008), RSIS NTU, Singapore (2012) dan Universiti Sains Malaysia, Penang (2017). Beberapa publikasinya

antara lain: *India's Role in the Quadrilateral Security Dialogue in Countervailing China* (2022), *Rational Choices in Sino-Indian Border Dispute in Aksai Chin* (2022), *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific and Persian Gulf Stability* (2021), *Menuju Indonesia yang Aman, Damai dan Demokratis: Tantangan, Disain Kebijakan dan Kelembagaan* (2021), *Indo-Pacific Connectivity: Toward Competition or Cooperation* (2019) dan *Radikalisme Pada Komunitas Non-Islam* (2018).



Verdinand Robertua Siahaan adalah seorang dosen tetap di program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia. Gelar sarjananya diperoleh dari Universitas Indonesia dalam program studi Hubungan Internasional, gelar magisternya diperoleh dari Linköping University, Linköping, Swedia, dan gelar doktoralnya diperoleh dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2018.

Verdinand juga dipercaya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia masa bakti 2022-2026. Berbagai karya ilmiah telah dihasilkan Verdinand antara lain buku "Politik Lingkungan Indonesia:

Teori dan Studi Kasus" yang dipublikasikan UKI Press pada tahun 2020, artikel "Indonesia's Environmental Diplomacy Reformed" bersama Lubendik Sigalingging di *Andalas Journal of International Studies* pada tahun 2019 dan artikel "The Reconstruction of Indonesia's Mangrove Diplomacy" di *Jurnal Global Strategis Universitas Airlangga* pada tahun 2019. Verdinand adalah seorang blogger (verdinand633.wordpress.com) dan juga aktif terlibat dalam Gerakan Pencinta Alam Wanareksa Fisipol UKI.



Darynaufal M. menerima gelar Magister Hubungan Internasional di Universitas Indonesia (2019), setelah sebelumnya mendapat gelar Sarjana Studi Korea di Universitas Gadjah Mada (2016). Ketertarikannya pada Hubungan Internasional secara umum dan Kajian Korea secara khusus, membuat ia menerima beasiswa untuk mengikuti program pertukaran di Woosuk University (2014), mengikuti program summer course di Korea University (2013), dan program bahasa di Kyung Hee University (2012). Karya akademisnya telah diterbitkan di berbagai jurnal dan media. Ia juga berperan sebagai dosen tetap di Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Indonesia

dengan fokus pada Ekonomi Politik Global, Politik Luar Negeri, Kajian Kewilayahan Asia & Afrika, Studi Pembangunan, dan Studi Strategis serta aktif dalam perkumpulan riset dan penelitian Hubungan Internasional di berbagai instansi, seperti UKI, UI, INADIS, dan sebagainya.



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Percetakan
Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No.02 Cawang
Jakarta Timur 13630



ISBN 978-623-6963-95-1



9 786236 963951

ISLAMOFOBIA DI INDO PASIFIK

AKAR PERMASALAHAN, DAMPAK TERHADAP KEAMANAN, DAN STRATEGI PENANGGULANGAN

ANGEL DAMAYANTI
VERDINAND ROBERTUA
DARYNAUFA M. MULYAMAN

INDIAN
OCEAN



UKI PRESS

**ISLAMOFOBIA DI INDO-PASIFIK:
AKAR PERMASALAHAN, DAMPAK
TERHADAP KEAMANAN DAN STRATEGI
PENANGGULANGAN**

Penulis:

**Angel Damayanti
Verdinand Robertua
Darynaufal Mulyaman**

Kontributor:

**Andrew M. Effendi, Andrew Taarega
Ruthgama Josephine, Yesi Riana
Lee Jin-Sang, Souliman Kellouai
Adre Zaif Rachman, Munir
Febri, Boas Simanjuntak
Atiyah Sharif**



UKI PRESS

**Pusat Penerbitan dan Pencetakan
Buku Perguruan Tinggi
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta
2022**

**ISLAMOFOBIA DI INDO-PASIFIK:
AKAR PERMASALAHAN, DAMPAK
TERHADAP KEAMANAN DAN STRATEGI
PENANGGULANGAN**

Penulis:

**Angel Damayanti
Verdinand Robertua
Darynaufal Mulyaman**

Editor:

**Verdinand Robertua
Angel Damayanti**

ISBN: 978-623-6963-95-1

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630
Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, Agustus 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa yang karena kasih dan karunia-Nya telah memampukan para penulis menyelesaikan buku yang berjudul *Islamofobia di Indo-Pasifik: Akar Permasalahan, Dampak terhadap Keamanan dan Strategi Penanggulangannya*. Buku ini ditulis bersamaan dengan mencuatnya fenomena Islamofobia di berbagai negara dalam dua dekade terakhir. Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan meningkatnya aksi radikalisme dan serangan terorisme berbasis agama Islam di berbagai negara di dunia.

Fenomena Islamofobia terlihat jelas di negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan juga beberapa negara di Indo-Pasifik. Islamofobia tersebut terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari ketakutan, penolakan, sikap diskriminatif hingga tindak kekerasan bahkan pembunuhan massal terhadap umat Islam. Kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi umat Islam akibat Islamofobia di Indo-Pasifik terjadi misalnya di India, Myanmar dan Thailand. Dalam level yang lebih rendah, sentimen anti-Islam juga terjadi di Indonesia dan Korea Selatan sebagaimana dijelaskan dalam buku ini.

Keadaan ini bukan hanya membahayakan umat Islam semata-mata, tetapi juga dapat menimbulkan konflik antar umat beragama yang jika dibiarkan dapat meluas menjadi kerusuhan atau bahkan gerakan separatisme seperti yang terjadi di Thailand. Bahkan dalam level yang lebih besar, dapat menimbulkan ketegangan hubungan antar negara dan instabilitas politik di kawasan.

Itu sebabnya, dalam buku ini para penulis mendalami akar permasalahan serta dampak yang ditimbulkan dari fenomena Islamofobia di lima negara di Indo-Pasifik, yaitu India, Myanmar, Thailand, Indonesia dan Korea Selatan. Pada bagian akhir, para penulis merumuskan sejumlah rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia, dan organisasi di kawasan terutama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) untuk mencegah Islamofobia dan menghindari ancaman yang lebih luas lagi.

Dengan kerendahan hati, kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki celah untuk peningkatan dan perbaikan. Itu sebabnya, berbagai saran dan masukan yang konstruktif dari pembaca sangatlah dibutuhkan, sehingga buku ini dapat menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan di level nasional dan regional. Kami juga berharap buku ini dapat memberikan pencerahan kepada para pembaca dalam upaya mencegah Islamofobia serta menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas di Indonesia dan di kawasan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Rektor UKI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UKI, UKI Press serta seluruh tim yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan dan dukungan penuh dalam penulisan dan penerbitan buku ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.

Jakarta, Juli 2022

Para penulis

Sambutan

Universitas Kristen Indonesia

Kita mengucapkan syukur atas penerbitan buku monograf yang berjudul *“Islamofobia di Indo-Pasifik: Akar Permasalahan, Dampak terhadap Keamanan dan Strategi Penanggulangannya”* yang ditulis oleh Angel Damayanti, Verdinand Robertua dan Darynaufal Mulyaman. Hadirnya buku ini dirasa sangat tepat terutama saat merebaknya fenomena Islamofobia di berbagai negara di dunia. Berbagai sikap negatif dan penolakan dengan dasar rasisme atau identitas apapun, termasuk agama tentu tidak bisa dibiarkan.

Ketakutan yang kemudian berkembang menjadi penolakan dan kebencian atau bahkan tindak kekerasan berbasiskan agama, sama buruknya dengan radikalisme dan terorisme yang menjadi penyebab munculnya Islamofobia. Kenyataannya, terorisme dan Islamofobia sama-sama mengancam umat manusia, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta keamanan masyarakat internasional. Terutama ketika Islamofobia terjadi di negara-negara di mana di dalamnya terdapat umat Islam yang merupakan kelompok minoritas, seperti yang dialami oleh warga Rohingya di Myanmar.

Dari buku ini, kita dapat memahami bahwa akar permasalahan Islamofobia di sejumlah negara di Indo-Pasifik dapat ditarik jauh secara historis. Bahkan sejak sebelum kolonialisme terjadi di negara-negara tersebut. Islamofobia ini dapat bersumber dari konflik agama antara mayoritas dan minoritas seperti yang terjadi di India dan Myanmar. Di beberapa negara, Islamofobia muncul karena adanya politik Islam yang berkaitan dengan

separatisme atau ideologi pembentukan suatu negara. Di beberapa negara lainnya, Islamofobia banyak dikaitkan dengan aksi terorisme di berbagai negara terutama sejak peristiwa 11 September 2001.

Tentu saja untuk memahami fenomena Islamofobia ini, kita tidak bisa melihat hanya dari satu perspektif. Banyaknya faktor penyebab dan keunikan dari sistem pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat di suatu negara membuat situasi ini menjadi lebih kompleks. Itu sebabnya buku ini membantu memberikan gambaran tentang Islamofobia yang terjadi di negara-negara di Indo Pasifik dengan melihat pada akar permasalahan serta dampaknya terhadap keamanan nasional dan umat manusia.

Kehadiran buku ini juga menjadi bukti bahwa Universitas Kristen Indonesia (UKI) tidak hanya menjadi tempat bagi para mahasiswa untuk belajar tetapi juga menjadi sumber solusi bagi permasalahan bangsa dan internasional. Hal ini diwujudkan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) serta integrasi hasil penelitian serta PKM yang dituangkan ke dalam pembelajaran. Setiap tahun, ratusan penelitian dan kegiatan PKM berkualitas unggul dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa UKI.

Berbagai hasil penelitian dan PKM dosen tersebut kemudian menjadi bagian dari materi pembelajaran yang disampaikan juga di dalam kelas, sehingga mahasiswa dapat mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi lalu mampu berpikir kritis serta kreatif untuk mencari solusi yang diperlukan. Kemampuan mahasiswa dan lulusan untuk menerapkan pemikiran yang logis, kritis dan inovatif dalam melihat berbagai permasalahan yang ada sesuai dengan keilmuan mereka merupakan indikator

penting dalam capaian pembelajaran sebagaimana diarahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Berkat konsistensi pelaksanaan tridharma yang berkualitas dan terintegrasi, serta dukungan civitas akademika UKI, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi memberikan akreditasi UNGGUL pada tanggal 28 Juni 2022 melalui Keputusan BAN-PT No.304/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2022. Dengan predikat ini, UKI optimis akan semakin memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Buku monograf “Islamofobia di Indo-Pasifik: Akar Permasalahan, Dampak terhadap Keamanan dan Strategi Penanggulangannya” menggambarkan secara jelas dan tegas semangat UKI untuk menjadi rujukan bagi mahasiswa dalam belajar dan solusi bagi berbagai permasalahan nasional dan dunia.

Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih bagi para penulis yang telah bahu-membahu berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kiranya Tuhan yang Mahakuasa memberkati semua upaya dan kerja keras kita untuk memajukan pendidikan tinggi di Indonesia dan mendidik calon-calon pemimpin di negeri ini. Semoga buku ini menjadi inspirasi dan menjadi rujukan akademis serta kebijakan bagi pemerintah Indonesia dan negara-negara lainnya di kawasan.

Jakarta, 8 Agustus 2022

Rektor

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA

Pengantar
Kesalahan Lintas-Batas
dalam Kerendah-hatian Kemanusiaan Praktek
Keagamaan

Terlepas dari perbedaan cara pandang, bentuk empiris dan faktor pemicunya, Islamophobia berkaitan dengan dinamika hubungan antar pemeluk agama berbeda dalam dunia yang semakin terbuka. Islamophobia bisa dipahami sebagai reaksi praktek keberagaman eksklusif berdasar klaim kebenaran sepihak sembari meniadakan segala yang berbeda (*the others*). Sementara reaksi terhadap praktek keberagaman demikian cenderung berbasis cara pandang serupa yang eksklusif dengan klaim kebenaran sepihak.

Keduanya inkonsisten dengan keyakinan pemeluk setiap agama tentang maksud Tuhan menurunkan agama-agama di dunia. Tuhan Maha Tak Terbatas, Maha Benar, Maha Luas, Maha Pengampun, Meng-kasihi semua makhluk-Nya. Tidak akan pernah ada seorang manusia pun yang bisa melukiskan maksud dan makna ke-Maha-an Tuhan. Jika hal itu dilakukan akan membuat Ke-Maha-an Tuhan terperangkap dalam ruang tafsir-tafsir yang sempit dan terbatas. Ironinya, pemeluk suatu agama menganggap puncak keakehan diukur dari formula-formula ke-Tuhan-an yang terbatas tersebut.

Dalam hubungan itulah diperlukan sikap jujur dan substansialisasi (menuki-I hakikat/substansi) dalam memahami ajaran setiap agama. Hal ini diperlukan guna menjernihkan permasalahan yang muncul dari Islamophobia. Langkah

demikian bisa menjadi pencerah mengurai benang-ruwet hubungan antar agama di tengah lalu-lintas kepentingan ekonomi dan kekuasaan yang semakin terbuka dan mendunia (global).

Sikap jujur dan pendekatan substantif bisa membebaskan warga bangsa-bangsa di dunia dari cengkeraman ketuhanan egois, absurd dan sektarian. Tuhan atau yang dipercaya sebagai tuhan adalah sebuah kekuatan maha dahsyat namun rendah hati, penyabar, pengampun, penuh cinta-kasih kepada semua manusia, bahkan pada penjahat hebat dan sang iblis penentang sekalipun.

Semua manusia, tanpa melihat latar belakang etnis dan keyakinan keagamaannya, memiliki kedudukan setara di mata Tuhan atau yang dipercaya sebagai Tuhan. Kerendah-hatian itu pulalah yang menjadi kunci memperoleh keridhaan atau perkenan Tuhan. Tuhan yang satu itu hadir dalam kesadaran manusia dengan beragam warna. Sebutan Tuhan bisa beragam dengan maksud serupa sesuai pengalaman rohani dan spiritual setiap orang atau sekelompok orang.

Klaim sepihak adalah akibat materialisasi dan positifikasi ke-Maha-Luas-an Tuhan dan firman-firman-Nya. Kecenderungan demikian secara tidak langsung membuat Yang Maha Luas, Yang Maha Besar, Yang Maha Benar dan absolut terperangkap dalam kerangkeng keterbatasan eksklusif meniadakan segala yang berbeda (*the others*). Islamophobia lebih merupakan reaksi sepihak dengan model serupa. Jadilah keberagaman menjadi biang hilangnya nilai suci, sakral, keabadian Tuhan dan firman-firman-Nya.

Secara substantif ajaran semua agama sejatinya menghasung pemeluknya untuk mengasihi, mencintai dan merahmati semua manusia tanpa melihat keyakinan agama dan etnisitasnya. Faktanya pemeluk setiap agama cenderung menempatkan dirinya sebagai paling benar, paling mulia, paling sah, sekaligus merendahkan yang lain yang berbeda. Kecenderungan demikian akibat klaim sepihak berbasis ego ketuhanan absurd yang sejatinya bertentangan dengan maksud otentik Tuhan menurunkan agama dan wahyu-Nya. Hal ini berarti keraguan atas ke-Maha-Kuasa-an Tuhan menentukan segala hal tentang manusia yang tidak bisa diganggu-gugat.

Tuhan atau yang dipercaya sebagai Tuhan oleh penganut agama-agama sebenarnya adalah hal yang tunggal atau sosok yang sama dengan sebutan berbeda sesuai latar belakang pengalaman hidup yang berbeda. Sebenarnya yang dimaksud dengan tuhan oleh setiap agama dengan cara berbeda itu ialah tuhan yang sama yang itu-itu juga.

Mengapa kita mesti bertengkar, bermusuhan, menyerang dan saling berperang berlindung dibalik kuasa Tuhan? Sementara Tuhan yang dimaksud para pihak yang bermusuhan dan berperang itu adalah tuhan yang sama yang itu-itu juga?

Jawaban sederhana yang bisa diberikan ialah karena masing-masing pihak ingin hidup sendiri, hebat sendiri, menang sendiri, masuk surga sendiri. Jika hasrat egois tersebut terpenuhi, surga hanya dihuni segelintir orang dan pemeluk setiap agama akan kesepian tidak punya partner, dan hidupnya akan statis dan beku. Inilah inkonsistensi terbesar dalam keberagaman pemeluk setiap agama.

Agama dan keberagaman di masa depan penuh kemanusiaan bagi semua orang tanpa batas keyakinan, entis dan kebangsaan. Dengan percaya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, pemeluk tiap agama yang saleh haruslah memperlakukan semua orang secara manusiawi tanpa melihat latar belakang keyakinan keagamaannya.

Boleh jadi kepemelukan yang berbeda tiap orang atau sekelompok orang adalah kehendak Tuhan. Upaya mengubah keyakinan orang atau sekelompok orang sesuai keyakinan yang kita sendiri bisa berarti merupakan perlawanan atas kehendak Tuhan itu sendiri. Kesalahan otentik pemeluk setiap agama adalah berlaku santun dan manusiawi kepada setiap orang tanpa melihat latar belakang keyakinan keagamaan, bahkan kepada yang atheis sekalipun.

Tragedi kemanusiaan dengan bom yang meruntuhkan WTC di New York 11 September 2001, adalah dampak ego ketuhanan absurd. Bom Bali yang menyusul kemudian, membuat ribuan manusia menderita. Suatu aksi yang bertentangan dengan maksud Tuhan menurunkan firman-Nya, mencipta alam dan manusia itu sendiri. Itulah prasangka ketuhanan yang gagal memahami ke-Maha-Kasih-an Tuhan, bahkan kepada iblis sekalipun.

Kita mesti belajar hidup bersama dalam ruang plural sebagai cetak-biru dan kehendak Tuhan itu sendiri. Tujuan utamanya ialah untuk menguji makhluknya siapa yang paling jempol. Pluralitas adalah kompetisi dan ujian seberapa pemeluk setiap agama berbeda itu bisa melampaui ego ketuhanannya dengan sikap penuh kasih dan kerendah-hatian.

Mengapa pemeluk agama bisa menjadi brutal dan menakutkan? Jawaban yang bisa diberikan adalah akibat pemeluk cenderung menempatkan diri sebagai kuasa Tuhan sehingga merasa berhak bertindak di luar batas kemanusiaannya. Praktik keagamaan setiap pemeluk agama seringkali tampil seolah lebih hebat dan lebih kuasa dari pada Tuhan itu sendiri.

Kecenderungan demikian diperparah keterlibatan nafsu kuasa dan nafsu ekonomi keserakahan tidak mengenal batas. Dipicu ego etnis eksklusif dan ego ketuhanan absurd membuat praktik keagamaan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sementara semestinya setiap agama itu bisa menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi semua manusia tanpa batas keyakinan, kebangsaan dan etnisitas bahkan juga bagi kaum atheis sekalipun.

Bukankah kepemelukan keagamaan adalah sebuah takdir kehendak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat? Tidakkah disadari bahwa mereka yang berbeda keyakinan itu adalah bukti empiris kehendak Tuhan? Mengapa mesti ditentang dengan tindakan memaksa yang jika perlu dilakukan dengan kekerasan untuk mengubah keyakinan keagamaan seseorang? Bukankah itu berarti menentang kehendak Tuhan?

Pertanyaan demikian perlu diajukan kepada pemeluk tiap agama yang merasa lebih atau paling taat kepada kehendak Tuhan. Melalui cara demikian agar lebih arif dan lebih *ngewongke* atau humanis bagi semua orang yang berbeda keyakinan tanpa mengurangi kesalehan dan kadar keimanannya kepada Tuhan yang diyakininya.

Materialisasi dan positifikasi maksud firman Tuhan mendorong tiap pemeluk agama terperangkap pada batas hitam-putih, halal-haram, dan eksklusif. Reaksi melalui model serupa

memunculkan apa yang populer disebut Islamophobia. Mekanisme dialektis secara demikian berakibat praktik keberagaman berada dalam labirin kekerasan yang saling meniadakan.

Dari sini diperlukan substansialisasi ajaran tiap agama bagi upaya menggali nilai-nilai luhur kemanusiaan sebagai *public-good*. Melalui cara demikian pemeluk tiap agama bisa lebih mengedepankan nilai hakiki ajaran agama sehingga memungkinkan memberi ruang bagi yang lain yang berbeda (*the others*). Selanjutnya dikembangkan daya kreatif membuka ruang hubungan sosial lebih luas kemanusiaan dengan beragam faham dan keyakinan, bagi hubungan lintas etnis dan lintas keyakinan keagamaan.

Secara teologis, ketakutan terhadap kehadiran Islam dan sebaliknya adalah akibat materilisasi ke-Maha-Luas-an Tuhan dan firman-Nya. Sementara di satu sisi Islamophobia adalah kecenderungan natural kehadiran sesuatu yang baru atau dianggap baru yang bisa dicap aneh bahkan sesat dan menyimpang. Dalam internal Islam sendiri, juga internal agama-agama yang ada di dunia, selalu muncul tafsir baru makna firman Tuhan dengan reaksi yang tidak jarang berlebihan yang bisa mengarah pada kebencian. Dari sini diperlukan sikap jujur, terbuka, dan rendah-hati

Dalam hubungan itulah dalam setiap agama ada ajaran tentang perangai jahat dan pengampu perangai jahat yang dalam Islam dikenal dengan nama iblis dan setan yang selalu membujuk manusia berlaku munkar atau jahat. Suatu mekanisme eksistensial yang sebaliknya justru menjadi pemicu gerakan luhur dan saleh di setiap agama. Setan dan iblis di satu sisi

merupakan kekuatan energi penggerak budi-luhur dan manusiawi.

Karena itu jangan mimpi suatu saat akan ada situasi dimana tidak ada lagi kejahatan, karena hal itu bertentangan dengan teologi tentang kehadiran setan dan hari kiamat. Sama halnya dengan kehadiran surga dan neraka di akhir kehidupan untuk berganti pada kehidupan baru dan seterusnya demikian sebagaimana dialektika George Frederik Wilhelm Hegel.

Soalnya, bagaimana menjaga keseimbangan keduanya sehingga hidup menjadi lebih dinamis dan produktif dalam arti memberi ruang lebih besar kepada nilai luhur, nilai saleh, dan bagi mereka yang mendukung dan pelaku keluhuran itu sendiri.

Sayang penganut tiap agama cenderung terjebak pada “mabuk ketuhanan” berprilaku seolah sebagai wakil Tuhan bahkan lebih kuasa dibanding Tuhan sendiri. Dengan dalih dan atas nama Tuhan, menjadi semacam panitia surgawi yang secara sepihak menentukan siapa boleh dan sah masuk surga dan sebaliknya. Di saat yang sama mereka percaya sepenuh hati bahwa Tuhan atau yang dipercaya sebagai Tuhan memiliki kuasa tak terbatas untuk menentukan siapa saja yang boleh dan sah masuk surga dan sebaliknya tanpa bisa diganggu gugat.

Dilema ini hanya mungkin dipahami mereka yang tergolong ulama atau ahli agama tingkat puncak yang dalam Islam dikenal sebagai waliyullah. Tuhan dipercaya memiliki kehendak bebas untuk memahamkan siapa saja atas apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu, tidak ada jaminan bahwa hanya si ulama tingkat puncak itu saja yang bisa memahami maksud firman Tuhan. Begitu pula tidak ada jaminan bahwa sang ulama puncak itu nanti dijamin masuk surga.

Disinilah beragama itu memerlukan kearifan kerendah-hatian tidak mudah dan tidak gampang mengklaim hanya dia yang memahami mana yang benar dan mana yang salah. Kesalehan dan keluhuran budi keagamaan adalah kerendah-hatian, kunci utama hubungan sosial di tengah gencarnya globalisasi penggunaan alat komunikasi melintasi batas budaya dan politik saat ini dan di masa depan.

Setiap agama percaya adanya hari kiamat atau hari akhir dengan nomenklatur berbeda. Setiap agama memiliki ajaran tentang kekuatan gaib, pendukung kejahatan, pendukung kebaikan atau keluhuran. Semua agama mengajarkan tentang keabadian. Hal ini berarti kejahatan dan keluhuran selalu hidup berdampingan.

Buku ini mengurai beragam kasus Islamophobia berbagai kawasan dengan latar belakang berbeda dan bentuk berbeda. Kunci mengurai problem ini ialah sikap jujur, arif, penuh kerendah-hatian. Semoga buku ini bisa menjadi pemantik gerakan budi-luhur atau kesalehan etis dan humanis lintas etnis, lintas bangsa dan lintas keyakinan keagamaan. Hanya melalui cara demikian keberagaman dan praktik sosialnya di masa depan tetap relevan memandu kehidupan dengan mengukuhkan nilai-nilai etis kemanusiaan universal.

kotawisata-kotagede agustus 2022

abdul munir mulkhan (*)

(*)Wakil Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah (2000-2005)
Komisioner Komnas HAM RI (2007-2012)
Guru Besar - UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
SAMBUTAN.....	iii
PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I MUNCULNYA FENOMENA ISLAMOFOBIA.....1

1. Latar Belakang.....	1
2. Hakikat Islamofobia.....	3
3. Islamofobia dan Keamanan	7
3.1. Pergeseran Makna Keamanan	7
3.2. Hakikat Keamanan Nasional	9
3.3. Hakikat Keamanan Insansi	11
4. Fenomena Kemunculan Islamofobia	13
4.1. Fenomena Islamofobia di Negara-negara Barat 15	
4.2. Fenomena Islamofobia di Indo-Pasifik.....	17

BAB II ISLAMOFOBIA DI INDO-PASIFIK.....29

1. Islamofobia di India.....	29
1.1. Latar Belakang.....	30
1.2. Faktor Penyebab Islamofobia di India.....	31
1.3. Bentuk Islamofobia di India	35
2. Islamofobia di Myanmar.....	39
2.1. Latar Belakang.....	40
2.2. Faktor Penyebab Islamofobia di Myanmar	41
2.3. Bentuk Islamofobia di Myanmar	43
3. Islamofobia di Thailand	48
3.1. Latar Belakang.....	49

3.2. Faktor Penyebab Islamofobia di Thailand.....	50
3.3. Bentuk Islamofobia di Thailand	53
4. Islamofobia di Korea Selatan.....	55
4.1. Latar Belakang.....	56
4.2. Faktor Penyebab Islamofobia di Korea Selatan	57
4.3. Bentuk Islamofobia di Korea Selatan	61
5. Islamofobia di Indonesia.....	64
5.1. Latar Belakang.....	66
5.2. Faktor Penyebab Islamofobia di Indonesia	68
5.3. Bentuk Islamofobia di Indonesia	73
BAB III KARAKTERISTIK DAN DAMPAK ISLAMOFobia DI INDO-PASIFIK	79
1. Tipologi Islamofobia di Indo-Pasifik.....	79
2. Dampak Islamofobia di Indo-Pasifik.....	90
2.1. Dampak Islamofobia terhadap Keamanan Nasional	91
2.2. Dampak Islamofobia terhadap Keamanan Manusia	98
BAB IV STRATEGI PENANGGULANGAN ISLAMOFobia	107
1. Tantangan Islamofobia di Indo-Pasifik	107
2. Strategi Pencegahan Nasional dan Regional	114
2.1. Rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia.....	114
2.2. Rekomendasi bagi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)	117
DAFTAR PUSTAKA.....	123

BAB I

MUNCULNYA FENOMENA ISLAMOFOBIA

1. Latar Belakang

Meningkatnya aksi terorisme dan radikalisme yang menggunakan atribut agama Islam pasca serangan Al Qaeda di Amerika Serikat (AS) pada September 2001 telah menimbulkan ketakutan terhadap Islam dan umat Islam atau yang disebut dengan Islamofobia. Islamofobia ini juga bahkan memicu penolakan, kebencian dan sentimen anti Islam dan anti Muslim di berbagai negara, terutama di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Rasa benci tersebut kemudian berkembang menjadi kekerasan terhadap umat Islam yang dibiarkan oleh pemerintah bahkan sepertinya didukung oleh pemerintah melalui kebijakan dan peraturan yang ada. Pemerintah Perancis dan Austria misalnya telah mengambil sikap diskriminatif terhadap umat Islam dengan mengeluarkan peraturan yang sangat membatasi cara beribadah umat Islam di tatanan publik di negara mereka. (Laveda, 2021)

Ketakutan terhadap agama dan pemeluk agama Islam bukan hanya terjadi di Eropa dan Amerika Serikat tetapi juga di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Sentimen Islamofobia meningkat di Myanmar sejak tahun 2012, terutama setelah seorang Pendeta Buddha bernama Ashin Wirathu membentuk gerakan 969 menyebarkan sentimen anti Muslim dan anti Rohingya di negaranya. Akibatnya, sejumlah serangan dan kerusuhan kerap terjadi di kawasan Rakhine, tempat tinggal mayoritas kelompok etnis Rohingya yang beragama Islam.

Kondisi ini dijelaskan oleh seorang peneliti dari Institut Penelitian Perdamaian dan Konflik (IPCS) di Asia Tenggara, Aparupa Bhattacharjee (2014). Ia menyebutkan bahwa kekerasan anti-Rohingya ini muncul sebagai akibat dari adanya sentimen anti-Muslim di Myanmar.

Kekerasan terhadap umat Islam juga terjadi di New Zealand pada tahun 2019. Sebuah penembakan secara brutal dilakukan terhadap umat Islam yang sedang bersembahyang di dua Mesjid yang berbeda oleh seorang pemuda warga negara Australia, Brenton Tarrant. Korban meninggal dan luka-luka pada penembakan itu di antaranya adalah warga Indonesia. Sebelum penembakan, Tarrant sempat mengunggah secara daring sebuah manifesto yang isinya merupakan pandangan pribadi yang sangat negatif terhadap imigran dan umat Islam serta penjelasan mengapa serangan itu dilakukannya. Manifesto itu seakan dijadikan sebagai justifikasi untuk Tarrant melakukan serangannya terhadap umat Islam di Christchurch. (Tim Detikcom, 2019)

Ketakutan dan persepsi negatif masyarakat internasional terhadap agama dan umat Islam ini telah dicatat oleh Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Kebebasan Beragama dan Beribadah, Ahmed Shaheed, dalam laporannya yang berjudul “*Countering Islamophobia/Anti-Muslim Hatred to Eliminate Discrimination and Intolerance Based on Religion or Belief.*” Laporan tersebut disampaikan oleh Shaheed di hadapan pemimpin negara-negara di dunia dalam Pertemuan Sesi ke-46 United Nations Human Rights Council (UNHRC) pada bulan Maret 2021. Dalam laporannya, Shaheed (2021) menyebutkan bahwa Islamofobia di beberapa negara telah meningkat menjadi kebencian dan sentimen anti-Muslim. Bahkan kebencian tersebut berkembang menjadi kekerasan yang didukung oleh

negara terhadap kebebasan beragama dan kehidupan umat Islam di sejumlah negara.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi para penulis untuk membahas perkembangan Islamofobia di Indo-Pasifik. Secara spesifik, tulisan ini dilakukan untuk menjelaskan mengapa terjadi Islamofobia dan dampak yang terjadi sebagai akibat dari munculnya fenomena Islamofobia terutama terhadap keamanan nasional, keamanan insani dan strategi penggangguannya. Tulisan ini dibuat dengan empat tujuan, yaitu: (1) memberikan gambaran tentang fenomena Islamofobia yang terjadi terutama setelah maraknya serangan kelompok terorisme menggunakan simbol agama Islam, (2) menjelaskan mengapa Islamofobia terjadi di Indo-Pasifik dengan mengambil contoh kasus dari negara-negara India, Myanmar, Thailand, Korea Selatan dan Indonesia, (3) menjelaskan dampak dari Islamofobia yang terjadi di negara-negara di atas dan secara spesifik terhadap keamanan nasional dan keamanan insani, (4) memberikan rekomendasi terutama kepada pemerintah Indonesia negara-negara di Asia Tenggara mengenai strategi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi Islamofobia yang terjadi dua dekade terakhir ini.

2. Hakikat Islamofobia

Melihat kondisi Islamofobia yang terjadi belakangan ini, sejumlah pengamat kemudian mencoba mendefinisikan fenomena Islamofobia sebagai sebuah proses sikap yang melibatkan elemen emosional, kognitif, evaluatif, serta berorientasi pada tindakan. Sikap ini berawal dari rasisme yang berkembang menjadi diskriminasi serta sentimen anti Islam dan anti Muslim. (Frost, 2008; Bleich, 2010, 2012; Ciftci, 2012; Allen, 2017; Gholami, 2021; Mondon & Winter, 2017) Istilah

Islamofobia pertama kali digunakan oleh lembaga Runnymede Trust pada tahun 1997 yang menunjuk pada sikap diskriminasi, pelecehan, dan kerugian sosial dan struktural yang ditujukan kepada umat Islam. (Allen, 2017)

Pada tahun 2017, lembaga tersebut menerbitkan kembali sebuah laporan yang mempertimbangkan kondisi dua dekade terakhir. Melihat pada perkembangan yang ada Runnymede Trust kemudian mendefinisikan Islamofobia sebagai “setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan terhadap, atau preferensi terhadap Muslim atau mereka yang dianggap Muslim.” Pembedaan ini tentu saja dilakukan dengan sebuah tujuan dan yang paling jelas adalah mengakibatkan peniadaan atau kerusakan terhadap pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, pada pijakan yang sama, hak asasi manusia, kebebasan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan publik lainnya.

Lebih spesifik, Allen (2017) mencatat bahwa Islamofobia adalah ketakutan atau prasangka yang dibuat-buat yang dipicu oleh struktur kekuatan global Eurosentris dan Orientalis yang selama ini ada. Ketakutan dan prasangka ini diarahkan pada ancaman Muslim yang dirasakan atau nyata melalui pemeliharaan dan perluasan kesenjangan yang terdapat pada hubungan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Lebih jauh lagi, menurut Allen, ketakutan dan prasangka ini dilakukan sambil merasionalisasi perlunya penggunaan kekerasan sebagai alat untuk mencapai "rehabilitasi peradaban" dari komunitas target, yaitu umat Islam.

Dengan kata lain, Islamofobia ibarat upaya untuk memperkenalkan kembali dan menegaskan struktur diskriminasi global terhadap umat Islam, di mana kesenjangan distribusi

sumber daya dipertahankan dan bahkan diperluas. (Allen, 2017; Mondon & Winter, 2017) Pandangan ini serupa dengan pemikiran Erik Bleich (2012) yang melihat Islamofobia sebagai kecemasan sosial dan penolakan terhadap Islam dan budaya Muslim, kelompok Muslim, dan individu Muslim atas dasar prasangka dan stereotip. Meskipun awalnya sentimen Islamofobia ini berkembang di negara-negara barat yang menganut prinsip demokrasi liberal, namun saat ini telah meluas terhadap Islam dan Muslim secara keseluruhan. (Bleich, 2010)

Islamofobia juga dikaitkan dengan sikap rasisme atau kekerasan anti-Muslim berdasarkan ras dan/atau agama. (Gholami, 2021) Diane Frost (2008) menegaskan kekerasan dan rasisme ini diperparah dengan adanya kebijakan negara dan kampanye media yang ditujukan kepada umat Islam dalam konteks politik, sebagaimana yang terjadi di Inggris. Sikap rasistis terhadap Islam ini juga dapat dilihat sebagai sikap atau perilaku yang bermusuhan terhadap umat Islam yang didasari dari pemahaman sempit pola pikir liberal Barat dan sekularisasi yang tidak dapat mengakomodasi agama lain, seperti Islam. (Ciftci, 2012)

Berangkat dari sikap bermusuhan terhadap umat Islam tersebut, Sabri Ciftci (2012) kemudian menyebutkan delapan komponen yang terdapat di dalam Islamofobia, yaitu: (1) Islam dipandang sebagai agama yang monolitik, statis dan tidak reponsif terhadap perubahan, (2) Islam dipandang terpisah dan dianggap sebagai yang “lain,” (3) Islam dipandang sebagai inferior terhadap Barat, dan dianggap barbar, irasional, primitif dan seksis, (4) Islam dikaitkan dengan kekerasan, tindakan agresif, mengancam dan mendukung terorisme, (5) Islam dipandang sebagai ideologi politik dan sering digunakan untuk keuntungan politik atau militer, (6) kritik yang dibuat oleh Barat

tentang Islam ditolak mentah-mentah, (7) permusuhan terhadap Islam digunakan untuk membenarkan praktik diskriminatif terhadap umat Islam dan pengucilan umat Islam dari masyarakat arus utama, dan (8) permusuhan terhadap umat Islam dipandang sebagai hal yang wajar dan normal.

Pada tingkat yang lebih ekstrim lagi, Islamofobia dapat bermanifestasi menjadi sebuah tindakan langsung berupa serangan fisik maupun non-fisik terhadap umat Muslim maupun properti-properti yang berkaitan dengan Islam. Dalam hal ini, Islamofobia dapat berupa intimidasi dan diskriminasi dalam pengaturan kelembagaan, di mana mereka yang dianggap Muslim menerima perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan mereka yang non-Muslim. Islamofobia juga dapat menghasilkan tindakan yang mengacu pada insiden di mana ada elaborasi berkelanjutan dan sistematis di domain publik yang meremehkan Islam dan umat Islam. (Sayyid, 2014)

Dari berbagai penjelasan tentang Islamofobia, Tariq Modood (2020) mencoba membuat kategori Islamofobia dalam sosiologi normatif, yaitu: (1) Islamofobia sebagai alienasi/pengasingan atau rasisme budaya terhadap umat Muslim, (2) Islamofobia sebagai bentuk *othering* atau menganggap Muslim sebagai yang “lain” orang asing, minoritas, inferior, mengancam, dan untuk dikecualikan, (3) Islamofobia sebagai kritik terhadap yang “lain” dengan menggunakan pengetahuan dan pemahaman *non-othered* tentang *othered*, (4) dan dengan demikian Islamofobia merupakan kritik yang tidak masuk akal terhadap Islam dan Muslim. Berdasarkan kategorisasi dan tipologi inilah, para penulis mencoba membuat gambaran dan klasifikasi Islamofobia yang terjadi di Indo Pasifik khususnya di negara India, Myanmar, Thailand, Korea Selatan dan Indonesia.

3. Islamofobia dan Keamanan

Kondisi yang berkembang akibat adanya Islamofobia terutama yang terjadi pada masyarakat plural secara suku, agama, dan ras tentu saja berdampak terhadap keamanan, baik keamanan nasional maupun keamanan insani. Islamofobia yang muncul pada gilirannya membahayakan umat Islam itu sendiri atau menimbulkan ketegangan antar umat beragama terutama di negara-negara yang identitas agama masyarakatnya beragam, seperti di Indonesia. Bahkan, Islamofobia yang terjadi di suatu negara dapat merusak hubungan suatu negara dengan negara lain dan menyebabkan terjadinya instabilitas politik di kawasan.

Di samping itu, isu rasialisme yang terjadi terhadap warga Turki yang beragama Islam di Eropa, persekusi dan penolakan terhadap warga etnis Rohingya di Myanmar serta penembakan terhadap umat Islam yang sedang bersembahyang di dua masjid di Selandia Baru oleh warga Australia menunjukkan bahaya dari menguatnya sentimen Islamofobia terhadap umat Islam. Ini berarti Islamofobia menjadi ancaman yang nyata serta potensial bagi keamanan. Untuk itu, pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana Islamofobia berdampak terhadap keamanan, baik keamanan nasional suatu negara maupun keamanan insani di negara tersebut.

3.1. Pergeseran Makna Keamanan

Terkait keamanan, sejumlah pengamat keamanan internasional menjelaskan bahwa ketika Perang Dingin berakhir, terjadi pergeseran faktor dan struktur keamanan nasional. Secara tradisional, konsep keamanan didominasi oleh faktor kekuatan militer dan kerjasama antar negara dalam menciptakan interdependensi demi menjaga stabilitas dan keamanan. Namun konsep keamanan hari ini telah berkembang

menjadi lebih luas dengan mempertimbangkan bukan hanya negara yang perlu diamankan tetapi juga manusia dan segala sesuatu yang ada di dalam negara tersebut yang bisa terancam.

Keamanan nasional yang awalnya selalu berkaitan dengan kedaulatan negara dan wilayah teritorial telah berkembang menjadi sebuah konsep yang juga mencakup keamanan warga negara. Konsep ini juga mencakup keamanan kehidupan setiap individu dan propertinya, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam suatu negara seperti ekonomi, sosial politik, kebudayaan, ekologi dan sosial termasuk ketika terjadi konflik. Konsep keamanan ini juga berkembang sejalan dengan bergesernya ancaman dalam konteks hubungan internasional saat ini. (Brown, 1986; Grizold,1994; Alkire, 2003; Zelikow, 2003; Paez, 2007; Benedek, 2008; Pettman, 2010; Newman 2010)

Keamanan nasional muncul dan berkembang sejak dimulainya diskusi mengenai ilmu Hubungan Internasional. Aman dan stabil seolah menjadi komoditas yang utama sejak zaman Yunani kuno hingga munculnya konsep negara modern pada tahun 1648 bahkan sampai saat ini. Ketakutan menjadi faktor utama dari ketidakamanan dan ketidakstabilan yang kemudian menjadi narasi utama yang menghiasi paradigma keamanan dalam ilmu Hubungan Internasional. Keamanan saat ini telah mengarah pada keamanan non-tradisional di luar perang antar negara yang melibatkan strategi militer, seperti keamanan terhadap ancaman terorisme, pencurian ikan, pembalakan kayu liar, pembajakan dan kejahatan transnasionalisme lainnya.

Keamanan nasional pun melewati banyak dinamika mulai dari paradigma realisme yang murni membahas strategi dalam

perang hingga keamanan nasional yang diperluas maknanya menjadi keamanan berbasis liberalisme. Itu sebabnya dalam buku ini, keamanan nasional juga akan direntangkan mulai dari konsep klasik keamanan suatu negara hingga keamanan manusia sebagai pengejawantahan keamanan modern non-tradisional.

3.2. *Hakikat Keamanan Nasional*

Pemikiran mazhab realisme menjadi tiang utama dari keamanan nasional dalam ilmu Hubungan Internasional secara tradisional. Keamanan nasional adalah sebuah paradigma yang membahas segala sesuatu mengenai sektor keamanan dan seluruh dimensi pendukungnya dari suatu negara. Kemenhan RI (2015) menjelaskan bahwa keamanan merupakan sebuah situasi yang membutuhkan instrumen atau alat untuk mencapai sebuah situasi yang stabil, sehingga situasi tersebut dapat dikatakan aman atau terkendali.

Negara merupakan sebuah sarana yang memiliki tujuan-tujuan tertentu yang menjadi khas entitasnya, atau sering dikenal dengan kepentingan nasional. Lebih lanjut lagi, negara memiliki kewenangan dan seperangkat metode untuk menciptakan keamanan. Kewenangan negara dibutuhkan karena permasalahan keamanan nasional menurut analogi Ken Booth (1991) adalah sangat kompleks, seperti rumah dan rumah membutuhkan perawatan. Jenis perawatan dan metode merawatnya tentu akan berbeda pada setiap sektor dan dimensinya.

Schelling dalam Art dan Jervis (2009) mengatakan bahwa keamanan nasional secara tradisional selalu dikaitkan dengan kekuatan militer. Namun kekuatan militer modern sekarang ini bukan hanya sebagai bentuk pengaman bagi negara tetapi juga

ajang kontes unjuk kekuatan yang brutal seperti membasmi atau membunuh musuh. Pada zaman dahulu, perang lebih condong pada kontes strategi dan alat untuk memperjuangkan kepentingan, tetapi pada masa sekarang, perang lebih digunakan untuk agenda balas dendam dan atau agenda lain yang kadang rahasia dan tersembunyi.

Serupa dengan pemikiran Schelling, Melvyn Leffler (1990) mencatat dua faktor penting dari keamanan nasional yaitu faktor domestik dan internasional. Menurutnya, tujuan utama dari keamanan nasional adalah untuk melindungi inti dari nilai-nilai domestik dari pengaruh atau ancaman dari negara lain atau faktor internasional. Itu sebabnya *power* atau kekuatan militer memiliki peranan penting yang dapat mempengaruhi bagaimana sebuah negara bertindak atau melaksanakan kebijakan terkait keamanan nasionalnya. Namun keamanan nasional semacam itu mulai bergeser dari kondisi tradisionalnya. Yang dulunya selalu menganggap negara lain dengan kekuatan militernya sebagai ancaman utama bagi keamanan nasional, saat ini ancaman bisa datang dari mana saja dan dalam bentuk apa saja. (Brown, 1986; Zelikow, 2003)

Pandangan tentang pengaruh kekuatan serta wujud dari kekuatan nasional juga telah bergeser bersamaan dengan perubahan tatanan politik internasional. Jika sebelumnya dunia diwarnai oleh dua kekuatan utama yang saling bertentangan ideologinya, saat ini telah muncul banyak poros kerjasama multilateral yang turut mempengaruhi situasi politik global. Dengan demikian, ancaman terhadap keamanan nasional juga telah bergeser, mulai dari memburuknya kondisi lingkungan dan perubahan iklim hingga keterbatasan sumber daya alam.

Itu sebabnya, dalam buku ini yang dianggap sebagai ancaman adalah praktek-praktek Islamofobia yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara atau pembiaran yang merugikan dan mengancam keselamatan umat Islam di negaranya, sehingga dapat mempengaruhi hubungan negara tersebut dengan negara lain, terutama dengan negara-negara Islam. Islamofobia dalam konteks hubungan antar umat beragama di suatu negara juga bisa menimbulkan konflik horizontal antar kelompok umat beragama dan konflik vertikal yaitu dengan pemerintah. Kondisi seperti ini jika dibiarkan dapat meluas dan berpotensi menimbulkan instabilitas politik di dalam negeri.

3.3. *Hakikat Keamanan Insansi*

Keamanan nasional saat ini juga telah berfokus pada keamanan manusia atau keamanan insani dan sistem pendukung kehidupan yang berkelanjutan. (Brown, 1986; Pettman, 2010) Keamanan manusia di sini mencakup perlindungan dan pemberdayaan orang-orang dalam situasi konflik kekerasan, dalam situasi pasca-konflik, dalam situasi perdagangan dan pasar yang tidak adil, dan dalam kondisi tanpa fasilitas kesehatan, pendidikan, serta perlindungan kekayaan intelektual. Intinya, keamanan manusia sangat berkaitan erat dengan hak asasi manusia dan keamanan terhadap setiap manusia dari setiap ancaman terhadap martabat manusia. (Benedek, 2008)

Dengan demikian, keamanan manusia adalah sebuah konsep atau paradigma keamanan yang meluaskan aspek keamanan dari yang semula terkurung dari batas-batas dan kepentingan negara, menjadi aspek yang berfokus pada individu sebagai rujukan dan penerima manfaat utama di dalam tataran global. (Newman, 2010) Artinya, konsep keamanan manusia ini berkaitan dengan bagaimana negara menciptakan dan menjaga

keamanan setiap individu. (Paez, 2007) Lebih jauh lagi, Dana Perwalian PBB untuk Keamanan Manusia atau UNTFHS (1991) memperkenalkan sebuah istilah yang pada akhirnya menjadi paradigma yang melandasi keamanan manusia secara global. Istilah tersebut adalah *freedom from fear* (kebebasan dari rasa takut) dan *freedom from want* (kebebasan dari keinginan) yang kemudian dijadikan sebagai definisi dasar keamanan manusia dalam laporannya.

Sabine Alkire (2003) memberikan karakteristik dari keamanan manusia ini, yaitu: (1) keamanan manusia adalah persoalan universal dan relevan untuk semua orang di mana saja, di negara kaya maupun miskin, (2) komponen keamanan manusia saling bergantung karena itu lebih baik dikelola melalui pencegahan dini daripada intervensi, dan (3) keamanan manusia berpusat pada manusia. Ini berkaitan dengan bagaimana setiap individu hidup dan bernafas dalam masyarakat, seberapa bebas mereka menggunakan hak dan pilihan mereka, seberapa banyak akses yang mereka miliki ke pasar dan peluang sosial serta apakah mereka hidup dalam konflik atau damai. Secara detail, Gómez and Gasper (1994) menjelaskan tujuh kategori utama nilai-nilai keamanan manusia yang sering terancam, yaitu keamanan ekonomi, ketahanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan politik, dan keamanan masyarakat.

Berangkat dari pandangan tersebut, Earl Conteh-Morgan (2005) membedakan keamanan manusia pada tiga level yaitu tingkat individu, institusional dan struktural-budaya. Menurutnya negara dapat mewujudkan keamanan manusia pada tiga level tersebut secara lebih efektif dalam proses penciptaan perdamaian. Namun negara perlu melakukannya dengan tiga kondisi, yaitu: (1) memperhitungkan budaya, identitas dan

pendekatan *bottom-up* interpretatif untuk membangun perdamaian ketika menangani masalah individu, kelompok, dan masyarakat yang terpinggirkan; (2) budaya merupakan faktor penting bagi keamanan manusia dan pembangunan perdamaian baik dalam konteks material maupun konteks sosial; dan (3) perlu upaya serius yang dilakukan secara *bottom-up* untuk menjamin keamanan manusia pada tingkat individu, institusional, dan struktural.

4. Fenomena Kemunculan Islamofobia

Fenomena menguatnya radikalisme, terorisme dan aksi intoleransi yang mengatasnamakan agama Islam menjadi tantangan bagi banyak negara di dunia selama dua dekade terakhir. Bukan hanya radikalisme yang berkembang menjadi aksi terorisme dan intoleransi saja yang menjadi masalah. Namun munculnya ketakutan serta sentimen anti Islam dan umat Islam atau yang dikenal dengan istilah Islamofobia sebagai akibat dari radikalisme dan aksi terorisme tersebut belakangan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri. Tantangan ini bukan hanya dialami oleh negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, tetapi belakangan juga menyebar ke berbagai negara di sejumlah kawasan, termasuk juga Indo-Pasifik.

Terdapat kaitan yang signifikan antara meningkatnya serangan terorisme dan aksi radikalisme yang berbasis agama Islam terhadap munculnya Islamofobia di sejumlah negara. Meskipun masyarakat Islam itu sendiri sangat beragam dan bukan merupakan satu entitas, namun tidak semua orang memahami perbedaan yang ada di dalam kelompok Islam. Sejumlah penelitian sesungguhnya telah menunjukkan bahwa Islam di dunia ini tidak bisa dianggap sebagai satu entitas yang

sama. Di Indonesia, misalnya ada sejumlah tulisan yang menjelaskan perbedaan tentang penganut agama Islam di Indonesia dan membuat klasifikasi kelompok umat Islam, khususnya di Jawa.

Clifford Geerts (1960) misalnya telah mengelompokan umat Islam di Jawa Tengah ke dalam tiga kelompok yang berbeda dan menyebut mereka dengan sebutan Islam abangan, santri dan priyayi. Belakangan, ada juga para ahli yang mengelompokan umat Islam di Indonesia ke dalam kelompok modernis dan tradisionalis berdasarkan pola pikir dan cara hidup mereka. (Toyibah, 2020) Pandangan yang lebih baru setelah munculnya kelompok teroris dan radikal Islam di berbagai negara di dunia adalah melihat Islam dari pendekatan secara moderat dan radikal berdasarkan pemikiran dan tujuan politik umat Islam (Yunanto, 2018).

Namun ketidakpahaman masyarakat internasional tentang keragaman ajaran dan aliran dalam Islam, membuat Islamofobia yang muncul di berbagai negara pada akhirnya malah membahayakan umat Islam itu sendiri. Islamofobia juga dapat menimbulkan ketegangan antar umat beragama terutama di negara-negara yang identitas agama masyarakatnya beragam. Isu rasialisme terhadap masyarakat Turki yang beragama Islam di Eropa, serangan dan penolakan terhadap warga etnis Rohingya di Myanmar serta penembakan terhadap umat Islam yang sedang bersembahyang di dua masjid di Selandia Baru oleh warga Australia menunjukkan bahaya dari menguatnya sentimen Islamofobia di masyarakat yang plural secara identitas agama terhadap umat Islam di negara-negara tersebut.

4.1. *Fenomena Islamofobia di Negara-negara Barat*

Ketakutan dan persepsi negatif terhadap Islam dan Muslim di negara-negara Barat, terutama di Amerika Serikat (AS) muncul setelah serangan kelompok Al Qaeda ke Menara kembar World Trade Center (WTC) dan Gedung Pentagon AS. Serangan pada 11 September 2001 ini menewaskan sekitar 3000 orang. Wajar saja jika pemerintah AS menjadi khawatir dengan aksi dan serangan terorisme di negara mereka. Namun, kekhawatiran pemerintah dan warga AS terhadap serangan terorisme di negaranya dan di berbagai negara di dunia dengan segera berubah menjadi kebencian terhadap umat Islam. Sentimen anti-Muslim yang meningkat setelah peristiwa 9/11 ini juga terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah umat Islam yang datang dan tinggal di AS. (Hartig, 2021)

Hasil survey yang dilakukan oleh Pew Research pada bulan September 2001 menunjukkan peningkatan jumlah warga AS yang curiga terhadap keturunan Timur Tengah meningkat dari 28% menjadi 36% hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Bahkan dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa 32% pendukung partai Republik dan 23% pendukung partai Demokrat mengaitkan umat dan agama Islam lebih dekat dengan kekerasan jika dibandingkan dengan agama lainnya. Angka ini melonjak drastis terutama pada pendukung partai Republik ketika survey dilakukan kembali oleh Pew research Center pada tahun 2021 di mana 72% pendukung partai Republik dan 32% pendukung partai Demokrat mengatakan hal yang sama. Survey yang dilakukan oleh Pew Research juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah umat Islam yang mengalami diskriminasi sepanjang tahun 2007-2017. (Hartig, 2021)

Survey lain yang dilakukan oleh Gallup Poll pada tahun 2011 juga menunjukkan bagaimana sikap masyarakat di sejumlah negara Barat tidak menghormati umat Islam yang tinggal di antara mereka. Di Amerika Serikat, sekitar 52% responden menyatakan bahwa warga AS tidak menghormati umat Islam di negara mereka dan 48% responden dari Kanada menyatakan hal yang sama. Inggris, Jerman, Perancis dan Italia juga mengalami hal yang sama, meskipun persentase lebih sedikit. (Gallup, 2011) Ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya ketegangan dan sikap tidak hormat antara masyarakat Barat dan umat Islam, di antaranya adalah perbedaan budaya, agama dan kepentingan politik di antara mereka.

Sementara warga AS dan Kanada melihat agama dan kepentingan politik menjadi penyebab utama ketegangan dengan umat Islam, warga di Eropa justru melihat kepentingan politik lebih mendominasi kemarahan warga Eropa terhadap umat Islam yang ada di negara mereka. Ketakutan terhadap Islam atau Islamofobia di negara-negara di Eropa ini menurut Presiden Turki, Recep Tayyop Erdogan telah menyebar cepat. Hal ini mengakibatkan sekitar 35 juta umat Islam yang tinggal di Eropa rentan dengan ancaman bahkan menjadi korban kejahatan rasial. Kekerasan terhadap umat Islam di Eropa ini, menurut Erdogan terjadi terutama di Perancis dan Austria yang telah mengambil sikap bermusuhan melalui peraturan dan kebijakan yang berlaku di negara tersebut. (Laveda, 2021)

Hal serupa disampaikan oleh European Union Agency for Fundamental Rights dalam survey yang mereka lakukan pada tahun 2017. Dari hasil survey mereka diperoleh hasil bahwa 4 dari 10 responden, atau sekitar 38% responden merasakan diskriminasi akibat etnis mereka. Survey ini dilakukan terhadap

para imigran dan keturunan mereka yang kebanyakan berasal dari Turki, Asia Selatan, Afrika Utara dan Sub-Sahara yang beragama Islam. (European Union Agency for Fundamental Rights, 2017)

Seperti yang disampaikan dalam laporan Utusan Khusus PBB, Ahmad Shaheed, dalam pertemuan global tahun 2021 lalu, kebencian dan sentimen anti-Muslim masyarakat di sejumlah negara Eropa telah mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang membatasi hak dan ruang gerak umat Islam. Hal ini terjadi misalnya di Swiss pada akhir tahun 2009, ketika partai terbesar di parlemen Swiss melakukan referendum larangan pembangunan kubah masjid. Pemerintah menentang larangan tersebut dengan alasan akan merusak citra negara terutama pandangan umat Islam terhadap Swiss. Namun, hampir 60% pemilih dan 22 dari 26 distrik di Swiss memilih untuk mendukung larangan tersebut. (Gallup, 2011)

Di Perancis, ada konsensus politik terhadap undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2004 dan pada tahun 2010. Undang-undang pada tahun 2004 melarang adanya simbol-simbol agama di sekolah-sekolah negeri dan UU pada tahun 2010 melarang penggunaan penutup wajah yang kerap digunakan oleh para perempuan Muslim. Kedua aturan ini diperjuangkan oleh kelompok kiri di parlemen Perancis dan mendapat dukungan luas dari masyarakat selama pemungutan suara di parlemen. (Peace, 2019)

4.2. *Fenomena Islamofobia di Indo-Pasifik*

Ketakutan terhadap agama dan pemeluk agama Islam, bukan hanya terjadi di Amerika Serikat dan Eropa tetapi juga di Indo-Pasifik. Meskipun belum terlalu banyak namun sejumlah tulisan dan publikasi telah menyorot pada permasalahan

munculnya Islamofobia di Indo-Pasifik, seperti Thailand, Myanmar, Malaysia, Indonesia, India dan Korea Selatan serta menjelaskannya dari berbagai perspektif. Berbagai tulisan ini umumnya menjelaskan sejarah munculnya dan penyebab terjadinya Islamofobia di sejumlah negara. Para penulis menjelaskan berbagai faktor yang menjadi pemicu terjadinya fenomena Islamofobia ini, termasuk masalah sosial, ekonomi, politik, perbedaan identitas dan keberpihakan pemerintah dalam hal kebijakan kepada umat Islam di negaranya.

Mohamed Nawab Bin Mohamed Osman (2017) menjelaskan tentang bagaimana Islamofobia terjadi di Myanmar dan Malaysia. Nawab menyebutkan bahwa Islamofobia yang berkembang di Asia, khususnya di kedua negara tersebut di atas terjadi lebih banyak disebabkan karena adanya masalah sosial, gap ekonomi dan kondisi politik di dalam negerinya. Kondisi ini terus berlangsung dan berkembang hingga memunculkan sentimen anti-Islam serta Islamofobia di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari di kedua negara tersebut. Selain itu, Nawab juga mencatat bahwa Islamofobia di Myanmar dan Malaysia berkembang dengan latar belakang sejarah yaitu adanya migrasi etnis yang dilakukan oleh pemerintah Inggris pada masa kolonialisme di dua negara tersebut.

Meskipun kedua negara memiliki latar belakang sejarah yang hampir sama pada masa pendudukan Inggris dan memicu terjadinya Islamofobia, namun ada beberapa hal yang membedakan fenomena yang terjadi di antara keduanya. Di Myanmar, muncul faktor penyebab secara khusus seperti berkembangnya gerakan ekstrimis Buddha yang dipimpin para biksu di Myanmar. Sedangkan di Malaysia, munculnya Islamofobia secara khusus disebabkan karena adanya dominasi

etnis Melayu yang beragama Islam dan kebijakan serta tindakan afirmatif berbasis ras yang dijalankan oleh pemerintah Malaysia. Kebijakan ini dirasa jauh lebih menguntungkan dan memberikan fasilitas bagi warga Melayu Islam dibandingkan bagi warga dengan etnis dan agama lain. Dalam tulisannya ini, Nawab menyimpulkan bahwa Islamofobia di kawasan Asia telah berkembang melalui sejarah kolonialisme, kebijakan rasial pemerintahan paska kolonial dan politisasi agama.

Terkait Islamofobia yang terjadi di Myanmar, Penny Green (2013) menegaskan bahwa Islamofobia ternyata sudah mengakar dengan sangat kuat di Myanmar. Fenomena ini menjadi tidak terkendali bukan hanya terhadap etnis Rohingya namun juga seluruh umat Muslim yang ada di Myanmar. Kebijakan pemerintah negara Myanmar ditambah dengan ketidakpedulian kepala pemerintahan semakin memperburuk keadaan yang ada. Diskriminasi dan kekerasan terhadap umat Islam terus terjadi di Myanmar karena mereka dianggap bukan sebagai bagian dari warga Myanmar yang dibangun atas dasar nasionalisme Buddha. Bahkan Green menegaskan bahwa Islamophobia dan rasisme yang terjadi di Myanmar sudah termasuk dalam kategori Islamofobia yang dilembagakan lewat politik dan kebijakan negara yang diskriminatif terhadap umat Muslim di negara tersebut.

Islamofobia yang terjadi di Myanmar jelas menimbulkan dampak negatif dan trauma mendalam bagi warga Rohingya. Hal ini dijelaskan oleh Salman Majeed (2019) yang menceritakan bagaimana perjalanan sejarah muslim Rohingya menjadi etnis minoritas yang tidak diakui sebagai bagian dari Myanmar. Akibat tidak adanya pengakuan tersebut, warga Rohingya rentan mendapatkan diskriminasi serta penindasan bukan saja dari warga masyarakat tetapi juga dari pemerintah

setempat. Artikel ini berfokus pada dampak dari adanya diskriminasi dan sikap anti muslim terhadap minoritas Rohingya. Majeed menyimpulkan Islamofobia di Myanmar telah menimbulkan trauma mendalam yang sangat berbahaya bagi kesehatan mental warga minoritas Rohingya.

Berbeda dengan Myanmar, Malaysia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Namun demikian, fenomena Islamofobia yang terjadi di kalangan umat Buddha seperti di Myanmar juga terjadi di Malaysia. Menurut Ahmad Faizuddin Ramli, Jaffary Awang, & Zaizul Ab Rahman (2020), Islamofobia yang berkembang di Malaysia, khususnya di kalangan umat Buddha, berakar dari adanya pandangan negatif terhadap umat Muslim dan Islam. Salah satu perbedaan yang paling mencolok antara Islamofobia di Myanmar dan Malaysia terutama terletak pada kebijakan Islamisasi yang dilakukan warga etnis Melayu dan didukung oleh kebijakan pemerintah. Inilah yang kemudian berkembang menjadi akar masalah Islamofobia di Malaysia.

Ketakutan dan ancaman yang dirasakan umat Buddha Malaysia mendorong mereka untuk berusaha mendominasi dan mendiskriminasi umat Islam di ranah politik maupun administratif. Meskipun Islamofobia yang ada di umat Buddha sudah berkembang cukup besar, namun Faizuddin dkk menyimpulkan bahwa Islamofobia di Malaysia relatif masih terkontrol karena masih ada umat Buddha yang memiliki toleransi terhadap agama lainnya.

Selain Myanmar dan Malaysia, Mohamed Nawab bin Mohamed Osman (2019) menjelaskan bahwa Islamofobia juga terjadi di Filipina. Bahkan sentimen itu telah berakar lama dalam masyarakat Filipina sebagai akibat dari kebijakan yang

diterapkan selama masa kolonial bangsa Spanyol di negara ini. Saat itu Spanyol menyebut umat Islam dengan sebutan “Moor”, yang memiliki arti ‘licik, kejam, liar, berbahaya, bajak laut, perampok.’ Spanyol terlibat peperangan dengan kelompok Muslim selama 300 tahun hingga abad ke-19, yang kemudian dikenal dengan Perang Moro.

Salah satu upaya untuk menghapuskan umat Islam di Filipina, Spanyol berusaha untuk mengubah umat Muslim menjadi pemeluk agama Katolik. Spanyol juga menggunakan strategi ‘memecah belah dan menaklukan’ yang dilakukan dengan memisahkan secara geografis pemeluk agama Islam dan Katolik, sehingga muncul rasa saling tidak percaya di antara keduanya. Cara memerintah yang dilatarbelakangi Islamofobia ini tidak berhenti pada masa kolonial Spanyol saja, namun berlanjut hingga kepemimpinan Amerika Serikat di Filipina.

Nawab (2019) juga berargumen bahwa pemicu lain dari Islamofobia pasca era kolonialisme di Filipina adalah adanya kelompok pemberontak yang beragama Islam di Pulau Mindanao, bagian Selatan Filipina. Konflik antara Pemerintahan Filipina dan Bangsa Moro yang telah berlangsung cukup lama menjadi alasan bagi pemerintah Filipina untuk memberikan inklusivitas anggota militer hanya kepada pemeluk Katolik. Bahkan pada tahun 2000, Pemerintah Pasig menerapkan sistem diskriminasi yang memberikan kartu identitas khusus bagi Muslim dengan alasan untuk mendeteksi kelompok teroris.

Perilaku diskriminasi juga dilakukan pada level masyarakat dan bukan hanya level pemerintah saja. Sentimen anti-Muslim banyak ditemukan di media sosial dan terdapat juga resistensi terhadap perempuan yang memakai hijab atau

niqab. Hijab dan niqab dinilai sebagai simbol keterbelakangan, hingga beberapa guru dilarang untuk memakainya selama mengajar.

Meskipun pemeluk Katolik adalah mayoritas di Filipina, namun Filipina bukanlah negara berbasis Katolik. Jayeel Serrano Cornelio (2013) menuliskan bahwa kebebasan beragama telah menjadi poin utama dalam Konstitusi Filipina sejak tahun 1899. Pemisahan negara dan agama telah menjadi fondasi konstitusi dan telah berhasil diimplementasikan, khususnya pada masa pemerintahan Amerika di Filipina.

Namun studi kualitatif yang dilakukan oleh psikolog perdamaian Macapagal dan Montiel (2007) menemukan bahwa umat Muslim merasa sebagai kelompok minoritas lebih sulit untuk diterima oleh kelompok mayoritas. Umat Islam merasa diasingkan oleh pemerintah dibanding pemeluk agama lainnya dan pelajar Muslim cenderung setuju bahwa pemerintah 'telah merampas hak-hak kelompok Muslim atas kebebasan dan penentuan nasib.' Itu sebabnya, Cornelio berargumen bahwa langkah menuju pembentukan perdamaian sangat penting untuk diambil oleh pemerintah Filipina.

Berbeda dengan pandangan sejumlah akademisi yang melihat fenomena Islamofobia dari perspektif historis dan sosial politik, Rizki Amelia Fitriyani, Sabilul Maarifah Karmidi, dan Putri Estian (2015) melihat peranan media sebagai penyebab utamanya munculnya fenomena ini. Ketiganya menjelaskan secara detail bagaimana Islamofobia terjadi sebagai akibat dari stereotype yang dibentuk oleh media terhadap umat Islam. Menurut artikel ini, yang terjadi belakangan setelah aksi terorisme pasca 2001 adalah perilaku media Barat yang terus

memberitakan informasi tentang aksi terorisme dan mengaitkannya dengan Islam.

Akibatnya, muncul pandangan negatif terhadap Islam dan akhirnya memicu Islamofobia di masyarakat global. Tulisan Rizki Amelia dkk ini juga mencoba menjelaskan bagaimana media punya peranan penting dalam mengubah pandangan dunia terhadap Islam dan Timur Tengah. Ketika media mengaitkan Islam dan Timur tengah dengan tindakan terorisme yang terjadi di berbagai negara, maka timbulah ketakutan masyarakat internasional terhadap Islam. Bahkan ketakutan itu juga meluas kepada setiap orang yang masuk ke dalam stereotipe Muslim yang diciptakan oleh media Barat tersebut.

Tulisan tersebut di atas secara spesifik menjelaskan penyebab munculnya Islamofobia yang bersumber dari peranan media, khususnya media Barat yang memberikan kesan negatif terhadap Islam dan umat Islam. Dengan informasi yang disampaikan oleh media Barat secara intensif maka terbentuklah persepsi dari para pembaca atau penontonnya terhadap Islam dan Timur Tengah. Dari persepsi itulah kemudian muncul sentimen anti-Islam yang akhirnya berkembang menjadi Islamofobia.

Meski tulisan tersebut telah menjelaskan secara spesifik tentang peranan media yang mendorong lahirnya Islamofobia, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apa dampak dari Islamofobia, dan apakah kawasan yang berbeda juga akan mengalami dampak yang berbeda. Itu sebabnya, dalam buku ini akan lebih fokus kepada dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari Islamofobia, dan secara spesifik di Indo-Pasifik, terutama negara India, Indonesia, Myanmar, Thailand dan Korea Selatan.

Salah satu tulisan yang menarik untuk diperhatikan terkait Islamofobia adalah yang terjadi di Thailand. Jesada Buaban (2020) menulis dan mendiskusikan bagaimana Islamophobia terjadi di Thailand dengan menggunakan tinjauan historis. Ia menjelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan umat Buddha di Thailand terhadap umat Islam adalah dengan cara menyebarkan kebencian terhadap umat Islam di sana. Diskriminasi dan aksi kekerasan yang dialami oleh minoritas Muslim inilah yang menjadi alasan munculnya separatisme di kawasan Thailand Selatan.

Buaban mencatat bahwa gerakan Buddha Thailand yang diinisiasi beberapa organisasi Buddha menganggap umat Islam telah merusak tatanan negara dan berbahaya bagi umat Buddha. Bahkan organisasi Buddha di Thailand *Buddhism Protection Center of Thailand* memiliki tujuan untuk menjadikan Thailand sebagai negara agama Buddha. Menariknya, Buaban juga menyebutkan bahwa Islamofobia di Thailand sebagai akibat kegagalan pemerintah untuk membangun sekulerisme di Thailand.

Kegagalan lainnya yang juga dikritik oleh umat Buddha adalah ketika pemerintah dalam sejumlah kebijakannya memfasilitasi dan memberikan keistimewaan bagi umat Islam. Di satu sisi, kebijakan ini diberikan dengan maksud agar umat Islam di Thailand tidak lagi menuntut kemerdekaan bagi wilayah mereka. Namun di sisi lain, keistimewaan terhadap umat Islam ini ditanggapi dengan menguatnya keinginan umat Buddha untuk menjadikan Thailand sebagai negara yang menjadikan agama Buddha sebagai identitas negaranya.

Salah satu yang menonjol menurut Buaban adalah munculnya pertentangan antara penguatan identitas agama dan sekulerisme sebagai faktor pemicu Islamofobia dan kebencian terhadap umat Islam di Thailand. Kegagalan pemerintah Thailand untuk memisahkan agama dari urusan pemerintahan, membuat warga Buddha seakan memperoleh legitimasi untuk melancarkan aksi kekerasannya terhadap umat Islam. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Islamofobia bukan saja disebabkan oleh urusan sosial, budaya dan perbedaan identitas agama, tetapi juga kemampuan pemerintah negara untuk menangani urusan agama di dalam negerinya.

Thameem Ushama (2020) juga menjelaskan bagaimana Islamofobia terjadi di negara besar di kawasan seperti India. Sentimen anti-Islam ini terbentuk dari rasa takut dan kebencian akibat fanatisme kelompok masyarakat Hindu di sana. Fanatisme ini kemudian menghasilkan diskriminasi yang berujung pada aksi intoleransi terhadap kelompok minoritas Muslim di sejumlah wilayah di India.

Menurut Ushama, Islamofobia di India memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa Kerajaan Mughal, yaitu masa dimana penguasa Muslim melakukan penindasan terhadap masyarakat Hindu. Sejalan dengan waktu, Islamofobia di India saat ini terus berkembang terutama melalui gerakan-gerakan masyarakat beragama Hindu yang anti pada kelompok minoritas terutama minoritas Islam. Bahkan menurut Ushama dalam tulisannya organisasi masyarakat Hindu ini dikatakan berusaha menciptakan negara Hindu di India dan melakukan penindasan terhadap warga Muslim di India.

Meskipun Ushama telah menjelaskan dampak Islamofobia yang akhirnya menimbulkan diskriminasi dan penindasan terhadap umat Islam di India, namun ia belum menjelaskan secara spesifik dampaknya terhadap keamanan di tingkat nasional. Namun demikian, Ushama telah memberi gambaran secara jelas hubungan antara pemeluk agama mayoritas dan minoritas dalam sistem masyarakat dan pemerintahan di India. Ia menjelaskan bahwa Islamofobia meningkat, selain karena adanya faktor historis, juga karena adanya gerakan radikalisme dari kelompok mayoritas Hindu dan keinginan untuk mendirikan negara berbasis agama mayoritas penduduk di India.

Menariknya, Islamofobia juga terjadi di Korea Selatan. Koo (2018) menjelaskan bahwa Islamofobia di Korea Selatan baru menguat setelah munculnya dan menjamurnya serangan terorisme yang berafiliasi atau berasal dari gerakan IS atau *Islamic States*. Lalu, Islamofobia di Korea Selatan diperburuk dengan adanya kesalahpahaman yang terlanjur tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Korea Selatan tentang Islam, akibat masyarakat Korea Selatan yang abai untuk mencari tahu tentang bagaimana Islam dan Muslim yang sebenarnya. Bauman dalam Koo (2018) juga menjelaskan Islam menjadi agen ketakutan atau ancaman yang cair sehingga fenomena semacam Islamofobia sulit terhindari. Tidak hanya itu, diskursus Islamofobia di Korea Selatan, menurut Han (2017) juga tumbuh akibat prasangka yang muncul di lapisan akar rumput masyarakat Korea Selatan akibat serangan terorisme seperti serangan 9/11 dan penculikan warga negara Korea Selatan di Afghanistan pada 2007.

Berangkat dari sejumlah pemikiran dan publikasi tersebut di atas maka tulisan ini disusun untuk melengkapi gambaran dan penjelasan tentang meningkatnya fenomena Islamofobia di berbagai negara saat ini. Untuk memahami lebih jelas gambaran tentang Islamofobia yang terjadi di negara-negara di Indo-Pasifik, pada bab selanjutnya akan dijelaskan tentang Islamofobia yang terjadi di India, Myanmar, Thailand, Korea Selatan dan Indonesia. Bagian ini akan memberikan gambaran tentang latar belakang yang mendorong munculnya Islamofobia, faktor-faktor penyebab serta bentuk Islamofobia yang terjadi.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB II

ISLAMOFOBIA DI INDO-PASIFIK

1. Islamofobia di India

Islamofobia atau sentimen anti Islam di India sesungguhnya sudah terjadi sejak lama. Bahkan telah terjadi jauh sebelum India berdiri menjadi sebuah negara berdaulat yang diakui secara internasional. Benih-benih kebencian terhadap umat Islam sudah ada bahkan sebelum kolonialisme Inggris masuk ke wilayah Asia Selatan. Kebencian itu telah muncul ketika Kekaisaran Mughal yang berbasis agama Islam berkuasa di Asia Selatan dan bertindak sangat keras terhadap masyarakat Hindu serta menimbulkan perbedaan dalam masyarakat.

Pemisahan antara negara India dan Pakistan berdasarkan agama pada tahun 1947 adalah salah satu bukti ketegangan antara umat Hindu dan umat Islam yang berkepanjangan di wilayah ini dan juga dilatarbelakangi adanya Islamofobia. Akibatnya, umat Islam yang ada India pada saat itu lebih memilih berpisah dari India dan mendirikan negara Pakistan dengan berdasarkan agama Islam. Bagian di bawah ini akan memberikan penjelasan yang lebih detail tentang Islamofobia yang terjadi di India. Diawali dengan latar belakang terjadinya Islamofobia hingga penjelasan tentang faktor penyebab dan bentuk-bentuk Islamofobia yang terjadi di India.

1.1. Latar Belakang

Berbeda dengan Islamofobia yang terjadi di negara-negara Barat yang baru muncul belakangan setelah peristiwa 9/11, Islamofobia di India telah muncul pada masa kekaisaran Mughal yang berkuasa sejak abad ke-16 hingga abad ke-18 di India. Kekaisaran Mughal yang beragama Islam pada saat itu kerap melakukan penindasan terhadap masyarakat Hindu. Ketika Inggris berhasil merebut kekuasaan dari kekaisaran Mughal pada abad ke-18, Inggris melihat umat Islam sebagai ancaman dan musuh. Sebaliknya, Inggris lebih bersikap akomodatif terhadap umat Hindu yang cenderung bisa menerima kehadiran Inggris. (Sikander, 2021)

Selama masa pendudukannya, Inggris menerapkan kebijakan pemisahan di level masyarakat antara umat Hindu dan Islam. Kebijakan pemisahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial inilah yang kemudian mengakibatkan permusuhan antara umat Hindu dengan umat Muslim di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketegangan yang berkepanjangan antara kedua kelompok masyarakat berbeda agama tersebut memicu pemisahan antara negara India dengan Pakistan ketika Inggris pada akhirnya memberikan kemerdekaan pada tahun 1947. (Sikander, 2021)

Ketegangan umat Hindu dan Islam beserta dengan perbedaan cara hidup di antara keduanya menimbulkan stigma bahwa Muslim adalah ‘sesuatu yang lain’ dan berbeda bagi masyarakat Hindu di India. Pembentukan stigma ini kemudian dikaitkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok umat Hindu terhadap umat Islam yang normal terjadi di dalam masyarakat, bahkan marak dilakukan di India. Yang lebih

mengkhawatirkan, kelompok Hindu ekstrimis membentuk narasi dalam masyarakat bahwa warga Muslim adalah kelompok ‘yang lain’ dan bukan merupakan bagian dari India. Pernyataan-pernyataan seperti ini akhirnya menjadi justifikasi aksi kekerasan mereka terhadap umat Islam. (Siyeach dan Narain, 2018)

Dalam perbedaan cara hidup antara umat Hindu dan Islam di India, hewan sapi dapat menjadi sumber ketegangan di antara mereka. Bahkan sapi dapat menjadi alasan sah bagi umat Hindu untuk melakukan aksi kekerasan terhadap warga Muslim di India. Tuduhan yang sering kali dilontarkan umat Hindu terhadap kelompok Muslim adalah bahwa umat Islam membunuh sapi yang dianggap sakral bagi umat Hindu. Padahal sapi adalah salah satu binatang yang sering digunakan sebagai hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha oleh umat Islam hampir di semua negara. Tuduhan ini seringkali menjadi pembenaran atas tindakan kekerasan, bahkan pembunuhan, terhadap warga India yang beragama Islam. Hukuman mati oleh massa, seperti yang terjadi pada Mohammed Akhlaq Saifi di Rajashtan, seringkali ditengarai karena adanya tuduhan pemotongan sapi atau penyimpanan daging sapi. (Siyeach dan Narain, 2018)

1.2. *Faktor Penyebab Islamofobia di India*

Sejak awal, umat Islam dianggap berbeda oleh masyarakat Hindu yang ada di India, terutama dalam hal sikap dan perilaku. Dengan adanya cara pandang dan narasi tentang umat Islam yang berbeda dari umat Hindu di tengah masyarakat, Islamofobia di India menjadi tertanam sedemikian kuat. Bahkan Islamofobia berkembang menjadi sentimen anti-Islam yang terus menyebar belakangan ini melalui media sosial dan media

cetak. Sentimen anti Islam ini semakin menguat terutama setelah adanya serangan kelompok teroris Al Qaeda di Amerika Serikat pada 11 September 2001.

Kondisi tersebut makin diperparah dengan adanya kelompok Hindu fanatik yang muncul belakangan ini dan terus menyebarluaskan kebencian terhadap umat Islam. Fanatisme umat Hindu inilah yang menimbulkan diskriminasi terhadap umat Islam dan berujung pada persekusi dan aksi intoleransi terhadap kelompok minoritas Muslim di sejumlah wilayah di India. Kelompok masyarakat Hindu yang fanatik ini bahkan dikatakan sedang berusaha menciptakan negara berlandaskan agama Hindu. Akibatnya, penindasan terhadap warga Muslim di India semakin sering terjadi. (Ushama, 2020; Damayanti, 2018)

Kebencian dan aksi intoleransi terhadap Muslim ini meningkat terutama setelah kemenangan Partai Bharatiya Janata (Bharatiya Janata Party/BJP) pada pemilihan parlemen pada awal tahun 2019. Demi memenangkan pemilihan, BJP melegalkan implementasi ideologi berbasis agama Hindu yang dikenal dengan Hindutva (Ibrahim, 2020). Ideologi ini disebarluaskan oleh kelompok militan seperti Hindu Mahasabha, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), dan Vishva Hindu Parishad (VHP). Ideologi Hindutva ini pada dasarnya ingin mendirikan negara Hindu dan pada tahun 2002 menjadi penyebab utama terjadinya genosida Muslim di Gujarat (HT Correspondent, 2007). Selama kampanye tahun 2019, Arjun Sampath dari Tamil Nadu, seorang fasis Hindu dan pendukung BJP, meminta umat Hindu untuk memboikot bisnis warga Muslim, mengisolasi mereka dan mencap mereka sebagai 'pro-Pakistan'. (Ushama, 2020)

Narasi Islamofobia dan sentimen anti-Islam dibangun dalam ideologi Hindutva yang sangat didukung oleh kelompok fanatik Hindu. Perdana Menteri Narendra Modi yang berasal dari Partai Bharatiya Janata (BJP) mengemukakan ideologi Hindutva tersebut beberapa kali di dalam pidato, wawancara, dan *podcast* yang ia sampaikan. Ideologi Hindutva secara garis besar mendukung pemikiran bahwa masyarakat India yang beragama Hindu adalah superior. Sedangkan Muslim tidak layak untuk menjadi bagian dari India karena mereka merupakan kelompok ‘yang lain.’ Gagasan ini mendapat banyak dukungan terutama dari warga India yang ingin menjadikan India sebagai negara berbasiskan ajaran agama Hindu. (Waikar, 2018)

Alasan lain mengapa sebagian warga Hindu di India ingin mendirikan negara Hindu adalah karena berdasarkan data yang dikumpulkan oleh *Central Intelligence Agency* (CIA) pada tahun 2018, 80% masyarakat India beragama Hindu. Umat Islam adalah kelompok minoritas terbesar di India dengan jumlah sebanyak 15% dari populasi India. Pertambahan jumlah warga Muslim melalui angka kelahiran yang tinggi dan migrasi dari Pakistan dan Afganitan yang cukup besar memicu kekhawatiran umat Hindu di India. Bahkan kondisi ini mendorong kelompok ekstrimis Hindu mengeluarkan tuduhan bahwa umat Islam berusaha menambah jumlah populasi beragama Islam dengan cara menikahi wanita Hindu. (Dey, 2017)

Pengamat politik di India melihat keinginan untuk menjadikan India sebagai negara berbasiskan ideologi Hindu semakin mencolok ketika PM Narendra Modi yang menjabat sejak tahun 2014 seringkali mengeluarkan pernyataan yang mengutamakan ajaran dan ideologi agama Hindu. Ia misalnya

mengemukakan kebijakan perekonomian yang erat dengan cara-cara hidup umat Hindu, seperti etos kerja yang didasarkan pada ajaran Lord Basavershar sekitar 800 tahun lalu. Ia juga menyampaikan tentang pentingnya etos kerja umat Hindu demi mewujudkan “satu India.” Di balik pernyataan-pernyataan Modi ini, tersirat upaya untuk membuat India mengutamakan cara hidup sesuai agama Hindu dan mengesampingkan nilai-nilai kehidupan dari agama yang lainnya. Cara ini juga dianggap sebagai upaya agar kekerasan atas nama Islamofobia yang terjadi di masyarakat dapat bebas dari tekanan untuk dihapuskan. (Waikar, 2018)

Pemicu lain ketegangan antara umat Hindu dan Islam di India adalah pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan (*Citizenship Amendment Act/CAA*) oleh parlemen India. Undang-undang ini dibuat pada tahun 2019 di bawah kepemimpinan Narendra Modi dan mulai diberlakukan pada awal tahun 2020. Undang-undang ini dipercayai oleh kelompok umat Islam sebagai hasil konspirasi politik dari kelompok pendukung ideologi Hindutva, yang menggunakan landasan hukum untuk meraih kepentingannya.

Di bawah CAA, *National Registered of Citizens* (NRC) diterapkan dengan mewajibkan setiap orang untuk memberikan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa mereka adalah warga negara India. Mereka yang tidak bisa membuktikan keberadaan dokumen-dokumen tersebut akan dimasukkan ke dalam kategori imigran ilegal. Masalahnya, banyak warga Muslim di India yang miskin dan buta aksara dan mereka sama sekali tidak memiliki dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan kewarganegaraan mereka. (Ahmed, 2020)

Di samping itu, India memberikan jaminan kewarganegaraan melalui *Citizenship Amendment Bill (CAB)*, yang memberikan jalur khusus kewarganegaraan bagi yang belum terdaftar sebagai warga negara bagi kelompok pemeluk agama minoritas, kecuali bagi warga Muslim. Kebijakan ini dinilai sebagai cara legal untuk mengurangi populasi Muslim di India. India juga sudah tidak lagi memberikan suaka bagi warga Muslim yang datang dari Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh sejak 2015. Gelombang protes yang muncul terhadap CAA dan CAB ini tidak mampu menimbulkan simpati atau korelasi apapun terhadap partai lain yang tidak berafiliasi dengan BJP. Akibatnya, meskipun penolakan dalam bentuk demonstrasi terjadi, tidak ada partai politik yang mengusung perubahan kebijakan di level pemerintahan. (Ahmed, 2020)

1.3. Bentuk Islamofobia di India

Diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh umat Islam di India telah terjadi sejak zaman kolonialisme Inggris di Asia Selatan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tindakan kekerasan terhadap umat Muslim mengalami peningkatan di India, hingga Mahkamah Agung India menyebutkan jika hal ini dibiarkan maka kondisi ini dapat menjadi situasi normal yang baru bagi umat Islam. (CFR, 2020) Penyerangan seringkali dilakukan oleh sekelompok umat Hindu terhadap Muslim yang diyakini membunuh atau memperjual-belikan daging sapi. Setidaknya sebanyak 40 orang meninggal dunia akibat perbuatan kelompok yang menamai dirinya ‘pelindung sapi’ sepanjang tahun 2015-2018. (HRW, 2019)

Pria Muslim di India juga menjadi target kelompok radikal karena mereka diyakini melakukan ‘jihad cinta’, yaitu menikahi wanita Hindu untuk mengubah keyakinan mereka.

(Dey, 2017) Pada beberapa wilayah, kondisi kebencian terhadap umat Islam ini berubah menjadi tindak kekerasan masal dan bahkan genosida, seperti yang terjadi pada tahun 2002 di Gujarat, di mana 790 warga Muslim dan 254 warga Hindu meninggal dunia, dan lebih kurang 2500 orang mengalami luka-luka serta 223 orang lainnya dilaporkan hilang. (BBC News, 2012; Damayanti, 2018)

Kekerasan masal terhadap umat Islam juga terjadi dalam konflik Masjid Babri di Ayodhya, Uttar Pradesh dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Masjid ini diyakini dibangun kisaran tahun 1528 oleh Kerajaan Mughal. Namun masyarakat Hindu meyakini bahwa lokasi masjid adalah tempat lahirnya Dewa Ram, sehingga masjid tersebut dihancurkan pada tahun 1992 atas dukungan Partai Bharatiya Janata (BJP) dan kelompok Visha Hindu Parishad (VHP). Peristiwa ini pun memicu perselisihan dalam skala besar di India dan diperkirakan 2.000 orang meninggal dunia. (BBC News, 2012) Kelompok Hindutva ini menginginkan agar kuil dibangun di bekas lokasi Masjid Babri hingga akhirnya pada tahun 2002 partai VHP memastikan pembangunan yang rencananya dimulai pada 15 Maret 2002.

Sebelum pembangunan dimulai, pada bulan Februari 2002 terjadi peristiwa kebakaran kereta di Gujarat dan sebanyak 58 orang aktivis Hindu di dalam kereta meninggal dunia. Umat Muslim pun diyakini sebagai dalang dari kejadian tersebut. Sebagai bentuk balas dendam, terjadi aksi kekerasan terhadap umat Muslim, seperti pembunuhan, pemerkosaan wanita Muslim, penghancuran lokasi bisnis dan tempat peribadatan umat Muslim di Gujarat dengan total jumlah korban meninggal antara 1.000 hingga 2.000 orang (BBC News, 2012). Proses hukum dilakukan untuk menentukan apakah lokasi di Ayodhya

merupakan kuil Dewa Ram, namun kedua belah pihak tetap tidak menerima keputusan dan aksi saling serang terus berlanjut.

Konflik karena agama juga terjadi pada tahun 2013 di kota-kota dekat Muzaffarnagar. Lebih dari enam puluh orang tewas dalam bentrokan yang pecah antara umat Hindu dan Muslim setelah dua pria Hindu tewas dalam pertengkaran dengan pria Muslim. Diperkirakan sebanyak lima puluh ribu orang, kebanyakan dari mereka beragama Islam, melarikan diri dari kekerasan tersebut. Banyak dari mereka akhirnya tinggal di kamp bantuan selama berbulan-bulan, dan beberapa tidak pernah kembali ke rumah (CFR, 2020).

Saat pemerintah India mengumumkan pemberlakuan CAA pada tahun 2020, sejumlah protes terjadi di India. Berbagai protes yang terjadi tersebut dengan mudah berubah menjadi aksi kekerasan yang kemudian menyebabkan sekitar lima puluh orang, kebanyakan warga Muslim, meninggal dunia. Beberapa politikus BJP diyakini menjadi dalang dari kerusuhan tersebut dan polisi diyakini tidak banyak bertindak saat konflik terjadi (CFR, 2020; Sharma, 2020).

Sentimen Islamofobia di India telah menunjukkan ancaman nyata terhadap warga Muslim di sana. Sebagaimana dinyatakan oleh Atiyah, seorang perempuan Muslim yang tinggal di daerah Mahalat, Mumbai India. Ia mengatakan bahwa,

“I would say a little injustice faced by (Moslem) people over here.... I talked about my experience, like the other day we went to look for a house, and I took my mom along with me, and it was like Hindu and Non-Moslem dominate the area. All people like just, they not seem look us very

well, and you know, how it's been not going well over there. Then we decided to look for another city that more accessible and people are more welcoming. Something that we have taken from the region, like don't ever talk to someone, especially if you are a Moslem.” (Atiyah, FGD, 2021)

“Menurut saya, ada sedikit ketidakadilan yang dihadapi oleh orang-orang (Islam) di sini.... Saya ceritakan pengalaman saya, seperti yang terjadi beberapa hari lalu ketika kami pergi mencari sebuah rumah, dan saya mengajak ibu saya. Daerah itu sepertinya didominasi oleh umat Hindu dan Non-Muslim. Semua orang di sana sepertinya tidak menerima kami dengan baik, dan akhirnya memang berjalan tidak baik di sana. Kemudian kami memutuskan untuk mencari di kota lain yang lebih mudah diakses dan orang-orangnya lebih ramah. Namun kami belajar sesuatu dari sini, seperti jangan berbicara kepada seseorang terutama jika kamu adalah seorang Muslim. (Atiyah, FGD, 2021)

Umat Islam seringkali menjadi target aksi kelompok radikal Hindu bahkan hingga menyebabkan mereka terusir dari tempat tinggalnya atau berujung pada kematian. Sayangnya, kasus-kasus seperti ini tidak mendapat tanggapan serius dari pihak berwajib dan sering kali tidak ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Adanya kelompok elit politik yang mendukung bahkan menganut ideologi Hindutva mengkonfirmasi bahwa tindak kekerasan dan intoleransi terhadap kelompok Muslim terjadi mulai dari level masyarakat umum yang dilatabelakangi ideologi agama Hindu hingga ke level pemerintahan. Kondisi tersebut dibuktikan dengan

dikeluarkannya undang-undang yang memberikan kemudahan dan fasilitas terutama bagi warga India yang beragama Hindu namun tidak bagi warga minoritas beragama Islam.

2. Islamofobia di Myanmar

Persekusi yang dilakukan oleh umat Buddha di Myanmar terhadap warga Rohingya yang beragama Islam serta umat Islam lainnya di negara ini dapat dikatakan sangat buruk dan telah berlangsung lama secara terus menerus. Aksi intoleransi berbasis rasisme dan sentimen anti-Islam yang dilakukan terhadap warga Muslim telah terjadi sejak Myanmar masih berbentuk kerajaan. Kondisi tersebut terus berlanjut pada era pemerintahan junta militer hingga tercapai demokratisasi di Myanmar. Dari keadaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pergantian sistem politik dan pemerintahan di Myanmar menjadi lebih demokratis ternyata tidak serta merta menjamin hak dan kebebasan warga Rohingya yang beragama Islam.

Sejak kerusuhan Mandalay pada tahun 1997 hingga memasuki era demokrasi, bentuk persekusi yang dilakukan terhadap umat Islam selalu sama. Sejumlah aksi kekerasan tersebut berupa pembunuhan massal umat Muslim yang sedang berdoa, menghancurkan Masjid, membakar Al-Qur'an, merusak pemukiman dan properti orang Muslim, memaksa orang Muslim untuk berdoa di rumah saja, ujaran kebencian berdasarkan rasis dan anti-Islam, hingga vandalisme di Masjid. Untuk memahami Islamofobia yang terjadi di Myanmar, bagian di bawah ini akan menjelaskan secara detail latar belakang serta penyebab terjadinya dan bentuk-bentuk Islamophobia yang dialami warga Rohingya di Myanmar.

2.1. Latar Belakang

Fenomena Islamofobia yang terjadi di Myanmar menjadi menarik karena ketika sistem pemerintahan di negara ini telah berubah dari militeristik menjadi demokratis, kekerasan terhadap umat Islam di negara ini tidak juga hilang. Coclanis (2013) menyimpulkan bahwa tidak peduli seberapa pun demokratisnya atau tidak demokratisnya sistem pemerintahan Myanmar, kebencian terhadap Islam selalu dan tetap ada. Menurutnya, faktor utama di balik aksi kekerasan terhadap umat Islam yang ada di Myanmar, meski pemerintahannya telah berubah menjadi sistem demokratis, adalah karena Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar) atau Junta Militer masih memiliki peran dan pengaruh yang kuat dalam pemerintahan.

Di samping itu, sejak berdirinya negara Myanmar - sebelumnya bernama Birma - agama Buddha yang merupakan agama mayoritas penduduk Myanmar, memiliki pengaruh yang kuat di dalam patron sosial-budaya, sekaligus juga sebagai patron politik di negara ini. Bahkan ajaran dan agama Buddha adalah patron utama yang tertanam sangat kuat dalam masyarakat Birma. Patron agama Buddha ini telah mewarnai kehidupan masyarakat Myanmar bahkan sebelum Inggris masuk menguasai Myanmar pada awal abad ke-19.

Dapat dikatakan juga bahwa para pemimpin agama Buddha berhasil membentuk semangat nasionalisme Myanmar dengan basis ajaran agama Buddha. Hal ini bisa menjadi sesuatu yang positif sekaligus juga negatif. Secara positif, semangat nasionalisme ini akan sangat mendukung proses kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Myanmar. Namun sebaliknya, semangat nasionalisme Buddha ini juga bisa mendorong munculnya aksi kontroversial dan rasis seperti

anggapan bahwa mereka yang non-Buddha bukanlah orang Myanmar. (Coclanis, 2013)

Semangat nasionalisme Buddha tersebut masih terus berlanjut hingga saat ini dan tampaknya pemerintah menutup mata tentang dampak negatif yang terjadi. Masih kuatnya pengaruh Tatmadaw dan patron agama Buddha dalam sistem masyarakat dan politik di Myanmar, menyebabkan demokrasi tidak dapat menyelamatkan orang Rohingya atau umat Islam lainnya dari aksi intoleransi yang mereka alami. (Coclanis, 2013) Dengan kata lain, Islamofobia masih terus terjadi di Myanmar bahkan kondisinya semakin mengkhawatirkan.

Sejumlah literatur menunjukkan bahwa Islamofobia yang mendorong terjadinya persekusi terhadap umat Islam di Myanmar sesungguhnya telah terjadi sejak negara ini masih berbentuk kerajaan, yang sejak awal memang didominasi oleh agama Buddha. (Wildan, 2021) Walaupun sempat terdapat pemimpin kerajaan Burma yang beragama Buddha yang mampu menjalin hubungan baik dengan komunitas minoritas lainnya, tetapi sejarah juga mencatat sejumlah kekerasan yang dilakukan umat Buddha terhadap warga minoritas terutama para pendatang dari luar Birma yang beragama lain. Itu sebabnya ketika membahas tentang Islamofobia dan aksi kekerasan terhadap komunitas Rohingya yang beragama Islam di Myanmar, kita tidak bisa melepaskan dari faktor sejarah dan sosial-budaya di negara ini.

2.2. Faktor Penyebab Islamofobia di Myanmar

Salah satu faktor pemicu kebencian umat Buddha terhadap kelompok minoritas terutama umat Islam adalah karena ketika menguasai Birma, Inggris lebih mempercayai orang India dan Bengali untuk memerintah di Myanmar.

(Wildan, 2021) Mayoritas imigran yang dilindungi Inggris yang berasal dari India dan Bengali membawa agama Hindu dan Islam masuk ke Birma. Kekuasaan orang India dan Bengali pada masa pemerintahan Inggris mendorong terciptanya nasionalisme Burma yang dilandasi agama Buddha yang kuat.

Keistimewaan yang diberikan pemerintah kolonial Inggris kepada warga pendatang yang bukan beragama Buddha ini sekaligus juga memicu ketegangan sosial antara orang Myanmar asli dengan warga non-Myanmar. Ketika komunitas India-Bengali diberi hak istimewa, penduduk asli Myanmar yang beragama Buddha melihatnya sebagai ancaman terhadap eksistensi identitas dan budaya masyarakat asli Myanmar. Akibatnya, walaupun ajaran Buddha menentang kekerasan dan aksi intoleransi, tetapi kepemimpinan orang India-Bengali yang diciptakan oleh Inggris meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat asli Myanmar.

Kekuasaan yang berpindah secara paksa dari para pemimpin Birma yang kental dengan ajaran Buddha kepada para pendatang yang bukan warga Burma dan tidak memahami ajaran Buddha pada akhirnya memicu kebencian. Kebencian ini kemudian berujung pada tindakan kekerasan dan persekusi kepada warga non-Myanmar. Itu sebabnya, pasca Myanmar merdeka dari Inggris pada tahun 1948, warga Muslim Rohingya yang menetap di perbatasan Myanmar-Bangladesh-India, tidak mendapatkan hak mereka sebagai warga negara. Akibatnya, mereka semakin sering mengalami aksi kekerasan yang dilakukan oleh warga Myanmar asli di sekitarnya. (Anwary, 2018)

Kondisi tersebut di atas dilatarbelakangi juga pada fakta bahwa ketika Perang Dunia II berlangsung, sejumlah warga Rohingya yang beragama Islam mendukung pemerintah Inggris untuk memegang kekuasaan di wilayah ini, sementara warga Birma yang beragama Buddha mendukung pemerintahan Jepang. Akibatnya, ketika akhirnya negara ini menjadi negara merdeka, masyarakat kelompok Birma yang merupakan kelompok mayoritas penduduk di Myanmar menolak warga Rohingya yang beragama Islam untuk tinggal dan menjadi warga negara Myanmar. (Damayanti, 2018)

2.3. Bentuk Islamofobia di Myanmar

Kebencian terhadap warga Rohingya telah dimulai sejak kehadiran bangsa Bengali di Myanmar yang mendapat keistimewaan dari pemerintah Kolonial, hingga saat ini. Bahkan kebencian tersebut memuncak setelah ada seorang rahib Buddha bernama Ashin Wirathu yang ikut menyebarkan kebencian terhadap umat Islam. Salah satu propaganda yang dilancarkan oleh Wirathu adalah dengan mengatakan bahwa umat Islam hendak mendirikan negara Islam di Rakhine. Wirathu yang merupakan pemimpin kelompok nasionalis Myanmar dikenal juga sebagai “Burmese Bin Laden.” Ia menjadi populer ketika pada tahun 2001 ia bergabung dan menjadi pemimpin kelompok nasionalis yang anti Muslim dan bahkan kerap dikategorikan sebagai ekstrimis. Kelompoknya dinamakan kelompok 969 dan sangat menentang pertambahan jumlah umat Islam di Myanmar. (Damayanti, 2018)

Kekerasan terhadap umat Islam semakin menjadi ketika pada tahun 2012, ada seorang perempuan beragama Buddha diperkosa di daerah Rakhine. Dipicu oleh kemarahan yang memang telah lama tertanam dalam warga Myanmar, Wirathu

kemudian memimpin sejumlah besar rahib dari kelompok 969 dan warga Arakan-Buddha untuk melakukan penyerangan balasan terhadap warga Rohingya dan Kaman-Muslim di wilayah Arakan, Rakhine utara. Akibatnya, puluhan warga Rohingya meninggal dan lebih dari 125.000 umat Islam diusir dari tempat tinggal mereka. Kelompok Wirathu ini juga bahkan melakukan boikot terhadap toko-toko warga Muslim dan melarang umat Buddha melakukan bisnis dengan umat Islam. Dalam sebuah rekaman yang disebarluaskan melalui youtube, Wirathu mengharuskan warga Buddha di Myanmar untuk membeli barang-barang hanya di toko yang bertandakan “969.” (Damayanti, 2018)

Dalam laporannya di tahun 2013, Human Rights Watch (HRW) menyebutkan bahwa serangan yang dilakukan oleh kelompok radikal Buddha di Myanmar terhadap umat Islam dan tempat tinggal mereka di Arakan merupakan tindakan yang terorganisir yang dilakukan bukan saja oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Myanmar, tetapi juga oleh pemerintah. Aksi persekusi yang dilakukan oleh kelompok radikal Buddha didukung oleh aparat keamanan setempat dengan tidak memberikan pertolongan dan perlindungan kepada warga Rohingya yang terancam bahkan membiarkan kekerasan itu terjadi dan tampak sangat berpihak terhadap umat Buddha. (Human Rights Watch, 2013)

Pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan Thein Sein saat itu bahkan tidak melakukan tindakan penegakan hukum secara serius terhadap para rahib yang menyerang warga Muslim Rohingya di Arakan, Rakhine. (Human Rights Watch, 2013) Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa dinamika sentimen anti Islam dan anti-Rohingya tidak berhenti di tingkat masyarakat dan berpengaruh terhadap interaksi di antara

kelompok mayoritas yang beragama Buddha dan warga Muslim Rohingya saja. Diskriminasi terhadap umat Islam juga berkembang hingga ke tatanan politik di tingkat nasional. (Barany, 2019)

Faktor sejarah dan sosial-budaya masyarakat Myanmar yang intoleran terhadap umat Islam, berkontribusi dalam membentuk sikap pemerintah Myanmar. Dalam sejarah politik Myanmar, junta militer telah berkuasa lama di Myanmar. Dalam menjalankan kekuasaannya, junta militer Myanmar seringkali mendukung patron sejarah dan sosial-budaya Buddha di Myanmar. Dilatarbelakangi oleh lamanya junta militer berkuasa dan cara mereka untuk mempertahankan persepsi buruk tentang komunitas non-Myanmar membuat mayoritas penduduk asli Myanmar setuju terhadap persepsi buruk tentang Rohingya. Persepsi buruk itulah yang kemudian mendorong mereka melakukan aksi kekerasan. (Barany, 2019)

Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa Islamofobia yang dilanjutkan dengan persekusi dan aksi kekerasan terhadap komunitas Muslim Rohingya telah berkembang. Aksi kekerasan ini berkembang dari yang dilakukan pada level masyarakat menjadi kekerasan yang dilakukan juga pada level negara. Dengan kata lain, negara dan pemerintah junta militer Myanmar turut mendukung dan mengkonfirmasi persepsi sosial-budaya yang melanggar Hak Asasi Manusia komunitas Rohingya. (Abrar, 2013)

Meski Tatmadaw telah mempertahankan patron masyarakat Myanmar yang menentang warga Muslim Rohingya sejak pertama kali mereka berkuasa di Myanmar namun sikap intoleran tersebut kemudian berkembang menjadi sikap politik internal pemerintah Myanmar. (B.I, 2018) Kondisi

internal ini semakin diperparah dengan situasi politik internasional yang ditandai dengan kebangkitan gerakan radikal Islam secara global, terutama setelah serangan terorisme Al Qaeda pada tahun 2001 di New York. (Wildan, 2021) Hal inilah yang semakin mendorong junta militer Myanmar mengambil sikap bermusuhan terhadap komunitas Islam Rohingya.

Demokratisasi yang buruk di Myanmar juga turut berkontribusi terhadap persekusi komunitas Muslim Rohingya. Kevin B.I (2018) menyebutkan bahwa pada dasarnya Tatmadaw atau Angkatan Bersenjata di Myanmarlah yang menjadi penyebab lambannya demokratisasi sekaligus penyelesaian isu Rohingya. Tatmadaw dipandang selalu menciptakan ketegangan sosial dengan mempertahankan persepsi nasionalisme Burma dan basis agama Buddha di Myanmar. Tatmadaw dianggap sengaja melakukan ini karena takut kehilangan eksistensi dalam sistem pemerintahan demokrasi penuh Myanmar yang baru. Dengan memicu konflik dan ketegangan sosial terutama terhadap warga Muslim Rohingya, Tatmadaw tetap dapat menunjukkan eksistensi dan kekuatannya dalam pemerintahan demokrasi Myanmar yang baru di bawah Aung San Suu Kyi. Dengan cara tersebut, masyarakat sipil melihat Tatmadaw sebagai kekuatan yang dapat mewujudkan nasionalisme Myanmar. (B.I, 2018)

Di samping itu, Aung San Suu Kyi sendiri walaupun memiliki legitimasi untuk memimpin rakyat Myanmar namun tidak dapat menentang Tatmadaw. Meski Aung San Suu Kyi dapat bertindak menyelesaikan isu Rohingya, namun jika Suu Kyi melakukan hal tersebut, dukungan politik terhadap Suu Kyi akan menurun dan kondisi ini dapat menutup proses demokrasi di Myanmar. (B.I, 2018) Terlebih, konstitusi Myanmar menyebutkan bahwa Tatmadaw merupakan fraksi politik aktif

dalam pemerintahan Myanmar dan apabila terjadi ketidakseimbangan kekuasaan di Myanmar, konstitusi menyatakan bahwa militer berhak mengambil alih pemerintahan. Dengan demikian, pemerintahan sipil Myanmar sesungguhnya tidak memiliki kendali atas Tatmadaw sebagai konsekuensi dari konstitusi tersebut. (Barany, 2019)

Buruknya demokratisasi dan peran kuat militer untuk terlibat dalam pemerintahan yang demokratis, menyebabkan isu persekusi komunitas Muslim Rohingya belum bisa terselesaikan hingga saat ini. Di samping itu, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Islamofobia di Myanmar disebabkan oleh faktor sejarah, sosial-budaya, politik secara internal dan politik eksternal yang terakumulasi secara sistematis dan berkaitan erat satu sama lain. Walaupun awalnya hanya sebatas faktor historis dan sosial budaya, namun kebencian terhadap warga Muslim berkembang hingga ke tingkat politik.

Pemerintahan Myanmar diyakini terlibat dalam berbagai aksi persekusi terhadap komunitas Rohingya. Pemerintah bahkan terus membangun penciptaan persepsi nasionalisme Myanmar dan ancaman berdasarkan patron agama Buddha. Pemerintahan Junta Militer yang cukup lama berkuasa di Myanmar, meski sejak tahun 2011 Myanmar mulai memasuki masa demokrasi, membuat isu Rohingya tidak kunjung selesai. Malah, pemerintah Junta Militer turut andil dalam lambannya proses demokratisasi di Myanmar di samping pemerintahan sipil Myanmar yang tidak mampu memegang kendali atas kekuatan militer di negaranya sendiri.

3. Islamofobia di Thailand

Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah mengalami kolonialisme Barat. Sehingga, berbeda dengan India dan Myanmar yang mengalami Islamofobia sebagai peninggalan dari kebijakan pemerintah kolonial Inggris yang memberikan keistimewaan pada kelompok agama tertentu, Islamofobia di Thailand terjadi dari dalam masyarakat Thailand itu sendiri. Islamofobia tersebut terjadi karena adanya gerakan etno-nasionalis di wilayah Thailand Selatan yang merupakan daerah perbatasan Thailand dan Malaysia. Wilayah ini lebih banyak ditempati oleh warga Melayu yang berasal dari Malaysia dan beragama Islam.

Mayoritas penduduk Thailand beragama Buddha, dan Islam merupakan agama minoritas terbesar di negara tersebut. Namun empat provinsi perbatasan selatan antara Thailand dan Malaysia, yaitu Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun, merupakan tempat dengan penduduk Muslim terbesar bahkan mencapai 80% penganut agama Islam di Thailand. Sebagai agama penduduk mayoritas, agama Buddha memainkan perang penting di Thailand dan diintegrasikan hingga ke sistem pemerintahan pusat Thailand (The Nation, 2018). Konstitusi terbaru bahkan memperkuat posisi Buddhisme Theravada sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Thailand untuk jangka waktu yang lama.

Pemerintahan Thailand sebenarnya pernah telah menjamin dalam konsitusi Kerajaan Thailand bahwa kebebasan beragama akan dijunjung tinggi, dan kebijakan pemerintahan Thailand untuk umat Islam di Thailand dapat digambarkan sebagai kebijakan yang akomodatif. Setelah Perang Dunia Ke-2, Thailand pernah mengeluarkan tiga peraturan legal yang

berkaitan dengan Islam, yaitu Dekrit Kerajaan tentang pendirian Masjid (1947), Keputusan Kerajaan tentang Perlindungan Agama Islam (1945), dan Dekrit Kerajaan tentang Perlindungan Agama Islam (1947). Namun sayangnya, ketiga peraturan tersebut dihapuskan setelah proklamasi Keputusan Kerajaan tentang Administrasi Organisasi Islam pada tahun 1997 (Hara, 2019).

Untuk memahami lebih detail tentang Islamofobia yang terjadi di Thailand, pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang, faktor penyebab dan bentuk Islamofobia yang terjadi di negara ini. Kondisi ini diawali dari kekecewaan sejumlah umat Islam yang tinggal di wilayah selatan Thailand terhadap kebijakan pemerintah, yang akhirnya berkembang menjadi gerakan ethno-nasionalis atau separatisme. Kekecewaan inilah yang kemudian memicu ketegangan antara umat Buddha dengan umat Islam yang merupakan mayoritas di empat wilayah Thailand Selatan. Ketegangan tersebut akhirnya semakin membesar dan menciptakan diskriminasi dan aksi kekerasan terhadap umat Islam yang tinggal di Thailand Selatan, terutama di wilayah Pattani.

3.1. *Latar Belakang*

Diskriminasi terhadap umat Islam masih terus terjadi hingga saat ini di Thailand, terutama di wilayah Thailand Selatan. Dari total 61 juta penduduk Thailand, ada sekitar 4 juta umat Islam yang setengahnya berasal dari warga Malaysia yang tinggal di provinsi Thailand Selatan yang merupakan wilayah perbatasan dengan Malaysia, tepatnya di provinsi Pattani, Yala, dan Narathiwat. Sentimen anti Islam ini terjadi karena adanya sekelompok warga beragama Buddha yang menghasut dan menyebarkan ketakutan serta kebencian terhadap warga

Muslim Melayu yang tinggal di wilayah selatan Thailand. Bahkan penentang umat Islam ini dengan sengaja menyebarkan fanatisme, diskriminasi dan marginalisasi, yang mengakibatkan pengucilan umat Islam dari kegiatan ekonomi, sosial, politik, serta dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. (Pathan dkk, 2018)

Kekerasan terhadap warga Muslim di Thailand Selatan dilakukan oleh kaum nasionalis Buddha dan dipimpin oleh para rahib di Thailand. Aksi ini sesungguhnya dimotivasi oleh kepentingan agama sekaligus juga tujuan politik (Jerryson, 2017). Daerah konflik di provinsi Pattani, Narathiwat, Yala dan beberapa distrik di provinsi Songkhla, dimana mayoritas penduduk lokal merupakan Muslim Melayu, sering dianggap sebagai salah satu bagian dari Thailand yang paling rentan terhadap pengaruh jihadisme transnasional. Belakangan, kemunculan organisasi terorisme seperti ISIS di beberapa wilayah provinsi tersebut menjadi ancaman bagi masyarakat dan pemerintah Thailand yang mayoritas beragama Buddha. (Hannah, 2019).

3.2. Faktor Penyebab Islamofobia di Thailand

Konflik yang terjadi di wilayah Thailand Selatan sesungguhnya bukan konflik agama murni dan tidak didorong oleh antagonisme agama antara warga Buddhis Thailand dan umat Islam. Yang terjadi di sana sesungguhnya adalah sebuah perjuangan ethnonasionalis yang didasari oleh agama. Lebih dari 90% penduduk Thailand beragama Buddha, namun 85% penduduk di wilayah Pattani, Thailand Selatan berkebangsaan Melayu dan beragama Islam. Selama bertahun-tahun umat Islam Melayu di daerah ini berupaya untuk mendapatkan kemerdekaan dari Thailand melalui ‘Gerakan Pembebasan

Pattani' serta beberapa kali mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat.

Aksi-aksi perlawanan yang dilakukan oleh Gerakan Pembebasan Pattani dilakukan terutama ketika situasi politik di negara ini tengah memanas akibat kudeta. Untuk mengatasi aksi perlawanan umat Islam di daerah perbatasan dengan Malaysia, pemerintah Thailand telah menerapkan Undang-undang Darurat sejak tahun 2004. Undang-undang ini dikeluarkan terutama untuk menghentikan upaya kelompok umat Islam yang tergabung dalam Pattani United Liberation Organization (PULO) dan Barisan Revolusi Nasional (BRN) yang terus memperjuangkan hak otonomi daerah ini. (Damayanti, 2018)

Bersamaan dengan diberlakukannya UU Darurat tersebut, konflik umat Buddha dan Muslim di wilayah Thailand Selatan terus meningkat. Warga Muslim dipenuhi dengan ketakutan akan adanya ancaman dari kelompok Nasionalis Buddha, yang sebagian besar berasal dari para rahib. Bukan hanya ancaman dari para pemimpin agama, pemerintah pusat juga melakukan tindakan *counter-insurgency* dengan keras terhadap umat Islam di wilayah Pattani.

Dalam beberapa konflik yang terjadi, pemerintah Thailand bahkan mengerahkan tentara untuk menjaga tempat-tempat ibadah umat Buddha di wilayah Thailand Selatan. Pemerintah pusat juga memberikan ijin kepada kelompok nasionalis Buddha di wilayah selatan untuk membentuk pasukan tentara yang berasal dari para rahib. Pasukan yang dinamakan *Tahanpra* ini menjalani kehidupan seperti para rahib umumnya, namun dilatih seperti tentara dan menerima gaji dari pemerintah. (Damayanti, 2018)

Pemerintah Thailand melakukan *counter-insurgency* seperti itu karena seringkali mengaitkan masyarakat Islam di wilayah Pattani sebagai kelompok pemberontak yang memicu konflik separatisme selama bertahun-tahun. Meski demikian, Pemerintah Thailand melihat kekerasan yang terjadi di daerah selatan ini sebagai pemberontakan atas dasar ethno-nasionalis, dan bukan diskriminasi berbasis agama. Sebaliknya, masyarakat Thailand secara umum cenderung mengabaikan analisis pemerintah dan beranggapan bahwa segala bentuk kekerasan yang terjadi di daerah ini disebabkan oleh perilaku warga Muslim Melayu.

Dari sini terlihat terdapat gap persepsi antara pemerintah dan masyarakat Thailand pada umumnya. Di satu sisi, persepsi yang muncul di tengah masyarakat mayoritas Thailand disebabkan karena umat Islam di wilayah ini enggan untuk hidup damai dengan warga Thailand yang beragama Buddha. Bahkan, fakta menunjukkan bahwa orang Melayu Pattani menolak untuk memeluk identitas dan narasi sejarah yang dibangun oleh pemerintah dan warga Thailand. Akibatnya, masyarakat Thailand marah dan menuduh ajaran Islamlah yang membuat mereka menolak identitas tersebut.

Di sisi lain, kelompok nasionalis Buddha juga mengabaikan argumen kebijakan asimilasi Pemerintah Thailand terhadap Melayu Pattani, Yala, dan Narathiwat. Umat Buddha yang tinggal di Thailand Selatan menolak adanya atribut-atribut Islam yang diperlihatkan di area publik termasuk di sekolah, seperti penggunaan hijab. Faktor inilah yang berkontribusi terhadap sejumlah kekerasan kepada warga Muslim yang masih terjadi hingga hari ini di Thailand Selatan. (Pathan dkk, 2018)

3.3. Bentuk Islamofobia di Thailand

Islamofobia di Thailand terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan diskriminatif hingga aksi kekerasan. Salah satu contoh kasus kekerasan yang berbasiskan agama Islam terjadi di sekolah Anuban Pattani pada tahun 2018. Saat itu, muncul wacana untuk menggunakan hijab di sekolah umum mengingat mayoritas penduduk di Pattani beretnis Melayu. Hal ini berujung pada perselisihan dan adu mulut antara kelompok Nasionalis-Buddha dengan warga Muslim Pattani etnis Melayu. Dalam kasus ini, 20 guru beragama Buddha melakukan aksi protes terhadap siswinya yang Muslim karena mengenakan hijab. (Pathan dkk, 2018)

Dari peristiwa ini, kebencian warga yang beragama Buddha terhadap Islam dan umat Islam semakin menguat dan menyebar hampir di seluruh wilayah Thailand Selatan. Akibatnya, hampir setiap sekolah di Thailand melarang siswinya mengenakan jilbab. Umat Buddha menyatakan keberatan mereka serta menegaskan bahwa "*Kwam Pen Thai*" atau hanya identitas Thailandlah yang akan diterima oleh masyarakat Buddhis setempat. Bahkan, warga nasionalis Buddha juga menolak identitas lokal Islam dan Melayu lainnya yang ditampilkan di tempat-tempat umum. (Pathan dkk, 2018)

Timbulnya sentimen anti-Islam di Thailand diawali oleh mayoritas masyarakat Thailand yang berusaha untuk menutup sejarah dan fakta akan adanya umat Islam di Thailand Selatan. Mereka membangun historiografi nasional Thailand secara umum dan akibatnya menimbulkan gerakan separatis masyarakat Muslim Thailand Selatan di tiga provinsi; Pattani, Yala, dan Narathiwat. (Abdulmani, 2013) Islamofobia semakin menguat setelah pemerintah daerah Thailand Selatan menolak

otonomi pusat dan berusaha memenuhi aspirasi umat Islam dengan berbagai proyek yang menguntungkan warga Muslim di wilayah ini. Kondisi inilah yang memicu kemarahan umat Buddha setempat karena mereka merasa diperlakukan tidak adil.

Bahkan kelompok nasionalis Buddha di wilayah Thailand Selatan menggambarkan kekuatan Islam di sana sebagai “hantu” yang bergentayangan yang berupaya mengubah kekuatan politik di Thailand. Ini mendorong kelompok *Buddhism Protection Center of Thailand* (BPCT) menggunakan isu Islamofobia untuk mempromosikan kampanye Buddha sebagai satu-satunya agama di negara Thailand. Serupa dengan itu, organisasi *Buddhist Federation of Thailand* (BFT) juga mendukung berbagai kegiatan partai politik berbasis nasionalisme-Buddha dengan tujuan membuktikan bahwa Thailand harus bisa menghentikan segala tindakan umat Islam di tiga provinsi Thailand Selatan (Buaban, 2020).

Belakangan, Islamofobia juga terjadi di dunia maya, terutama melalui media sosial. Menurut Adre (FGD, 2021) Islamofobia di Thailand itu nyata, namun kondisi itu menjadi lebih mengkhawatirkan di dunia maya daripada di dunia nyata. Islamofobia di Thailand lebih banyak terjadi di kalangan orang yang berkunjung atau tinggal di sana dengan latar belakang kewarganegaraan Eropa atau Amerika Serikat. Hal ini tampaknya terjadi akibat pengaruh dari peristiwa terorisme 11 September 2001.

Adre (FGD, 2021) juga mengatakan bahwa Islamofobia di Thailand muncul sebagai akibat konflik yang terjadi di wilayah Pattani, antara umat Buddha dan Islam. Menariknya, menurut Adre, meskipun telah terjadi kekerasan terhadap umat

Islam dan konflik di provinsi Pattani, namun umat Islam di Thailand tidak mau mengungkit-ungkit hal tersebut dan menganggapnya sebagai masa lalu. Adre melihat bahwa pemerintah di Thailand saat ini telah berhasil mengurangi ketegangan dan konflik yang terjadi di Pattani, sehingga warga di Muslim di Thailand dapat hidup dalam situasi yang damai.

4. Islamofobia di Korea Selatan

Islamofobia di Korea Selatan tergolong unik dan berbeda dari Islamofobia di negara-negara Indo-Pasifik lainnya. Xenophobia mengambil peran yang lebih besar sebagai latar belakang dari Islamofobia di Korea Selatan. Artinya, pemicu munculnya Islamofobia di Korea Selatan tidak seperti di India dan Myanmar yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah kolonial yang memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu. Bukan juga karena adanya gerakan ethno-nasionalis yang muncul akibat kekecewaan terhadap pemerintah yang dianggap melakukan diskriminasi dalam kebijakannya.

Islamofobia yang terjadi di Korea Selatan lebih banyak disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat Korea Selatan terhadap umat Islam yang kebanyakan merupakan pendatang dari negara lain untuk bersekolah atau bekerja di Korea Selatan. Nasionalisme masyarakat Korea Selatan yang kental diwarnai oleh pengaruh Kekristenan dan Buddha dalam politik dan kehidupan bermasyarakat sebenarnya tidak terlalu bermasalah bagi umat Islam yang tinggal di negara ini. Namun, ketika media Barat mulai menyebarkan berita tentang aksi terorisme berbasis agama Islam dan memberikan berbagai stigma buruk tentang umat Islam, pada saat itulah sikap diskriminasi terhadap umat Islam mulai terlihat. Itu sebabnya, bagian ini akan

menjelaskan latar belakang, faktor penyebab dan bentuk Islamofobia yang terjadi di Korea Selatan.

4.1. Latar Belakang

Masyarakat Korea Selatan terkenal sebagai masyarakat yang homogen dan memiliki nasionalisme yang tinggi. (Gi, 2021) Homogenitas Korea Selatan juga sangat ekstrim karena hanya sekitar lima persen dari populasi Korea Selatan yang beretnis non-Korea. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah jika dihadapkan dengan globalisasi dan migrasi internasional yang meningkat akibat kemajuan ekonomi Korea Selatan dan menjadikan Korea Selatan sebagai negara tujuan migrasi. Homogenitas ini pula yang menjadi masalah dalam kohesi sosial pada era globalisasi seperti sekarang ini, khususnya terkait identitas etnis Korea yang sangat kuat.

Tidak hanya itu, masyarakat Korea Utara dan Korea Selatan juga percaya bahwa mereka berasal dari satu negara, etnis, dan ras yang sama. Bagi orang Korea, penggabungan bangsa, etnis, dan ras ini menekankan gagasan bahwa mereka berasal dari satu garis keturunan yang sama yaitu Dangun, tokoh yang dianggap sebagai nenek moyang dan pendiri mitos bangsa Korea. (Gi, 2021) Keyakinan ini membuat orang Korea merasa berbeda dengan orang-orang non-Korea. Bagi mereka, nasionalisme etnis Korea adalah sumber kebanggaan dan hal ini menjadi penyebab munculnya prasangka negatif terhadap orang-orang yang berasal dari etnis lain, termasuk masyarakat muslim.

Hal serupa disampaikan oleh narasumber diskusi terbatas tentang Islamofobia di beberapa negara di Indo-Pasifik yang berasal dari Korea Selatan yaitu Lee Jin-Sang dan Souliman Kellouai. Lee Jin-Sang dan Souliman Kellouai (FGD, 2021)

mengungkapkan bahwa masyarakat Korea Selatan cenderung acuh dan tidak peduli karena merasa berjarak dengan dunia Muslim secara historis. Mereka mendapat informasi tentang Islam secara satu arah dan kebanyakan itu berasal dari aliansinya dengan dunia Barat, terutama Amerika Serikat. Souliman (2021) menjelaskan bahwa dirinya mengalami kesulitan beradaptasi dengan warga Korea pada awalnya karena fisik dan namanya yang seperti orang Timur Tengah, padahal ia adalah warga negara Prancis. Setelah masyarakat di sekitarnya mengetahui status kewarganegaraannya, banyak orang yang menjadi lebih bisa menerima dan bersikap ramah terhadapnya.

Masyarakat Korea Selatan yang homogen cenderung menganggap Islam adalah agama asing yang dipraktekkan hanya oleh orang asing. Agama Islam dianggap asing di Korea karena tidak banyak warga Korea Selatan yang memahami ajaran serta praktek agama Islam. (Sheikh, 2019) Persepsi ini kemudian mendorong warga Korea untuk mengurangi praktek-praktek ajaran Islam di Korea. Akibatnya, terjadi paradoks antara cara pandang masyarakat Korea Selatan yang berusaha untuk mendapatkan perhatian masyarakat Muslim di negara-negara lain, namun pada saat yang sama gagal untuk memelihara “Islam Korea,” dimana umat Islam sebagai komunitas minoritas di Korea Selatan harus berjuang untuk mempertahankan praktek ajaran agama mereka di dalam kehidupan bermasyarakat.

4.2. Faktor Penyebab Islamofobia di Korea Selatan

Islam merupakan agama minoritas di Korea Selatan, dengan perkiraan sekitar 200.000 penduduk Korea Selatan yang beragama Islam, terdiri dari warga negara asing maupun masyarakat lokal. Namun demikian, pada awalnya umat Islam

di Korea Selatan tidak merasakan adanya ancaman yang dihadapi secara langsung ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat mayoritas. Salah satu warga Itaewon, Kamal Singh, mengatakan bahwa komunitas Muslim tidak merasa adanya masalah dengan warga mayoritas di Korea selatan karena tujuan komunitas Muslim di Korea Selatan adalah menyebarkan perdamaian dan orang Korea dapat menerima hal tersebut dengan baik. (Khalid dkk, 2017)

Umumnya, orang-orang Korea yang atheis dan ingin menganut suatu agama tertentu diawali dengan adanya rasa ingin tau dan berusaha untuk mencari tahu. Itu sebabnya, pendidikan menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat Korea Selatan tertarik untuk mengetahui dan mempelajari agama Islam. Hal ini dilakukan oleh Prince Sultan Islamic School Seoul yang bekerjasama dengan Korea Muslim Federation untuk mengajarkan tentang Pendidikan Agama Islam bagi warga Korea Selatan. Sayangnya, bahasa yang digunakan dalam pembelajaran di Prince Sultan Islamic School adalah bahasa Inggris. Penggunaan Bahasa Inggris di sekolah-sekolah berbasis agama Islam menjadi salah satu hambatan untuk berkomunikasi dengan masyarakat Korea Selatan karena terbatasnya kemampuan masyarakat Korea Selatan berbahasa asing selain bahasa Korea. (Khalid dkk, 2017)

Salah satu tantangan terbesar bagi umat Islam di Korea adalah makanan dan kebiasaan masyarakat pekerja di Korea Selatan. Ketika pulang bekerja, warga Korea Selatan kerap kali berpesta dengan teman atau rekan kerja hingga larut malam, dan mereka terbiasa minum minuman keras serta makan makanan yang haram bagi Islam. Padahal itu semua tidak bisa dilakukan oleh Muslim Korea karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Meskipun otoritas setempat berinvestasi besar-besaran

kepada pasar halal, mayoritas produk Korea yang bersertifikat halal hanya tersedia untuk ekspor, sehingga produk halal populer yang cocok untuk Muslim tidak dapat diakses oleh Muslim Korea secara umum yang tinggal di Korea. (Sheikh, 2019: 196-211)

Terkait investasi pemerintah pada makanan halal, perekonomian di Korea Selatan saat ini memperoleh keuntungan besar dari pasar halal global dan dalam pariwisata Korea yang juga memperluas pelayanannya untuk kebutuhan turis Muslim. Berkembangnya perekonomian pasar halal di Korea selatan tidak terlepas dari kerjasama pemerintah Korea Selatan dengan negara-negara di Timur Tengah. Namun kerjasama itu malah menimbulkan kekhawatiran bagi komunitas Kristen Protestan karena dianggap membuka pintu bagi umat Islam Timur Tengah masuk ke Korea Selatan dan memicu terjadinya serangan teroris. Mereka menggunakan istilah "*Islamic tsunami is rushing*" atau "*Islam is waiting for a chance*" untuk menggambarkan situasi tersebut. Itu sebabnya, Sheikh (2019, 196-211) mengatakan bahwa beberapa umat Islam lokal merasa diri mereka 'dibuang ke pinggir' hingga merasa dikucilkan dari budaya mereka sendiri.

Islamofobia menjadi semakin meningkat di dalam kehidupan bermasyarakat di Korea Selatan ketika media massa mulai mendiskreditkan komunitas Islam pasca dibentuknya ISIS tahun 2013. Akibatnya, hubungan yang kontroversial antara warga Korea Selatan dengan umat Islam meningkat. Media populer mulai memberi tekanan kepada wanita Muslim, terutama terkait dengan cara berpakaian mereka yang mengenakan hijab sehingga dianggap 'butuh untuk diselamatkan.' Media juga kerap mengaitkan pria Muslim dengan terorisme, kekerasan dan penyimpangan seksual.

Media-media itu menggambarkan umat Muslim secara keseluruhan identik dengan orang Arab dan budaya kekerasan. (Koo, 2018) Media Korea juga, menurut Sheikh (2020, 129-142), mengidentifikasikan dunia Islam sebagai sebuah tanah yang dikuasai oleh Islam dan menyamakan Muslim dengan sekelompok agama fanatik yang menyebarkan banyak teror.

Media Barat turut membangun persepsi orang Korea bahwa modernisasi bukan hanya mengejar ketertinggalan dari negara Barat, tetapi juga mengikuti cara-cara dan gaya hidup negara Barat. Akibatnya, para perempuan Muslim lebih mungkin dibenci dibandingkan laki-laki Muslim di Korea karena jilbab yang dikenakan membuat para perempuan tampak "lebih terlihat Muslim". Orang Korea menganggap pakaian jilbab sebagai sesuatu yang negatif. Mereka mengaitkan cadar sebagai tanda perlawanan dan mengaitkannya dengan terorisme padahal jilbab merupakan identitas Islam di publik. Itu sebabnya, perempuan Muslim lebih sering mengalami serangan verbal dan fisik di tengah masyarakat Korea. Cara untuk menghadapinya dengan terus mengenakan cadar, melepas cadar, atau hanya menggunakannya di acara keagamaan Islam, seperti bulan Ramadhan ataupun pertemuan di masjid. (Eum, 2017)

Selain ketidaktahuan masyarakat Korea Selatan mengenai ajaran dan praktek agama Islam serta representasi buruk media tentang Islam, Islamofobia terjadi di Korea Selatan karena adanya pengaruh dari kelompok Kristen tertentu dan sentimen anti-multikultural yang dibangun oleh mereka. Sentimen anti Islam ini terutama disebabkan ketika pada tahun 2007, ada 23 warga negara Korea yang diculik oleh Taliban dan munculnya ISIS pada tahun 2013. (Han, 2017) National Human Right Commission of Korea (NHRCK) pada tahun 2010 mencatat

bahwa dominasi agama Kristen dan agama Buddha di Korea Selatan mendorong terbentuknya kesenjangan antara agama dominan, dalam hal ini Kristen dan Buddha dan agama minoritas, yaitu Islam.

4.3. Bentuk Islamofobia di Korea Selatan

Media baik cetak maupun sosial dapat dikatakan memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik di Korea Selatan tentang Islam dan umat Islam. Di samping itu, para pengamat dan akademisi juga kerap menyoroti isu-isu Islam di Korea dan mereka menggunakan istilah ‘teror, perang, konflik, dan diskriminasi seksual’ dalam berbagai diskursus untuk mendeskripsikan tentang Islam. Akibatnya persepsi mayoritas warga Korea Selatan terhadap warga Muslim menjadi negatif. (Koo, 2018) Dari persepsi negatif inilah, muncul semua bentuk tindakan diskriminasi terhadap umat Islam yang kebanyakan merupakan pendatang dan dapat dengan mudah dikenali karena perbedaan identitas secara fisik.

Pengalaman tidak menyenangkan akibat adanya persepsi negatif tentang Islam dialami oleh para pelajar Muslim yang bersekolah di Korea Selatan, seperti mahasiswa Malaysia yang berkuliah di Universitas Hanyang di Korea. Kehadiran mahasiswa Muslim di universitas ini menarik rasa ingin tahu misionaris Kristen ekstrim yang awalnya hanya memberikan pertanyaan sederhana. Namun kemudian percakapan mereka berkembang menjadi perdebatan dan akhirnya berubah menjadi agresif sehingga mengeluarkan pernyataan yang menyinggung umat Islam. (Khalid, 2017)

Tantangan bukan hanya dihadapi oleh para pendatang yang beragama Islam. Penduduk Korea Selatan yang menganut agama Islam juga menghadapi tantangan, seperti setiap laki-laki

di Korea yang harus mengikuti wajib militer selama kurang lebih 2 tahun. Selama mengikuti proses wajib militer, umat Muslim Korea Selatan juga tetap harus melakukan kewajibannya seperti salat, puasa Ramadhan, dan memakan makanan halal. Sedangkan untuk para perempuan yang mengenakan jilbab sering mengalami diskriminasi dari orang sekitar dan kadang harus kehilangan pekerjaannya. Anak-anak keluarga Muslim pun seringkali dipaksa untuk memakan makanan non-halal. Itu sebabnya, ketika Islamofobia di Korea menjadi lebih umum dan masyarakat Korea Selatan semakin sulit untuk menerima umat Islam secara terbuka, kelompok Muslim di Korea Selatan harus menyembunyikan identitas agamanya demi keamanan mereka. (Sheikh, 2019)

Ketidaktahuan masyarakat Korea Selatan mengenai ajaran dan praktek agama Islam mendorong munculnya ketidakpekaan terhadap kebutuhan umat Islam di Korea. Sebagaimana disampaikan oleh seorang warga lokal Korea Selatan beragama Islam yang menghadapi tantangan kompleks ketika harus mengikuti wajib militer selama 2 tahun, dimana pemuda ini kesulitan untuk menemukan waktu untuk berdoa, puasa saat Ramadhan, ataupun akses untuk makanan halal. Selama wajib militernya, pemuda ini hanya menggambarkan dirinya seorang Islam “dalam hatinya” dan takut untuk memberitahukan kepada rekan-rekan wajib militernya. (FGD dengan nama disamarkan, 2021)

Selain itu, seorang wanita muda lokal beragama Islam bernama Eum (2017) juga menjelaskan bahwa wanita Korea termasuk dirinya mendapatkan diskriminasi dan pengecualian dari teman, keluarga, dan tempat kerja hanya karena menggunakan jilbab. Hal serupa juga dirasakan oleh Diaspora Muslim Indonesia di Korea Selatan, yang berjuang

mempertahankan iman mereka di tengah Islamofobia. Srimulyani (2021, 668-686) mengatakan bahwa diaspora Indonesia di Korea Selatan juga masih mengandalkan media sosial untuk berkomunikasi dengan sesama umat Islam dan bukan dari lingkungan sosial mereka di Korea.

Sayangnya dengan berbagai aksi diskriminatif yang dialami oleh umat Islam, sistem hukum di Korea Selatan tidak bisa memberikan sanksi kepada pelaku ujaran kebencian dan aksi intoleransi terhadap umat Muslim. Dominasi partai penguasa dan pengaruh kelompok Kristen dalam menyusun sejumlah peraturan membuat pemerintah sulit mengambil tindakan tegas terhadap kasus-kasus diskriminasi yang dialami umat Muslim. Selain itu, meski pemerintah Korea Selatan memberikan hak izin kerja bagi buruh migran asing, namun hak atas pendidikan dan perawatan untuk keluarga migran masih terabaikan. (Han, 2017)

Pandangan negatif orang Korea terhadap Islam dan umat Islam tampaknya didasari peniruan dan reproduksi citra yang dikembangkan oleh negara Barat di Korea Selatan. Data NHRCK menunjukkan adanya peningkatan tindakan diskriminasi dan ucapan kasar kepada orang asing, termasuk umat Muslim, terutama melalui media sosial. Pada tahun 2015, para *blogger* dan pengguna twitter yang berpengaruh meminta pemerintah untuk mengambil tindakan khusus untuk memblokir pembangunan sebuah masjid. (Sang, 2017)

Ada juga video yang disebarluaskan di media sosial yang menggambarkan Islam adalah agama yang mengerikan dari dokumen CIA. Video ini tersebar hingga ke gereja-gereja di Korea dan akhirnya menimbulkan mispersepsi. Setelah terjadi serangan teroris oleh ISIS di Eropa, sejumlah umat Kristen

melakukan unjuk rasa permusuhan dengan mengunggah pernyataan kebencian kepada umat Muslim sehingga umat Muslim sering dipersalahkan. Untuk mengatasi hal tersebut dan meminimalisir ketegangan dengan warga mayoritas, umat Islam kerap bergabung dengan sesamanya dalam komunitas yang saling mendukung dan menguatkan. Komunitas-komunitas Islam seperti ini sangat membantu warga Muslim, baik warga lokal maupun para pendatang untuk saling berbagi karena tekanan akibat mengalami ketidakpedulian orang Korea terhadap kewajiban umat Islam dalam beribadah. (Sang, 2017)

5. Islamofobia di Indonesia

Berbeda dengan India, Myanmar, Thailand dan Korea Selatan di mana warga Muslim merupakan kelompok minoritas, Indonesia adalah salah satu negara di Indo-Pasifik yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia berdasarkan survey Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, sebanyak 86,88% atau sekitar 237,53 juta penduduk Indonesia beragama Islam (Kusnandar, 2021) Namun, tentu saja sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penduduk Muslim di Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai satu entitas karena mereka memiliki beragam aliran pemahaman; mulai dari tradisional, modern, moderat hingga fundamental dan radikal. Umat Islam di Indonesia juga menjadi pendukung dari berbagai partai politik dengan beragam basis mulai dari religius hingga nasionalis. (Wanandi, 2002; Anwar, 2009; Damayanti, 2017; Yunanto, 2018; Toyibah, 2020).

Untuk itu, pada bagian ini kita akan melihat Islamofobia yang terjadi di Indonesia bukan dari perspektif kelompok mayoritas seperti yang terjadi di India, Myanmar, Thailand dan Korea Selatan, melainkan dari perspektif kelompok minoritas di

Indonesia. Bagian ini akan menunjukkan persepsi umat Kristen Protestan yang menjadi kelompok mayoritas kedua setelah umat Islam, dengan jumlah pemeluk agama sekitar 20,45 juta jiwa atau sekitar 7,6%. Persepsi umat Kristen dalam hal menjadi menarik untuk diperhatikan karena mereka mengalami aksi intoleransi, radikalisme dan terorisme yang signifikan yang dilakukan oleh kelompok yang menggunakan nama dan basis agama Islam. (Damayanti, 2017)

Di samping itu, kita juga akan melihat Islamofobia yang juga terjadi di dalam umat Islam itu sendiri. Fenomena ini menarik karena umat Islam di Indonesia terbagi-bagi atas berbagai aliran dan kelompok, dimana setiap kelompok dengan aliran yang berbeda akan menganggap kelompok lainnya bukan sebagai bagian dari komunitas mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Adre (FGD, 2021):

“Instead of thinking about whether I'm a Muslim or not, because I'm a Muslim “A” and your Muslim “B”, we are not the same. I'm not your friend. That's what's happening and I feel that a lot actually in Indonesia, so I'm not sure if it can be termed as Islamophobia. But those segregation between different ways of Islam it's what I feel in Indonesia.” (Bukan hanya memikirkan apakah saya seorang Muslim atau bukan, tetapi juga karena saya adalah penganut Islam aliran “A” dan Anda penganut Islam aliran “B”, maka kita tidak sama. Saya bukan teman Anda. Itulah yang terjadi dan saya merasakan hal itu banyak terjadi di Indonesia. Jadi, saya tidak yakin apakah kondisi ini dapat dianggap sebagai Islamofobia, tetapi pemisahan antara aliran-aliran yang berbeda dalam Islam itulah yang saya rasakan terjadi di Indonesia.)

5.1. Latar Belakang

Hampir sama seperti yang terjadi di India dan Myanmar, persepsi negatif antara kelompok Kristen dan umat Islam di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak zaman kolonialisme. Hal ini terjadi terutama ketika para misionaris Belanda yang menyebarkan agama Kristen datang ke Indonesia bersamaan dengan masuknya perusahaan dagang Belanda yang bernaung di bawah *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). Akibatnya, penyebaran agama Kristen pada saat itu seringkali dikaitkan dengan penjajahan Belanda dan bahkan agama Kristen kerap dianggap sebagai agama para penjajah. Resistensi masyarakat Jawa yang pada saat itu telah memeluk agama Islam membuat penyebaran agama Kristen hanya berhasil di daerah-daerah luar Jawa terutama di wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua. (Wanandi, 2002; Aritonang, 2004; Goh, 2005; Damayanti, 2017)

Kebencian dan penolakan umat Islam terhadap umat Kristen muncul ketika pemerintah kolonial Belanda memberikan perlakuan istimewa kepada para pengikut Kristen. (Steenbrink, 2006; Aritonang, 2008; Arifianto 2009) Namun kemarahan tersebut berhasil diredam ketika para pemuda Indonesia dari berbagai daerah, baik Islam maupun Kristen, bersama-sama bertekad membangun nasionalisme Indonesia dalam rangka menciptakan persatuan dan kesatuan melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sebaliknya, kekecewaan kelompok Kristen terhadap umat Islam mulai muncul ketika para pendiri Bangsa mulai merumuskan dasar negara serta ideologi negara Indonesia yang baru merdeka pada 17 Agustus 1945, dan sejumlah politisi Islam dari Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam, dan Persatuan Tarbiyah

Isyamiyah (Perti) mengusulkan agama Islam menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia melalui Piagam Jakarta. (Boland, 1985; Anshari, 1997; Maarif, 2005; Solahudin, 2011; Syarif, 2016)

Pada akhirnya terjadi konsensus antara kelompok Islam, Nasionalis dan Kristen tentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan meletakkan Pancasila sebagai dasar negara. (Syarif 2016; Effendy, 2009) Kesepakatan tersebut membuat kekhawatiran umat Kristen terhadap kelompok Islam mereda, terlebih ketika pada masa Orde Baru kekuatan Islam dibatasi oleh pemerintahan Soeharto dengan cara-cara militeristik. (Solahudin, 2011)

Namun Islamofobia di kalangan kelompok Kristen muncul kembali di akhir pemerintahan Orde Baru dan awal Era Reformasi yang ditandai dengan empat peristiwa penting. Keempat peristiwa tersebut adalah: (1) konflik horizontal antara umat Islam dan Kristen di Poso dan Ambon di akhir tahun 1990an, (2) aksi terorisme berupa peledakan bom di sejumlah gereja termasuk pengeboman malam natal tahun 2000, (3) aksi intoleransi dan intimidasi terhadap gereja serta penolakan pembangunan gereja sejak tahun 2000an, dan (4) munculnya kembali wacana pembentukan negara berbasis agama Islam yang disampaikan oleh partai politik Islam - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) - dalam Sidang Umum MPR 2000 dan Front Pembela Islam (FPI).

Untuk menggali lebih dalam informasi tentang ketakutan, kekhawatiran atau bahkan prasangka negatif kelompok Kristen terhadap umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia, kita akan melihat hasil survey yang dilakukan dengan bekerjasama

dengan Paritas Institute¹ terkait Islamofobia di Indonesia. Survey ini dibuat berangkat dari pemikiran sejumlah pengamat tentang Islamofobia dan istilah Islamofobia yang memiliki beragam bentuk dan persepsi, mulai dari ketakutan dan prasangka (Allen, 2017) hingga tindakan diskriminasi dan kekerasan berbasis rasisme. (Frost, 2008; Bleich, 2010, 2012; Ciftci, 2012; Allen, 2017; Gholami, 2021; Mondon & Winter, 2017) Survey yang dilakukan kepada responden umat Kristen ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang ketakutan dan prasangka yang timbul dalam persepsi umat Kristen terhadap umat Islam di Indonesia.

5.2. Faktor Penyebab Islamofobia di Indonesia

Untuk mendapatkan gambaran tentang Islamofobia yang terjadi di Indonesia, terutama dari kelompok minoritas Kristen, para penulis bekerja sama dengan Paritas Institut untuk menyebarkan survey. Survey ditujukan kepada umat Kristen Protestan dari berbagai komunitas yang tinggal di Indonesia, terutama di daerah dengan mayoritas warganya beragama Islam. Sekitar 61% responden berdomisili di daerah dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, 20,4% responden tinggal di daerah dengan mayoritas penduduknya adalah umat Kristen, dan hanya sekitar 18,6% dari responden yang berdomisili di daerah dengan komposisi antara umat Islam dan Kristen berimbang.

¹ Paritas Institute adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia yang bergerak di bidang hak asasi manusia, terutama pada pemberdayaan masyarakat untuk memahami hak mereka tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Karena dilakukan pada masa Pandemi Covid 19, survey ini dikerjakan secara *online* dan diikuti oleh 964 responden. Sekitar 61% dari responden berjenis kelamin laki-laki dan 39% responden adalah perempuan dengan rentang usia responden antara 19 hingga 80 tahun. Pekerjaan para responden yang mengisi survei antara lain, pendeta, petani, karyawan swasta, guru, aparatur sipil negara, wirausahawan, aktivis, pekerja sosial, hingga *freelancer*. Tingkat pendidikan responden adalah Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sarjana di bidang Antropologi, Bahasa, Maritim, hingga pendidikan Magister di bidang Teologi, Agama, Hukum, Sastra, dan Sosial.

Dari hasil survey yang berusaha untuk menggambarkan persepsi Islamofobia umat Kristen di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ada ketakutan dari kelompok minoritas terhadap umat Islam berdasarkan prasangka sekaligus realita yang mereka lihat serta alami. Ketakutan tersebut muncul terutama ketika Islam dikaitkan dengan aksi radikalisme, intoleransi dan terorisme yang dilakukan oleh sejumlah kelompok Islam militan. Menariknya, meskipun umat Kristen mengalami Islamofobia dalam bentuk ketakutan, tetapi mereka menolak untuk membalas dalam bentuk kekerasan serupa terhadap kelompok Islam. Hal ini dibuktikan dari hasil survey, di mana 86.7% responden mengaku merasa tidak perlu untuk membalas aksi intoleransi, ekstrimisme, dan terorisme berbasis agama Islam dengan tindakan serupa.

Dalam survey ini terdapat 15 pertanyaan yang berkaitan dengan persepsi dan pemahaman umat Kristen tentang Islam serta ajaran Islam, seperti apakah Islam adalah agama yang toleran dan apakah Islam adalah agama yang memberikan kebebasan bagi umat beragama yang lain. Yang menarik adalah

ternyata 40% responden mengaku ragu-ragu dengan pernyataan bahwa Islam adalah agama yang toleran, 39.3% responden mengaku bahwa Islam adalah agama yang toleran, 18.2% responden mengakui bahwa Islam bukanlah agama yang toleran dan sisanya menjawab tidak tahu. Dari data ini, dapat dikatakan bahwa lebih dari 400 responden tidak yakin jika agama Islam mengajarkan tentang toleransi. Bahkan 175 responden jelas-jelas menyatakan bahwa Islam bukanlah agama yang toleran dan hanya sekitar 378 responden yang meyakini bahwa Islam mengajarkan toleransi terhadap agama yang berbeda. Hal ini menunjukkan persepsi umat Kristen terhadap kelompok Islam di Indonesia relatif kurang baik.

Pernyataan responden yang ragu-ragu tentang Islam adalah agama yang toleran ini juga didukung dengan data responden yang ditanyakan mengenai seberapa yakin mereka akan pernyataan bahwa Islam adalah agama yang memberikan kebebasan bagi umat yang lain. Sebanyak 39% atau hampir 400 responden mengaku bahwa mereka ragu-ragu jika Islam adalah agama yang memberi kebebasan bagi umat beragama yang lain. Sebanyak 27.3% atau 263 responden menjawab bahwa Islam bukanlah agama yang memberi kebebasan bagi umat yang lain dan hanya 31.3% atau sekitar 300 responden yang yakin bahwa Islam adalah agama yang memberi kebebasan bagi umat beragama lainnya.

Persepsi yang kurang baik atau ragu-ragu tentang toleransi dalam Islam ini tampaknya disebabkan karena sejumlah responden pernah mengalami intimidasi dan kekerasan dari kelompok Islam militan. Sekitar 35,7% atau 344 responden mengaku bahwa mereka pernah mengalami intimidasi dari orang atau kelompok berbasis agama Islam dan sekitar 15,6% atau sebanyak 150 responden mengaku pernah

menjadi korban aksi ekstrimisme dari kelompok radikal berbasis agama Islam di Indonesia. Dari angka tersebut, 252 responden di antaranya mengalami intimidasi dalam bentuk pelarangan beribadah dan pengrusakan rumah ibadah serta 58 responden mengaku mengalami kekerasan fisik dari orang atau kelompok Islam militan.

Yang menarik adalah ketika para responden ditanya apakah mereka merasa aman bila tinggal atau berdomisili di tengah komunitas umat beragama Islam. Kurang dari 50% responden atau hanya 44,1% yaitu sekitar 425 responden, yang menjawab aman bila berdomisili di tengah komunitas umat beragama Islam. Sisanya sebesar 35,9% atau 346 responden mengaku ragu-ragu tentang keamanan dan 17,6% atau 170 responden merasa tidak aman bila berdomisili di tengah komunitas umat beragama Islam. Bahkan, 74% responden atau sekitar 713 orang mengaku tidak aman dan ragu-ragu apabila mereka berada di dekat sekelompok pria yang menggunakan celana cingkrang dan perempuan bercadar. Hanya sekitar 23,7% atau 228 responden yang mengaku merasa aman-aman saja ketika berada di dekat sekelompok pria mengenakan celana cingkrang atau perempuan bercadar. Data ini menunjukkan bahwa rasa takut umat Kristen terhadap kelompok Islam bukan saja ketika mereka berhadapan langsung dengan orang-orang yang menggunakan pakaian khas sesuai ajaran agama Islam, tetapi juga bahkan ketika mereka tinggal di tengah umat Islam.

Berdasarkan survey yang dilakukan, ketakutan atau Islamofobia yang dialami oleh umat Kristen di Indonesia tampaknya dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama adalah akibat aksi intoleransi, ekstrimisme dan terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal atau teroris berbasis agama Islam yang mereka lihat di koran/TV/majalah, baik yang terjadi

di Indonesia maupun di negara lain di dunia. Hasil survey menunjukkan bahwa 73.1% atau lebih dari 700 responden mengaku merasa tidak aman ketika melihat serangkaian aksi intoleransi, ekstrimisme, dan terorisme berbasis agama Islam, 15.9% responden mengaku ragu-ragu atau tidak yakin tentang rasa aman mereka dan hanya 9.6% responden yang mengaku merasa aman ketika melihat aksi intoleransi, ekstrimisme dan terorisme di Indonesia dan berbagai negara di dunia melalui koran/TV/majalah.

Yang kedua, ketakutan dan kekhawatiran umat Kristen terhadap kelompok Islam timbul karena mereka tidak yakin bahwa pemerintah telah bersikap netral dan tidak berpihak dalam menindak pelaku ketika terjadi pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam terhadap kelompok umat beragama lain. Hasil survey menunjukkan, 46,4% atau 447 responden merasa bahwa negara tidak netral ketika terdapat aksi pelanggaran atau kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam terhadap agama lain, 35% atau sekitar 337 responden merasa ragu-ragu dengan netralitas pemerintah dan hanya 16,6% responden atau 160 orang yang menganggap negara telah bersikap netral dan tidak berpihak ketika terdapat kasus pelanggaran atau kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam (militan) terhadap kelompok agama lainnya.

Yang ketiga, Islamofobia yang dialami oleh umat Kristen di Indonesia muncul karena adanya prasangka/persepsi bahwa pengaruh Islam telah masuk dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan negara serta ada kelompok kekuatan Islam yang ingin mengubah ideologi Pancasila serta mengubah bentuk negara menjadi negara Islam. Sebanyak 72,6% atau sekitar 700 responden merasa bahwa pengaruh agama Islam telah masuk ke dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan negara, 16%

responden mengaku ragu-ragu bahwa Islam telah masuk dalam sistem negara dan sisanya sekitar 100 responden merasa bahwa pengaruh agama Islam tidak masuk dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan negara.

Di samping itu, sebesar 71,8% atau hampir 700 responden beranggapan bahwa ada kekuatan Islam yang ingin merubah ideologi Pancasila. Namun demikian, hanya 47,6% atau sekitar 460 responden yang beranggapan bahwa umat Islam menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Kemudian 16,2% responden mengaku ragu-ragu bahwa ada kekuatan Islam yang ingin mengubah Pancasila dan 29,8% responden merasa ragu-ragu bahwa umat Islam menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Hanya 9,1% responden yang tidak percaya bahwa ada kekuatan Islam yang ingin mengubah Pancasila dan sebanyak 19,1% responden yang tidak percaya bahwa ada kekuatan Islam yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam.

5.3. Bentuk Islamofobia di Indonesia

Menariknya, Islamofobia di Indonesia bukan saja dalam bentuk ketakutan dan prasangka dari kelompok minoritas Kristen terhadap kelompok mayoritas Islam. Islamofobia ini juga terjadi dalam bentuk tindakan diskriminatif dan kekerasan secara verbal bahkan secara fisik di antara umat Islam itu sendiri. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa umat Islam di Indonesia terdiri dari berbagai aliran dengan beragam pandangan politik. Belakangan dengan menguatnya fenomena kemunculan organisasi teroris ISIS sejak tahun 2013, sejumlah kelompok Islam militan di Indonesia terang-terangan mengaku berafiliasi dengan ISIS, seperti Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang juga memiliki

hubungan erat dengan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). (Hakim, 2021)

Dengan adanya pengelompokan di antara umat Islam tersebut maka terjadi pula ketegangan di antara kelompok-kelompok yang tidak sepaham; moderat vs radikal dan tradisional vs modernis. Ketegangan tersebut tidak terlalu terlihat dalam dunia nyata dan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, namun ujaran kebencian terhadap kelompok Islam yang berbeda aliran atau berbeda pilihan partai politik terlihat sangat jelas di dunia maya. Hal ini disampaikan oleh Munir dalam diskusi terbatas (FGD) yang diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2021 bersama dengan sejumlah narasumber yang mengalami kekerasan akibat Islamofobia di India, Thailand dan Korea Selatan. Munir adalah mantan anggota JAD yang dulunya sangat fanatik mendukung gerakan ISIS dan telah divonis penjara selama lima tahun. Saat ini Munir mengaku telah kembali mengikuti pemikiran Islam yang *mainstream*, namun penolakan secara nyata dan komentar negatif di media sosial masih ia rasakan sampai saat ini.

“Pada saat saya pulang (setelah dipenjara 4 tahun), masyarakat ya adalah riak-riak kecil: penolakan-penolakan, omongan-omongan orang. Pasti ada, gitu kan. Tapi memang sama seperti Febri, ya, saya sudah menyadari bahwa ini ya saya telah melakukan suatu kesalahan dan ini adalah konsekuensi yang harus saya hadapi, gitu kan. Jadi masalahnya ya sudah, mungkin masih ada sedikit, gitu kan. Tapi Alhamdulillah, selama berjalannya waktu, saya juga berusaha kan menunjukkan diri saya sekarang seperti apa, bagaimana, akhirnya ya riak-riak itu landai, lama-lama landai. Tapi kemudian memang, riak itu kembali muncul terutama pada saat awal

November lalu gitu kan. Saya kan diajak oleh Pak Ganjar Pranowo untuk di acara podcastnya beliau. Kemudian tampil di situ. Kemudian ada kan salah satu tiktoknya itu, salah satu bagiannya sampai 1.5 juta viewers gitu. Di situ itu mulai ada komentar-komentar ya yang negatif, apa gitu kan. Ya mungkin memang, ya balik lagi seperti awal saya katakan tadi memang dunia nyata dan dunia maya ini yang berbeda.” (Munir, FGD, 2021)

Hal serupa juga dialami oleh Febri Ramdani, mantan *foreign terrorist fighter* yang berangkat ke Suriah bersama keluarganya dan bergabung dengan ISIS. Ketika Febri dan keluarganya menyadari bahwa propaganda yang disebar oleh ISIS melalui media dalam jaringan (*daring*) tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Suriah - bahkan ISIS sendiri melakukan praktek-praktek yang menyimpang dari syariat Islam - Febri dan keluarga memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Febri bersama orang tua dan kakak perempuannya kemudian mengikuti program deradikalisasi yang disediakan oleh pemerintah Indonesia dan mereka menyadari bahwa Islam yang sesungguhnya adalah agama *rahmatan lil alamin* atau rahmat bagi seluruh alam dan umat manusia. Namun meskipun Febri dan keluarganya telah mengikuti program deradikalisasi, diksriminasi dan penolakan terhadap dirinya masih terjadi, terutama di media sosial.

“Alhamdulillah setelah saya balik dari sana gitu ya dan masyarakat di sekitar lingkungan saya itu menerima semua *cuman* memang orang-orang yang dari media sosial, netizen-netizen yang mencibir saya dan keluarga gitu ya. Tapi ya itu sih menurut saya, apa yah, konsekuensi lah yang harus saya dapatkan gitu kan karena saya sudah berangkat ke sana (Suriah) gitu dan karena tempat tersebut

memang sudah dilarang oleh pemerintah dan akhirnya ee saya menganggap ya, ya sudah itu harus saya terima dan saya menanggapinya dengan lapang dada.” (Febri, FGD, 2021)

Penolakan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata juga pernah dialami oleh Febri, meski tidak sekecang dalam dunia maya. Hal itu terutama terjadi setelah Febri mempublikasikan pengalamannya sebagai ex-kombatan Suriah dalam buku yang berjudul, “300 Hari di Bumi Syam.”

“Pada saat itu kan saya bertepatan dengan *launching* buku biografi saya, itu judulnya 300 Hari Di Bumi Syam dan pada saat itu bertepatan juga kondisinya saya sudah mulai kuliah di salah satu Universitas. Nah akhirnya setelah berita tersebut *booming* gitu ya, setelah *launching* buku saya itu tersebar di media-media maya, akhirnya saat saya masuk kuliah itu mungkin sempat ada beberapa temen-temen di kelas gitu di kampus yang agak menjauhi saya selama beberapa minggu *cuman* memang kebetulan karna posisi saya pada saat itu sebagai ketua kelas dan sebagai tentunya menjadi narahubung dengan dosen, ya mau ga mau mereka kembali menjalin komunikasi dengan saya. Jadi sempatlah satu minggu dua minggu itu mereka kaya ga mau kontak, kaya ngeliatin saya pas masuk ke kelas juga kaya agak menjauh gitu, *cuman* hanya dari seperti itu saja yang, jadi ga apa, ga mengintimidasi secara verbal atau fisik, itu sih ngga sih ya. Kaya gitu aja sih, *cuman* sekarang Alhamdulillah udah normal.” (Febri, FGD, 2021)

Pengalaman Munir dan Febri menunjukkan bagaimana umat Islam di Indonesia tidak bisa dengan mudah menerima kelompok lainnya yang berbeda, meskipun sama-sama beragama Islam. Penggunaan istilah “cebong” dan “kampret” atau belakangan menjadi “kadrun” atau kadal gurun yang banyak ditemukan di media sosial terutama twitter sejak tahun 2019 adalah contoh lainnya dari tindakan diskriminasi dan penolakan di antara sesama umat Islam. Kedua sebutan ini merupakan stigma yang dilabelkan kepada dua kelompok yang berbeda pendapat, dukungan politik, pilihan gubernur, pilihan presiden, prinsip dan ideologi. Cebong digunakan untuk menyebut pendukung Jokowi dan kampret atau belakangan berubah menjadi kadrun adalah untuk menyebut pendukung Prabowo Subianto. (Damarjati, 2020)

Denny Siregar, seorang pegiat media sosial mengaku bahwa dialah yang menciptakan istilah kadrun pada saat Pilpres 2019. Label ini diciptakan sebagai balasan atas serangan yang ditujukan kepadanya karena ia kerap dicap sebagai anggota PKI, Islam liberal dan Islam Syiah. Menurut Denny, sebutan kadrun itu menunjuk pada neo-Khawarij, di mana khawarij merupakan salah satu aliran dalam kelompok Islam yang mempunyai penafsiran agama yang kaku serta sering mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, mulai dari Ali bin Abi Thalib, Muawiyah sampai Ustman bin Affan. (Sadikin, 2022) Dari penggunaan istilah “kadrun” inilah kemudian Denny dan teman-temannya dituduh Islamofobia oleh para pendukung Prabowo karena isi media sosialnya kerap memojokan para “kadrun”. (Arsyad, 2021)

Menariknya, pengelompokan umat Islam ke dalam dua kubu “cebong” dan “kadrun” yang sampai memicu ketegangan dan Islamofobia hanya terjadi di media sosial. Seperti yang

dikonfirmasi oleh Adre, Munir dan Febri dalam diskusi terbatas yang dilakukan secara virtual. Menurut mereka, Islamofobia dalam bentuk ujaran kebencian lebih banyak terjadi dan mereka alami melalui media sosial. Meskipun Islamofobia dalam bentuk tindakan yang tidak bersahabat dan menjauhi mereka yang dianggap memiliki pemahaman Islam yang berbeda juga terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, namun ketiganya mengakui bahwa Islamofobia melalui media sosial lebih sering mereka alami.

Sejauh ini, bentuk Islamophobia yang terjadi di Indonesia tidak sampai pada dukungan pemerintah. Namun demikian, bagi kelompok Kristen yang kerap mengalami aksi intoleransi dalam bentuk pelarangan ibadah dan penutupan gereja, pemerintah dianggap melakukan pembiaran yang pada akhirnya menyebabkan Islamofobia muncul di kalangan umat Kristen. (Damayanti, 2018) Hal ini dibuktikan juga melalui survey yang telah dilakukan. Kondisi ini tentu saja perlu segera diantisipasi oleh pemerintah Indonesia, agar tidak berkembang menjadi konflik yang meluas dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan antar dan intra umat beragama.

Berangkat dari penjelasan tentang terjadinya Islamofobia di India, Myanmar, Thailand, Korea Selatan dan Indonesia di atas, maka dapat disampaikan bahwa ketakutan, penolakan, tindakan diskriminatif bahkan aksi kekerasan terhadap umat Islam bukan sesuatu yang baru terjadi di negara-negara tersebut. Kecuali di Korea Selatan, sentimen anti-Islam telah terjadi bahkan sejak zaman kolonialisme Barat di Indo-Pasifik. Dalam bagian selanjutnya, kita akan melihat secara detail karakteristik fenomena Islamofobia yang terjadi di Indo-Pasifik dan dampaknya terhadap keamanan nasional dan keamanan insani.

BAB III

KARAKTERISTIK DAN DAMPAK ISLAMOFOBIA DI INDO-PASIFIK

1. Tipologi Islamofobia di Indo-Pasifik

Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita lihat bahwa Islamofobia tidak hanya terjadi di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris dan Perancis saja. Sentimen anti Islam dan berbagai penolakan serta aksi diskriminasi juga dialami oleh umat Islam yang tinggal di negara-negara di Indo-Pasifik, seperti India, Myanmar, Thailand dan Korea Selatan. Bahkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam juga mengalami apa yang disebut dengan Islamofobia, baik itu terjadi di antara kelompok yang berbeda agama maupun di dalam kelompok umat Islam itu sendiri.

Namun demikian, faktor penyebab terjadinya dan tipologi Islamofobia di lima negara tersebut berbeda dan masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Islamofobia yang terjadi di India, Myanmar dan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah yang cukup panjang, bahkan dapat ditarik hingga masa kerajaan dan era kolonialisme pada abad ke-17. Menariknya, perubahan bentuk pemerintah dan sistem politik di negara-negara tersebut - dari sistem kerajaan yang berada di bawah pemerintahan kolonial hingga kemudian menjadi negara merdeka seperti di India dan Indonesia, serta dari sistem pemerintahan yang otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis, seperti di Myanmar - tidak serta merta menghilangkan Islamofobia yang ada.

Meski kebencian terhadap umat Islam telah terjadi sejak lama di India, Myanmar, Thailand dan Indonesia, namun konteksnya berbeda. Benih-benih kebencian terhadap Islam di India telah terjadi bahkan sebelum Inggris masuk ke wilayah Asia Selatan, yaitu sejak Kekaisaran Mughal yang beragama Islam menguasai wilayah India dan Pakistan sekitar awal abad ke-16. Penindasan yang dilakukan oleh Kekaisaran Moghul terhadap masyarakat Hindu menjadi pemicu munculnya sentimen anti Islam. Ketika Inggris akhirnya berhasil menguasai wilayah Kekaisaran Mughal, Inggris cenderung melihat kelompok Islam sebagai ancaman dan musuh, namun tidak dengan kelompok masyarakat Hindu. Itu sebabnya, Inggris menerapkan kebijakan pemisahan di level masyarakat yang menguntungkan masyarakat Hindu dan kebijakan ini semakin mempertajam permusuhan di antara umat Hindu dan umat Islam (Sikander, 2021)

Hampir serupa dengan yang terjadi di India, kebencian umat Buddha terhadap warga minoritas Islam di Myanmar, juga dimulai ketika Inggris menguasai wilayah Kerajaan Burma pada awal abad ke-19. Ketika pemerintah kolonial Inggris mendatangkan para pekerja dari India dan Bengali yang beragama Hindu dan Islam ke Myanmar, pemerintah Inggris cenderung memberikan keistimewaan kepada warga non-Myanmar. Itu sebabnya, komunitas Buddha di Myanmar melihat keduanya, terutama komunitas Islam Rohingya, sebagai ancaman bukan saja terhadap kehidupan mereka tetapi juga terhadap identitas dan budaya masyarakat asli Myanmar. (Wildan, 2021)

Agak berbeda dengan Islamofobia di India dan Myanmar yang terjadi sejak zaman kolonialisme, meskipun Indonesia pernah dikuasai oleh Belanda sejak abad ke-17, namun

Islamofobia di Indonesia tidak terjadi pada saat kolonialisme. Walaupun Belanda memberikan keistimewaan kepada warga Indonesia yang memeluk agama Kristen sebagai hasil dari program Kristernisasi, namun karena jumlah umat Kristen yang tidak signifikan, umat Islam di Indonesia tidak secara langsung menganggap umat Kristen sebagai ancaman dan berkonflik dengan mereka. Begitu juga sebaliknya.

Benih-benih Islamofobia pada umat Kristen di Indonesia baru muncul ketika sejumlah partai politik dan organisasi masyarakat Islam memprakarsai berdirinya negara Islam tidak lama setelah Indonesia merdeka di tahun 1945. Meski akhirnya disepakati bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berlandaskan Pancasila, namun Islamofobia menguat kembali di akhir pemerintahan Orde Baru dan menjelang Era Reformasi. Munculnya Islamofobia di akhir tahun 1990an ini ditandai dengan adanya konflik Islam-Kristen di Poso dan Ambon, aksi terorisme, aksi intoleransi terhadap gereja dan umat Kristen serta wacana memasukan kembali Piagam Jakarta yang berisikan syariat Islam ke dalam dasar negara Indonesia.

Thailand yang tidak pernah mengalami kolonialisme negara-negara Eropa seperti India, Myanmar dan Indonesia, ternyata juga mengalami Islamofobia namun dengan latar belakang yang berbeda. Islamofobia di Thailand lebih banyak dikaitkan dengan penolakan dan perlawanan terhadap kelompok separatis Islam berkebangsaan Melayu yang tinggal di wilayah Thailand Selatan. Wilayah ini merupakan daerah perbatasan antara Thailand dan Malaysia. (Abdulmani, 2013; Pathan dkk, 2018)

Begitu juga dengan Islamofobia di Korea Selatan yang berbeda dengan konteks empat negara di atas. Islamofobia di Korea Selatan baru terjadi sekitar tahun 2000an, bersamaan dengan maraknya aksi terorisme berbasis agama Islam di negara-negara Barat yang dilakukan oleh Al Qaeda dan terutama ISIS. Fenomena Islamofobia ini terjadi karena pengaruh media Barat yang begitu kuat terhadap warga Korea Selatan dan kerap menyiarkan berbagai serangan kelompok teroris. Di samping itu, Islamofobia di Korea Selatan lebih didasari oleh sikap rasisme warga Korea yang memandang dirinya berbeda dengan bangsa lain.

Berangkat dari penjelasan latar belakang sejarah serta teori yang dibangun oleh Sabri Ciftci (2012) dan Tariq Modood (2020) tentang komponen yang ada dalam Islamofobia, maka para penulis mencoba mengklasifikasikan penyebab dan kondisi yang mendorong Islamofobia yang terjadi di India, Myanmar, Thailand, Korea Selatan dan Indonesia seperti pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 – Penyebab dan Komponen Islamofobia

Penyebab & Komponen Islamofobia	India	Myanmar	Thailand	Korea Selatan	Indonesia
Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> • Dilatarbelakangi sejarah kolonialisme Barat (Inggris) • Ketegangan antara umat Hindu dan Islam di India • Aksi terorisme di negara-negara Barat setelah kejadian 11 Sept 2001 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilatarbelakangi sejarah kolonialisme Barat (Inggris) • Pengaruh kuat Junta Militer • Rasisme/ Menguatnya Nasionalisme Buddha 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerakan separatisme berbasis agama Islam di wilayah perbatasan dengan Malaysia • Rasisme/ Menguatnya Nasionalisme Buddha 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasisme karena xenophobia • Media Barat yang menyiarkan aksi terorisme di negara-negara Barat setelah kejadian 11 Sept 2001 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya gerakan ingin mendirikan negara Islam. • Aksi terorisme & intoleransi terhadap kelompok minoritas • Isu politik
Islam dipandang terpisah dan dianggap sebagai yang lain.	✓	✓	✓	✓	-
Islam dipandang sebagai inferior terhadap Barat.	✓	✓	-	✓	-
Islam dikaitkan dengan kekerasan,	✓	✓	✓	✓	✓

tindakan agresif, mengancam, mendukung terorisme					
Islam dipandang sebagai ideologi politik dan sering digunakan untuk keuntungan politik	✓	✓	✓	-	✓
Permusuhan terhadap Islam dan umat Islam untuk justifikasi diskriminatif	✓	✓	✓	✓	✓

Dari tabel di atas, dapat kita lihat negara-negara di Indo-Pasifik yang diteliti, kecuali Indonesia, memandang Islam sebagai kelompok yang lain atau yang berbeda. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ada tiga alasan mengapa pemerintah serta warga India, Myanmar, Thailand dan Korea Selatan menjadikan Islam sebagai kelompok yang lain di negara mereka. Yang pertama, perbedaan identitas, nilai dan ajaran yang berbeda antara umat Islam dengan mayoritas umat Hindu di India, umat Buddha di Myanmar dan Thailand, umat Kristen Protestan dan Buddha di Korea Selatan, membuat masyarakat di empat negara tersebut dengan mudah mengidentifikasi umat Islam sebagai kelompok yang lain dan berbeda dengan mereka. Yang paling menyedihkan adalah perbedaan persepsi tentang hewan sapi antara umat Islam dan Hindu di India. Sementara umat Islam biasa memakan daging sapi dan menjadikan sapi sebagai hewan korban pada saat hari raya Idul Adha, umat Hindu justru sangat menjaga kesakralan hewan sapi sehingga tidak boleh dibunuh apalagi dimakan. (HRW, 2019)

Yang kedua, karena umat Islam adalah warga minoritas di empat negara tersebut di atas. Jumlah umat Islam yang lebih sedikit dibandingkan umat Hindu di India, Buddha di Myanmar dan Thailand, serta warga Korea yang mayoritas atheis, Kristen dan Buddha, membuat umat Islam tidak berpengaruh secara signifikan dalam kehidupan sosial politik di negara-negara tersebut. Akibatnya, aspirasi mereka seringkali tidak didengar dan kepentingan mereka kurang diperhatikan atau bahkan tidak dilibatkan dalam membentuk nilai, norma dan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini nyata terlihat di India, Myanmar dan Thailand yang ingin membentuk negara berbasis nilai, ideologi serta ajaran agama warga mayoritas di sana.

Ketiga, atas dasar perbedaan mayoritas dan minoritas, pemimpin politik yang berkuasa cenderung membuat perbedaan antara warga mayoritas dengan minoritas, dengan memberikan kemudahan dan keistimewaan kepada warga mayoritas. Seperti yang terjadi di India, gelombang protes umat Islam terhadap jaminan kewarganegaraan yang terkesan memberikan keuntungan bagi umat Hindu karena mereka memiliki dokumen yang lengkap dan mudah untuk membuat dokumen yang dibutuhkan, ternyata tidak didukung oleh partai politik manapun yang ada di India. (Ahmed, 2020) Kemungkinan besar, hal ini terjadi karena suara umat Islam tidak signifikan untuk kepentingan politik partai-partai di India.

Islamofobia juga terjadi di lima negara karena Islam kerap diasosiasikan dengan perilaku yang kasar, penuh dengan kekerasan, tindakan agresif, mengancam dan mendukung terorisme. Islamofobia yang didasari oleh pemikiran seperti ini terjadi di India, Myanmar dan Thailand karena pemerintah negara-negara ini kerap menghadapi konflik secara langsung dengan umat Islam di sana. Lalu dibangunlah persepsi bahwa umat Islam kasar, agresif dan mendukung terorisme. Persepsi ini yang kemudian dijadikan sebagai justifikasi oleh pemerintah untuk bertindak tegas kepada umat Islam di sana.

Khusus di Indonesia, pandangan seperti ini muncul di kelompok minoritas, terutama Kristen Protestan yang secara nyata mengalami dampak dari aksi intoleransi, radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh kelompok militan Islam dan kelompok teroris di Indonesia yang berafiliasi dengan Al Qaeda dan ISIS. (Damayanti, 2018) Islamofobia dengan komponen seperti ini juga terjadi di Korea Selatan. Kedekatan hubungan pemerintah Korea Selatan dengan Amerika Serikat dan pengaruh media Barat sangat mewarnai pemikiran warga Korea

Selatan sehingga Islamofobia dengan komponen ini terjadi di sana.

Selanjutnya, kecuali di Korea Selatan, Islamofobia terjadi karena Islam dipandang sebagai ideologi politik dan sering digunakan untuk keuntungan politik. Pemisahan negara India dan Pakistan pada tahun 1948 berdasarkan agama, serta munculnya gerakan separatis Rohingya di Myanmar dan Pattani di Thailand mengkonfirmasi komponen Islamofobia tersebut. Di Indonesia, meskipun konsensus politik pada awal kemerdekaan menjadikan negara ini berlandaskan Pancasila dan bukan Syariah Islam, namun wacana dan gerakan ingin mendirikan negara berbasis agama Islam masih terus berlanjut. Berakhirnya Orde Baru, mendorong sebagian umat Islam di Indonesia berafiliasi ke dalam partai politik dan organisasi masyarakat Islam yang berupaya untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia. (Solahudin, 2011) Kondisi ini semakin terlihat jelas setelah pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilihan Presiden tahun 2019.

Yang terakhir, permusuhan terhadap Islam dan umat Islam merupakan justifikasi terhadap tindakan diskriminatif yang memicu terjadinya Islamofobia di India, Myanmar, Thailand, Korea Selatan dan Indonesia. Ketika umat Islam dipandang sebagai sesuatu yang “lain dan berbeda” ditambah lagi adanya tindakan agresif dari kelompok Muslim dengan berbagai alasan, maka semua itu akan memicu permusuhan terhadap umat Islam. Apalagi jika “sesuatu yang lain dan berbeda” itu dikaitkan dengan isu kelompok mayoritas-minoritas seperti di India, Myanmar dan Thailand. Menariknya, dalam kasus di Indonesia, permusuhan itu terjadi justru di antara kelompok Islam itu sendiri, dan lebih banyak disebabkan oleh perbedaan aliran, sudut pandang, pilihan partai politik dan

pilihan pimpinan politik. Permusuhan inilah yang kemudian mendorong terjadinya aksi diskriminatif, mulai dari level yang tidak terlalu berbahaya seperti penolakan di Korea Selatan, hingga ujaran kebencian di media sosial. Bahkan di beberapa negara, seperti India, Myanmar dan Thailand, aksi tersebut meningkat menjadi kekerasan nyata hingga pengusiran dan pembunuhan massal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, para peneliti juga mencoba membuat matriks tipologi Islamofobia yang terdapat di lima negara di Indo-Pasifik, sebagai berikut;

Tabel 2 – Tipologi Islamofobia

Tipologi Islamofobia	India	Myanmar	Thailand	Korea Selatan	Indonesia
Ketakutan dan kecemasan	-	-	-	✓ (berdasarkan rasisme)	✓ (dialami kelompok minoritas)
Kebencian dan sentimen anti Islam	✓	✓	✓	✓ (melalui media sosial)	✓ (melalui media sosial, antar kelompok Islam)
Diskriminasi, penolakan & intimidasi	✓	✓	✓	-	✓ (melalui media sosial, antar umat Islam)
Kekerasan fisik, pengrusakan & pembunuhan	✓	✓	✓	-	-
Dukungan Pemerintah terhadap Islamofobia	✓ (melalui UU dan terjadi pembiaran)	✓ (terjadi pembiaran)	✓ (melalui UU dan kontrol ketat dari tentara)	-	-

Dari tabel 2 di atas, dapat dikatakan bahwa India, Myanmar dan Thailand adalah tiga negara di Indo-Pasifik dengan tingkat Islamofobia yang sudah sampai pada level kekerasan fisik, termasuk di dalamnya pengrusakan terhadap tempat tinggal, pemukulan, pengusiran bahkan sampai pada pembunuhan terhadap umat Islam di negara mereka. Bahkan kekerasan yang dilakukan oleh warga India, Myanmar dan Thailand seakan mendapat dukungan dari pemerintah negara dengan adanya undang-undang yang memberikan keistimewaan kepada warga mayoritas dan merugikan umat Islam yang merupakan warga minoritas di negara tersebut. Dalam kasus Thailand, dukungan pemerintah bahkan ditunjukkan melalui UU Darurat yang memberikan otoritas kepada tentara untuk mengontrol wilayah perbatasan sekaligus bertindak keras terhadap umat Islam yang dianggap sebagai kelompok separatis.

Islamofobia yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan ke dalam dua bentuk yang berbeda. Yang pertama adalah ketakutan dan kecemasan yang dialami oleh kelompok minoritas seperti kelompok Kristen terhadap kelompok Islam. Ketakutan yang dialami oleh kelompok minoritas Kristen terlihat nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, kekhawatiran dan ketakutan tersebut muncul karena adanya intimidasi dan aksi intoleransi yang dilakukan oleh kelompok radikal dan organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang melakukan persekusi, pelarangan dan penolakan terhadap tempat ibadah umat Kristen.

Ketakutan tersebut bertambah ketika melihat pemerintah dan aparat keamanan sepertinya membiarkan persekusi terjadi dan tidak memfasilitasi kebutuhan umat Kristen untuk

beribadah. Kekhawatiran umat Kristen semakin meningkat terlebih setelah adanya gerakan untuk mendirikan negara Islam. Gerakan ini terutama disampaikan oleh sejumlah organisasi masyarakat berbasis Islam di Indonesia dan didukung oleh partai politik Islam yang menyuarakan semangat Piagam Jakarta.

Bentuk Islamofobia kedua yang terjadi di Indonesia adalah kebencian, sentimen anti Islam serta penolakan dan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok Islam yang satu terhadap kelompok Islam yang lainnya. Islamofobia bentuk yang kedua ini mungkin saja terlihat dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata namun tidak terlalu banyak. Bentuk Islamofobia yang kedua ini justru terlihat semakin meningkat di dalam media *online*, terutama media sosial. Ujaran kebencian dan diskriminasi sesama umat Islam melalui media sosial, terutama melalui *twitter*, marak terjadi dan meningkat sejak tahun 2018. Hal ini terutama dipicu dengan adanya isu politik seperti pada saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan pemilihan Presiden tahun 2018. Penggunaan label tertentu yang digunakan untuk memojokan satu sama lain, merupakan bentuk kebencian dan diskriminasi yang paling terlihat di dalam media sosial.

2. Dampak Islamofobia di Indo-Pasifik

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, dapat kita lihat bahwa Islamofobia yang terjadi di Indo-Pasifik, khususnya di lima negara, India, Myanmar, Thailand, Indonesia dan Korea Selatan menimbulkan akibat yang tidak menyenangkan terutama bagi umat Islam yang ada di negara tersebut. Diskriminasi, penolakan, aksi persekusi, bahkan pengusiran dan pembunuhan dialami oleh umat Islam di negara-

negara tersebut meski dengan level dan latar belakang yang berbeda-beda. Itu sebabnya, pada bagian ini, kita akan melihat lebih detail dampak Islamofobia terhadap keamanan nasional suatu negara dan keamanan manusia, khususnya bagi umat Islam itu sendiri.

2.1. Dampak Islamofobia terhadap Keamanan Nasional

Islamofobia yang terjadi di lima negara di Indo-Pasifik – India, Myanmar, Thailand, Indonesia dan Korea Selatan – bukanlah fenomena tunggal. Artinya, ada latar belakang baik berupa tinjauan sejarah maupun peristiwa fenomenal yang menyebabkan ketakutan, kebencian, diskriminatif dan penolakan terhadap umat Islam di negara-negara tersebut. Di samping itu, Islamofobia yang terjadi juga menimbulkan akibat dan konsekuensi bagi pemerintah negara serta umat Islam yang ada di negara tersebut. Untuk itu, kita akan melihat terlebih dahulu dampak terjadinya Islamofobia di lima negara di Indo-Pasifik terhadap keamanan nasional di negara masing-masing.

Kelima negara di Indo-Pasifik - India, Myanmar, Thailand, Korea Selatan dan Indonesia - merupakan negara demokratis atau negara dengan bentuk Republik yang menjamin sejumlah hak dasar atau hak asasi manusia (HAM). Namun kenyataannya, Islamofobia yang terjadi dan meningkat dalam dua dekade terakhir, terutama di India, Myanmar dan Thailand telah membuat negara-negara ini mendapat sorotan dari masyarakat internasional. Masyarakat internasional terutama menyoroti kasus-kasus pelanggaran HAM, terutama yang disebabkan oleh penolakan dan sentimen anti-Islam.

Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan *International Commission of Jurists* serta Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional telah mengklasifikasikan India, Myanmar dan Thailand sebagai negara yang perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini terkait dengan kebijakan yang dibuat dan penanganan pemerintah terhadap umat Islam di negara tersebut yang dianggap telah melanggar hukum internasional, khususnya yang terkait HAM. (CFR, 2020; International Commission of Jurist (ICJ), 2019; HRW 2013 & 2019)

Sekretaris Jenderal PBB, Antonia Guterres telah menyatakan kekhawatirannya tentang Undang-Undang Kewarganegaraan (*Citizenship Amendment Act/CAA*) yang dibuat oleh pemerintah India karena akan membuat banyak orang, terutama umat Islam yang ada di India kehilangan kewarganegaraannya. (CFR, 2020) Kondisi serupa juga terjadi di Myanmar. Pengaruh yang kuat dari Junta Militer serta aksi persekusi umat Nasionalis-Buddha di Myanmar telah membuat warga Rohingya kehilangan kewarganegaraan dan mengungsi dari tempat tinggal mereka. Hal inilah yang menjadi catatan dari sejumlah organisasi internasional terhadap pemerintah Myanmar. Sebagai tindak lanjut dari laporan yang mereka buat, organisasi-organisasi internasional tersebut menyerukan agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan yang tepat terhadap krisis Rohingya yang terjadi. (ICJ, 2018)

Kondisi yang juga mendapat perhatian dari organisasi internasional terkait dengan perlakuan pemerintah terhadap warga negaranya adalah pemberlakuan Undang-undang darurat di Thailand sejak tahun 2004. Undang-undang ini diberlakukan untuk mengatasi masalah separatisme di tiga provinsi di Thailand Selatan. Kekhawatiran pemerintah

Thailand terhadap gerakan separatisme di daerah perbatasan dengan Malaysia dan wacana Islamofobia yang terus menerus dibangun oleh tokoh agama setempat telah membuat tentara memiliki peran besar di daerah tersebut. Akibatnya tindakan represif kerap dialami oleh umat Islam di Provinsi Pattani, Yala, dan Naratiwat. Sejumlah organisasi internasional kemudian melaporkan hal ini sebagai ancaman terhadap nyawa manusia, khususnya umat Islam di Thailand. (ICJ, 2005)

Sorotan masyarakat internasional dan sejumlah negara terhadap tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah India, Myanmar dan Thailand ini tentu saja dapat berdampak terhadap kredibilitas pemerintah. Dengan adanya laporan dari NGO di tingkat nasional dan utusan organisasi internasional tentang kebijakan dan tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum internasional dapat menjadi indikasi bahwa pemerintah negara-negara tersebut tidak mampu melindungi warga negaranya dan gagal menjamin hak asasi warga negaranya.

Jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin Dewan Keamanan PBB akan mengambil tindakan tegas berupa penjatuhan sanksi terhadap negara yang dianggap telah melanggar hukum internasional atau memaksa pemerintah negara untuk memberikan ijin kepada organisasi kemanusiaan di bawah PBB untuk melaksanakan semua tindakan yang diperlukan dalam melindungi umat Islam yang kehilangan hak mereka sebagai warga negara. (ICJ, 2018) Bahkan Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional, sebuah lembaga pemerintah independen, telah mendesak pemerintah AS untuk memberikan sanksi kepada pemerintah negara-negara “yang menjadi perhatian khusus” yang dianggap

telah melakukan pelanggaran HAM di dalam negeri mereka. (CFR, 2020)

Selain itu, hubungan yang buruk antara pemerintah negara yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam dengan umat Islam di dalam negerinya turut mempengaruhi hubungan diplomatik negara tersebut dengan negara-negara Islam di dunia. Sebagai contoh, Myanmar di dalam hubungan diplomatiknya dengan negara-negara Islam yang pada dasarnya baik, namun sewaktu-waktu dapat menjadi tidak baik karena isu Rohingya.

Ketika pemerintah Arab Saudi menyediakan 190.000 rumah bagi masyarakat Muslim Myanmar, pemerintah Myanmar malah menuduh aliran Wahabi yang berasal dari Arab Saudi yang menjadi penyebab bangkitnya semangat perlawanan Rohingya. Hal ini sempat membuat hubungan kedua negara memburuk (Shams, 2016) Itu sebabnya, hubungan Myanmar dengan negara-negara Islam di dunia hanya sebatas hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, namun pemerintah Myanmar terang-terangan menolak untuk membahas isu Rohingya dengan negara-negara tersebut. (BBC New, 2020)

Demikian juga ketika pemerintah Thailand menghadapi umat Islam yang dianggap sebagai kelompok separatis di Thailand Selatan. Adanya dugaan bahwa sejumlah elit politik di Malaysia Utara merupakan aktor intelektual dan memberikan dukungan logistik bagi kelompok separatis Pattani dengan menggunakan basis agama Islam telah menimbulkan kecurigaan pemerintah Thailand terhadap pemerintah Malaysia. Namun pemerintah Malaysia membantah hal tersebut, bahkan Perdana Menteri Abdullah Badawi telah membuat kesepakatan untuk membantu pemerintah Thailand mengatasi kelompok

separatis tersebut. Pemerintah Malaysia menyadari bahwa ancaman kelompok separatis berbasis agama Islam ini dapat menyebar ke Malaysia dan malah mengancam umat Islam yang ada di Malaysia. (Gunaratna dan Acharya, 2013)

Di level nasional, ketegangan yang timbul akibat Islamofobia di India, Myanmar dan Thailand bercampur dengan konflik agama dan konflik antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas. Kondisi ini tentu saja dapat menciptakan instabilitas keamanan dan politik di dalam negeri. Sejumlah ketegangan antara umat Hindu dan umat Islam yang terjadi di India, atau umat Buddha dan umat Islam di Myanmar dan Thailand telah menyebabkan berbagai kerusuhan sekaligus juga instabilitas politik di dalam negeri.

Dikeluarkannya UU Darurat di Thailand pada tahun 2004 dan peraturan lain di India dan Myanmar yang membatasi keleluasaan umat Islam di negara mereka merupakan strategi pemerintah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di dalam negeri mereka. Sayangnya, kebijakan dan peraturan yang diambil tersebut justru merugikan umat Islam yang merupakan kelompok minoritas di negara-negara tersebut. Akibatnya, konflik yang terjadi malah berkepanjangan dan tidak kunjung dapat diselesaikan dengan cara damai.

Islamofobia di Indonesia agak berbeda mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Moh. Mahfud MD membantah Islamofobia terjadi di Indonesia. Mahfud MD mengartikan Islamofobia sebagai kebencian dan ketakutan pemerintah terhadap umat Islam serta kekhawatiran

dan ketakutan umat Islam untuk mengaku dirinya sebagai Islam. (Humas Kemenko Polhukam, 2020)

Namun, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa fobia dalam bentuk ketakutan terhadap kelompok Islam terjadi pada kelompok non-muslim, terutama umat Kristen Protestan yang mengalami aksi intoleransi dan menjadi korban serangan terorisme. Ketakutan terhadap umat Islam ini terutama disebabkan karena umat Kristen tidak memahami perbedaan paradigma yang terjadi di antara kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia. Mereka hanya mengenal kelompok Islam moderat yang diwakili oleh kelompok Nadhatul Ulama (NU) dan cenderung menyamakan kelompok fundamental dalam Islam dengan kelompok radikal.

Di samping itu, Islamofobia dalam bentuk tindakan diskriminatif, penolakan dan ujaran kebencian antara kelompok Islam yang satu dengan kelompok Islam yang lainnya juga mulai terjadi. Peristiwa yang menyebabkan hal ini antara lain pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan pemilihan Presiden tahun 2018. Ujaran kebencian dan diskriminasi di antara kelompok Islam terlihat jelas terutama di dalam media sosial.

Meski tidak menjadi sorotan internasional dan tidak mendapat tekanan dari masyarakat internasional, namun jika kondisi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin konflik antara umat Islam dan umat Kristen di Indonesia kembali meruncing. Bahkan, sejarah konflik Islam-Kristen seperti di Poso dan Ambon pada awal tahun 2000an bisa saja terulang. Di samping itu, ujaran kebencian yang menyebar di media sosial di antara umat Islam yang berbeda pilihan politik, jika dibiarkan, sangat mungkin mewujud dalam bentuk aksi kekerasan yang lebih

nyata. Teror bom buku yang pernah dialami oleh Ulil Abshar Abdalla dan Japto Soerjosoemarno pada tahun 2011 misalnya, hanya karena perbedaan sudut pandang tentang agama Islam bisa saja terulang. Ulil yang dianggap sebagai pendukung pluralisme dan Jaringan Islam Liberal ditentang oleh mereka yang melihat pentingnya menjaga kemurnian agama Islam. (Ken/Fay, 2011)

Islamofobia yang terjadi di Korea Selatan cenderung bersifat domestik, parsial dan tidak sampai berdampak pada keamanan nasional. Hingga saat ini, pemerintah Korea Selatan belum menempatkan keguyuban masyarakat yang majemuk sebagai fokus dari keamanan nasional mereka. Pemerintah masih berfokus pada keamanan intra Korea seperti reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara yang masih terpisah. Selain itu, keamanan nasional Korea Selatan masih berkulat pada hal-hal yang sentris dan strategis dalam skala negara dan konteks konvensional, seperti sengketa wilayah dengan Jepang, pengayaan dan pengadaan alutsista dengan negara sekutu tradisional, seperti Amerika Serikat, atau pun negara mitra lainnya, seperti Indonesia dalam proyek pesawat tempur KFX/IFX dan kapal selam. Itu artinya, pemerintah Korea Selatan belum melihat Islamofobia sebagai ancaman bagi keamanan nasional mereka dan masyarakat internasional belum melihat kondisi yang mengkhawatirkan terjadi di Korea Selatan.

Namun demikian, merujuk pada pandangan bahwa Korea Selatan merupakan bangsa yang homogen, membuat Korea Selatan menjadi kikuk di tengah multikulturalisme global yang semakin kohesif. Korea Selatan juga menjadi 'kurang peka'

dalam budaya global yang beragam. Sebagai contoh, sebagai negara tujuan para imigran termasuk dari Timur Tengah dan Asia Selatan, Korea Selatan melihat bahwa kehidupan dan keadaan sosial-ekonomi negara mereka lebih baik daripada negara asal imigran.

Tidak hanya itu, kualitas aspek-aspek lain, seperti pendidikan, hiburan, dan budaya juga menjadi tolak ukur yang menyebabkan Korea Selatan merasa jomawa dibandingkan dengan negara asal imigran tersebut. Padahal Korea Selatan sedang mencari dan menyusun kebijakan diplomasi terkait ekonomi dan energi dan karenanya perlu untuk menggandeng negara-negara asal imigran tersebut. Komoditas seperti minyak bumi, batu bara, pasar ekonomi, serta kesempatan melakukan investasi dibutuhkan oleh Korea Selatan untuk menggerakkan ekonomi agar semakin maju. Kendati demikian, masyarakat dan pemerintah Korea Selatan yang homogen menjadi abai dan kaku karena terlalu lama hidup dalam keseragaman. (Mulyaman, 2021)

2.2. Dampak Islamofobia terhadap Keamanan Manusia

Sentimen Islamofobia di negeri-negara di Indo-Pasifik, terutama India, Myanmar dan Thailand telah menunjukkan ancaman nyata terhadap keamanan manusia khususnya umat Islam. Warga Muslim kerap menjadi target aksi kekerasan masyarakat lokal yang umumnya berasal dari kelompok agama yang berbeda, terutama Hindu di India dan Buddha di Myanmar dan Thailand. Bahkan aksi kekerasan yang dilakukan hingga menyebabkan umat Islam kehilangan tempat tinggal mereka dan kematian secara masif. Yang lebih menyedihkan lagi, kasus-kasus kekerasan terhadap umat Islam ini kerap didukung oleh pemerintah atau sebaliknya tidak mendapat tanggapan

serius dari pemerintah sehingga sering kali tidak ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka ketika umat Islam yang menjadi korban.

Di Myanmar misalnya, PBB mendapatkan laporan tentang pengusuran 700.000 warga Rohingya dari tempat tinggal mereka hingga harus mengungsi ke Bangladesh pada tahun 2017. (Office Of International Religious Freedom, 2020) Sisanya yang tetap tinggal di Myanmar pun mengalami banyak tekanan. Kenyataan terburuknya adalah ketika Myanmar telah mengalami demokratisasi dan menjamin kebebasan beragama dalam konstitusi, aksi diskriminasi tetap saja terjadi. Diskriminasi tersebut antara lain dilakukan melalui pidato kebencian anti-Muslim dan anti-Rohingya dalam acara resmi, khotbah yang menyudutkan Muslim oleh para biksu, hingga ujaran kebencian melalui media sosial oleh masyarakat awam dan kalangan militer.

Bagian terburuk dari tindakan tersebut adalah pemerintah seolah-olah sengaja menutup mata. Bahkan laporan yang ditemukan adalah tekanan tidak hanya dialami oleh masyarakat Muslim, tetapi juga masyarakat Kristen dan Hindu di Myanmar. Menanggapi tuduhan ini, Myanmar tetap bersikeras menolak izin investigasi lebih lanjut dari PBB. Itu sebabnya, Myanmar dikategorikan sebagai “Negara dengan Perhatian Khusus” (Country of Particular Concern) (CPC) di bawah Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional tahun 1998. (ICJ International Commission of Jurist, 2019)

Hal yang sama juga terjadi di India. Sentimen anti-Islam yang menyebar melalui media setelah serangan Al Qaeda ke AS pada tahun 2001 membuat kelompok Hindu fanatik semakin berani menciptakan diskriminasi dan menjustifikasi aksi

intoleransi mereka dengan menggunakan ideologi Hindutva. (Ushama, 2020) Kekerasan terhadap umat Islam ini bisa bersumber dari pemotongan hewan sapi, penyimpanan daging sapi dan jual-beli daging sapi yang dilakukan oleh umat Islam yang ada di India. Sepanjang tahun 2015-2018 tercatat sekitar 40 warga Muslim meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang menamai dirinya sebagai ‘pelindung sapi.’ (HRW, 2019) Urusan personal pun bisa berubah menjadi masalah besar seperti ketika seorang pria Muslim menikahi perempuan Hindu yang kemudian berpindah agama. (Dey, 2017)

Kondisi-kondisi tersebut bisa menjadi alasan bagi warga umat Hindu untuk melakukan tindak kekerasan masal terhadap umat Islam India. Bahkan kecurigaan tanpa alasan bisa menjadi penyebab genosida terhadap umat Islam seperti yang pernah terjadi pada tahun 2002 di Gujarat. Pada saat itu umat Islam dituduh sebagai pelaku pembakaran kereta yang menyebabkan sejumlah aktivis Hindu di dalamnya meninggal dunia. Akibatnya, terjadi tindakan kekerasan balas dendam yang menyebabkan 790 warga Muslim dan 254 warga Hindu meninggal dunia, lebih kurang 2500 orang mengalami luka-luka dan 223 orang lainnya dilaporkan hilang. (BBC News, 2012; Damayanti, 2018)

Kekerasan masal terhadap umat Islam juga terjadi dalam konflik Masjid Babri di Ayodhya, Uttar Pradesh yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Lokasi tempat masjid ini diyakini oleh umat Hindu sebagai tempat lahirnya Dewa Ram, sehingga masjid tersebut dihancurkan pada tahun 1992 dengan dukungan kuat dari Partai Bharatiya Janata. Peristiwa ini pun memicu perselisihan dalam skala besar di India dan diperkirakan 2.000 orang meninggal dunia. (BBC News, 2012)

Konflik karena agama juga terjadi pada tahun 2013 di kota-kota dekat Muzaffarnagar. Lebih dari 60 orang tewas dalam bentrokan yang pecah antara umat Hindu dan Muslim setelah dua pria Hindu tewas dalam pertengkaran dengan pria Muslim. Diperkirakan sebanyak lima puluh ribu orang, kebanyakan dari mereka beragama Islam, melarikan diri dari kekerasan tersebut. Banyak dari mereka akhirnya tinggal di kamp bantuan selama berbulan-bulan, dan beberapa di antaranya tidak pernah kembali ke rumah (CFR, 2020).

Tindakan kekerasan terhadap umat Muslim ini terus mengalami peningkatan di India selama beberapa tahun terakhir bersamaan dengan kemenangan Partai Bharatiya Janata di Parlemen India awal tahun 2019. Partai ini dianggap melegalkan ideologi Hindutva yang melandasi pemikiran kelompok militan yang ingin mendirikan negara Hindu. (Ushama, 2020) Mahkamah Agung India menyebut jika hal ini dibiarkan maka dapat menjadi situasi normal yang baru. (CFR, 2020) Itu sebabnya, Komisi Independen Pemerintah Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional telah mendesak pemerintah AS untuk memberikan sanksi kepada pejabat India yang bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran HAM dan pembiaran kekerasan terhadap umat Islam di negara tersebut. (CFR, 2020)

Kekerasan yang dialami oleh umat Islam di Thailand tidak jauh berbeda. Mereka mengalami berbagai aksi kekerasan mulai dari diskriminasi, kebencian dan persekusi hingga aksi *counter-insurgency* yang dilakukan oleh tentara. Berbagai bentuk kekerasan ini diawali dari adanya gerakan separatis di Thailand Selatan yang kemudian diperburuk dengan persepsi negatif tentang Islam setelah serangan terorisme tahun 2001. (Quinley, 2019)

Separatisme di wilayah Thailand Selatan muncul ketika penduduk Muslim yang tinggal di daerah tersebut merasa tertekan dengan sulitnya menerapkan hukum syariat Islam. Padahal pemerintah pusat Thailand telah mengizinkan praktek syariat Islam diterapkan di ketiga provinsi di Thailand Selatan. (Sun, 2017: 25-26) Namun, kelompok Nasionalis-Buddha Thailand yang tinggal di wilayah tersebut menolak dengan keras. (Thanet, 2020) Akibatnya konflik berbasis agama tidak dapat dihindari di wilayah perbatasan antara Thailand dengan Malaysia ini.

Salah satu konflik berbasis agama terjadi di sekolah Anuban Pattani pada tahun 2018 di mana pada saat itu, muncul wacana untuk menggunakan hijab di sekolah umum mengingat mayoritas penduduk di Pattani beretnis Melayu. Akibatnya, terjadi perselisihan dan adu mulut antara kelompok Nasionalis-Buddha dengan warga Muslim Pattani etnis Melayu. Berangkat dari kejadian ini, kebencian terhadap umat Islam semakin kuat di seluruh wilayah Thailand Selatan, sehingga hampir setiap sekolah melarang siswinya mengenakan jilbab dan mengingatkan kepada mereka bahwa "*Kwam Pen Thai*" yang artinya hanya identitas Thailandlah yang akan diterima oleh masyarakat Buddhis setempat. Bahkan warga Nasionalis-Buddha menolak identitas lokal Islam dan Melayu di wilayah ini. (Pathan, dkk 2018, 13-21)

Untuk mengatasi konflik berkepanjangan di Thailand Selatan, pemerintah Thailand menerapkan Undang-undang Darurat sejak tahun 2004. Namun kenyataannya, konflik umat Buddha dan Muslim di wilayah ini malah semakin meningkat. Dengan diberlakukannya UU Darurat tersebut, warga Muslim bukan saja mengalami ancaman dari kelompok Nasionalis Buddha dan para rahib tetapi juga tindakan *counter-insurgency*

yang dilakukan dengan keras oleh pemerintah, dalam hal ini tentara. Dalam beberapa konflik yang terjadi, pemerintah juga mengerahkan tentara untuk menjaga tempat-tempat ibadah umat Buddha dan memberikan izin kepada kelompok Nasionalis-Buddha di wilayah selatan untuk membentuk pasukan tentara yang berasal dari para rahib yang dilatih dan dibiayai oleh negara. (Damayanti, 2018)

Di Korea Selatan, meski tidak sampai terjadi kekerasan fisik seperti yang dialami oleh umat Islam di India, Myanmar dan Thailand, namun diskriminasi, ujaran kebencian dan penolakan berdasarkan ras dan agama terlihat jelas. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan menjadi daya tarik bagi para imigran asing, termasuk yang beragama Islam untuk datang ke negara ini. Umumnya mereka datang untuk belajar, bekerja dan menikah dengan orang Korea Selatan. Perkiraan jumlah migran Muslim yang datang ke Korea Selatan pada tahun 2007 saja sekitar 135.000 dan jumlah tersebut terus meningkat di Korea Selatan (Han, 2017). Namun, kejadian 11 September 2001 di AS dan kemunculan ISIS yang kerap melakukan serangan teror membuat para Muslim di Korea Selatan harus siap menerima ujaran-ujaran kebencian.

Tidak adanya undang-undang yang mengikat dan mengatur tentang ujaran kebencian untuk penduduk lokal ataupun penduduk asing, membuat pemerintah Korea Selatan kesulitan dan cenderung gagal menangani masalah tersebut dan memberikan rasa aman kepada para imigran. Hal ini membuat para imigran mencari cara lain untuk menghindari Islamofobia, salah satunya adalah dengan menyembunyikan identitas keagamaan mereka. Hal ini juga terjadi kepada warga Korea

Selatan yang beragama Islam. Mereka tidak dengan terang-terang menunjukkan keIslaman mereka. (FGD, 2021)

Dalam berbagai kasus diskriminasi dan rasisme di Korea Selatan, termasuk penghinaan, tampaknya sulit untuk dinyatakan bersalah terutama jika ternyata korbannya berasal dari wilayah, kelas, atau kelompok tertentu. Rumitnya proses gugatan dan kendala bahasa membuat sebagian besar Muslim yang pernah mengalami ujaran kebencian dan diskriminasi berdasarkan agama atau penampilan mereka, cenderung enggan melaporkan atau menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Di samping itu kebijakan multikulturalisme di Korea Selatan masih sangat prematur dan belum dapat diterima secara meluas. Kondisi ini merugikan banyak imigran yang mencoba untuk berbaur dengan identitas mereka di tengah masyarakat Korea Selatan yang homogen. (Choe, 2022)

Kondisi Islamofobia di Indonesia mungkin tidak seburuk empat negara di atas. Namun, ketakutan dan kecemasan kelompok minoritas Non-Muslim, terutama umat Kristen, telah menimbulkan tindakan yang merugikan umat Islam di provinsi di mana umat Islam merupakan minoritas, seperti di Indonesia bagian Timur. Tidak ada tindakan balas dendam secara fisik yang dilakukan oleh kelompok Non-Muslim terhadap kelompok Islam yang telah melakukan persekusi di sekitar Pulau Jawa dan Sumatera. Namun, pelarangan pembangunan Mesjid di daerah mayoritas umat Kristen telah terjadi, baik itu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat setempat maupun oleh pemerintah daerah dengan alasan menjaga kondusivitas lingkungan, seperti yang terjadi di Kupang dan Manokwari. (Tempo.co, 2011; Kresna, 2019) Dalam kondisi seperti ini, kerusuhan, bentrokan dan konflik antar agama sangat mungkin

terjadi jika pemerintah daerah dan aparat keamanan melakukan pembiaran.

Dampak lain yang terjadi di Indonesia adalah diskriminasi dalam bentuk ujaran kebencian yang dialami oleh umat Islam terutama melalui media sosial. Meskipun dalam kehidupan nyata, penolakan dan diskriminasi juga terjadi, namun tidak sampai menimbulkan kekerasan fisik atau aksi persekusi terhadap umat Islam. Menariknya, yang melakukan diskriminasi dan ujaran kebencian tersebut adalah umat Islam itu sendiri, namun dari kelompok yang berbeda. Kondisi ini dialami misalnya oleh Denny Siregar dan para narasumber dalam penelitian ini. Kelompok yang berbeda ini bisa berarti perbedaan mulai dari mazhab dalam ajaran Islam hingga pilihan partai politik dan pemimpin negara atau daerah.

Terkait hal ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang hal yang sama. Sehingga, berdasarkan pasal 28 ayat 2 dan pasal 29, siapapun yang merasa dirugikan akibat perbuatan orang lain yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) serta ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti secara pribadi, boleh melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Namun demikian, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tetap perlu mengawasi setiap ujaran kebencian yang beredar terutama di media sosial. Hal ini diperlukan agar ujaran kebencian dan tindakan diskriminasi secara virtual tidak menyebar luas dan

menimbulkan dampak sosial. Di samping itu, pemerintah dalam hal ini Kominfo, perlu memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat Indonesia tentang penggunaan media sosial terutama dalam rangka membangun toleransi.

BAB IV

STRATEGI PENANGGULANGAN ISLAMOFOBIA

1. Tantangan Islamofobia di Indo-Pasifik

Islamofobia bukan hanya terjadi di negara Barat, seperti Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, tetapi juga terjadi di Indo-Pasifik. Meski demikian, Islamofobia yang terjadi di India, Myanmar, Thailand dan Indonesia, tidak disebabkan oleh hal yang persis sama dengan yang terjadi di negara-negara Barat. Islamofobia di negara-negara Barat lebih banyak disebabkan oleh dampak dari serangan kelompok terorisme Al Qaeda, terutama di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Sejak itu, diskriminasi, penolakan dan sentimen anti-Islam mulai ditunjukkan, bahkan pemerintah sejumlah negara ikut membuat kebijakan dan peraturan yang berpotensi merugikan umat Islam di negara tersebut.

Islamofobia di Indo-Pasifik, kecuali di Korea Selatan, justru terjadi jauh sebelum muncul serangan terorisme berbasis agama Islam. Islamofobia yang terjadi di India, Myanmar, Thailand, dan Indonesia berkaitan dengan latar belakang sejarah yang memang sudah diwarnai dengan konflik antar umat beragama di negara-negara tersebut. Di samping itu, ada juga faktor ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas seperti yang terjadi di India, Myanmar, dan Indonesia, serta gerakan separatisme yang terjadi di wilayah perbatasan, seperti di Thailand. Maraknya serangan terorisme dengan menggunakan basis agama Islam setelah tahun 2001, semakin

memperparah ketegangan dan diskriminasi yang sudah ada sebelumnya.

Buku ini membuat tipologi dan menganalisa latar belakang terjadinya Islamofobia di India, Myanmar, Thailand, Korea Selatan dan Indonesia dan dampak yang timbul akibat Islamofobia terhadap keamanan nasional dan keamanan manusia di negara tersebut. Lima negara ini dipilih karena adanya laporan dari utusan organisasi internasional tentang kondisi Islamofobia yang meningkat pasca serangan terorisme termasuk di negara-negara di Indo-Pasifik. India, Myanmar, Thailand, Indonesia dan Korea Selatan dipilih untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dari sisi komposisi penduduk, sistem pemerintahan dan hubungan antara kelompok mayoritas-minoritas.

India, Myanmar, Thailand dan Korea Selatan adalah negara-negara dengan umat Islam sebagai kelompok minoritas. Mayoritas penduduk India beragama Hindu, penduduk Myanmar dan Thailand beragama Buddha dan penduduk Korea Selatan mayoritas tidak beragama, dengan kelompok Kristen Protestan dan Buddha yang memiliki pengaruh kuat dalam sistem masyarakat dan pemerintahan. Sedangkan Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Dengan demikian, penelitian ini kaya akan penjelasan Islamofobia yang terjadi di berbagai negara dengan latar belakang yang beragam.

Islamofobia yang terjadi di beberapa negara di Indo-Pasifik, kecuali Korea Selatan, sesungguhnya telah terjadi jauh sebelum muncul fenomena terorisme berbasis agama seperti yang dilakukan oleh Al Qaeda ataupun ISIS. Bahkan Islamofobia telah terjadi sebelum media Barat

menyebarkan berita tentang serangan kelompok teroris di negara mereka. Fenomena serangan terorisme Al Qaeda dan ISIS hanya memperburuk kondisi Islamofobia yang sebelumnya telah ada.

Bahkan Islamofobia di India dan Myanmar dapat ditarik mundur hingga masa kolonialisme Inggris di dua negara ini. Semua berawal dari adanya kebijakan pemerintah Kolonial Inggris yang memberikan favoritisme terhadap salah satu kelompok di India dan Myanmar. Kondisi ini kemudian memunculkan sentimen anti-Islam yang berlanjut pada aksi kekerasan, persekusi bahkan pengusiran dan pembunuhan massal terhadap umat Islam di India dan Myanmar. Ada juga Islamofobia yang dikaitkan dengan gerakan ethno-nasionalis seperti yang terjadi di Thailand, dan dikaitkan dengan isu politik tentang dasar negara seperti yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Cifti (2012) dan Moodod (2020) dan berangkat dari apa yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, maka ada lima kondisi yang menyebabkan terjadinya Islamofobia di negara-negara di Indo-Pasifik, yaitu:

1. Islam dipandang sebagai kelompok yang terpisah dan berbeda. Ini terjadi di negara-negara di mana umat Islam menjadi kelompok minoritas, seperti di India, Myanmar, Thailand dan Korea Selatan. Perbedaan identitas fisik serta cara hidup yang berbeda membuat umat Islam terlihat jelas dan dianggap berbeda dengan kelompok mayoritas Hindu di India, Buddha di Myanmar dan Thailand, serta mayoritas atheis, Buddha dan Kristen Protestan di Korea Selatan. Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya pengaruh yang kuat dari

kelompok mayoritas terhadap pemerintah.

2. Islam dipandang sebagai kelompok yang inferior terhadap Barat. Kondisi ini muncul di negara-negara yang pernah dijajah oleh negara Barat, atau memiliki hubungan yang dekat dengan negara-negara Barat, seperti yang terjadi di India, Myanmar dan Korea Selatan. Menariknya, kondisi ini tidak terjadi di Indonesia karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan pemerintah Kolonial Belanda tidak sepenuhnya berhasil menjalankan salah satu misinya yaitu untuk menyebarkan agama Kristen terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Bahkan kelompok Islam memiliki peran besar dalam upaya kemerdekaan Indonesia.
3. Islam dikaitkan dengan kekerasan, tindakan agresif, mengancam dan mendukung terorisme. Kondisi ini terjadi di lima negara yang mengalami Islamofobia. Beberapa negara memang mengalami tindakan agresif dari umat Islam di negaranya secara langsung, seperti yang dilakukan oleh kelompok separatis di Thailand Selatan serta kelompok radikal dan kelompok teroris di Indonesia. Di samping itu, serangan yang dilakukan oleh Al Qaeda dan ISIS serta media-media yang menyiarkannya juga turut berperan dalam menimbulkan persepsi yang negatif dari pemerintah dan masyarakat di India, Myanmar, Thailand, India dan Korea Selatan terhadap Islam dan umat Islam.
4. Islam dipandang sebagai ideologi politik dan sering digunakan untuk keuntungan politik. Kondisi ini terjadi di India, Myanmar, Thailand dan Indonesia.

Terbentuknya negara Pakistan yang terpisah dari India dan mendasarkan negaranya pada agama Islam merupakan bukti bahwa Islam dipandang juga sebagai ideologi politik. Begitu juga dengan gerakan warga Rohingya yang ingin melepaskan diri dari Myanmar dan warga Pattani di Thailand yang ingin membentuk negara baru berlandaskan agama Islam. Di Indonesia kondisi ini terjadi di awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan awal tahun 2000an di mana ada sejumlah partai politik dan ormas Islam yang ingin mendirikan negara Indonesia berbasiskan Syariah Islam. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa Islam kerap dikaitkan dengan ideologi dengan tujuan politis.

5. Permusuhan terhadap Islam dan umat Islam untuk justifikasi diskriminatif. Permusuhan ini muncul karena umat Islam telah dipandang berbeda dan dianggap sebagai “yang lain” dari sistem masyarakat di India, Myanmar, Thailand dan Korea Selatan. Umat Islam juga diidentikan dengan tindakan agresif, kekerasan dan terorisme. Permusuhan ini kemudian berkembang menjadi justifikasi untuk tindakan diskriminatif, meski bentuk diskriminatif tersebut beragam, mulai dari penolakan, ujaran kebencian hingga pengusiran dan pembunuhan massal. Yang menarik adalah yang terjadi di Indonesia, permusuhan tersebut justru dilakukan oleh sesama kelompok Islam. Namun kelompok-kelompok tersebut berbeda aliran, pemahaman ajaran bahkan pilihan politik.

Islamofobia yang terjadi di negara-negara di Indo-Pasifik sangat beragam mulai dari level yang tidak terlalu membahayakan dan tidak mengancam keamanan nasional atau

keamanan manusia, hingga bentuk kekerasan yang sangat mengancam keamanan. Islamofobia yang terjadi di Korea Selatan hanya terjadi pada level ketakutan, kecemasan, dan ujaran kebencian melalui media sosial, dan belum dipandang sebagai sesuatu yang mengancam keamanan nasional atau keamanan manusia. Hal ini bisa dimengerti karena isu tentang Islamofobia di Korea Selatan tidak terlalu mengakar dan tidak ada latar belakang sejarah permusuhan. Ketakutan dan kecemasan masyarakat Korea terhadap komunitas Islam lebih banyak disebabkan karena pengaruh media Barat yang kerap menampilkan berita tentang serangan terorisme di negara-negara Barat. Itu sebabnya pemerintah Korea Selatan belum banyak mengambil kebijakan atau tindakan tertentu. Terlebih lagi fokus pemerintah Korea Selatan tentang ancaman keamanan masih bersifat konvensional, seperti upaya penyatuan Korea Utara dan Korea Selatan, sengketa wilayah perbatasan dan upaya peningkatan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Di Indonesia, level Islamofobia itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Korea Selatan dan dialami oleh kelompok yang berbeda. Islamofobia dalam bentuk ketakutan dan kecemasan dialami oleh kelompok masyarakat minoritas, terutama dari umat Kristen Protestan yang seringkali menjadi korban aksi intoleransi, radikalisme dan terorisme. Ketakutan dan kecemasan ini terjadi sebagai akibat dari banyaknya gereja yang mengalami larangan ibadah, intimidasi bahkan aksi pengeboman yang dilakukan oleh kelompok militan dan teroris di Indonesia terutama sejak Era Reformasi. (Damayanti, 2018)

Islamofobia dalam bentuk ujaran kebencian, sentimen anti Islam, diskriminasi, penolakan dan intimidasi justru dilakukan di antara kelompok Islam itu sendiri. Kondisi ini

meningkat bersamaan dengan masa kampanye pemilihan gubernur di Jakarta tahun 2017 dan pemilihan presiden tahun 2018. Muncul istilah-istilah seperti “cebong” dan “kampret” atau belakangan berubah menjadi “kadrun” (= kadal gurun) dalam media sosial merupakan bentuk ujaran kebencian, penolakan dan tindakan diskriminatif yang dilakukan satu sama lain. Meski Islamofobia yang terjadi di Indonesia tidak sampai bentuk kekerasan fisik secara nyata, namun tetap perlu diawasi agar tidak berkembang menjadi aksi teror “bom buku” seperti yang pernah dialami pada tahun 2011 oleh Ulil Abshar Abdalla karena ia dianggap sebagai tokoh Jaringan Islam Liberal di Indonesia.

Islamofobia di India, Myanmar dan Thailand mengalami semua bentuk yang disebutkan di atas yaitu kebencian dan sentimen anti Islam, diskriminasi, penolakan dan intimidasi. Lebih dari itu, umat Islam di India, Myanmar dan Thailand bahkan sudah sampai pada tahap mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan, pengrusakan tempat tinggal sampai mereka harus mengungsi mencari tempat yang lebih aman dan pembunuhan secara masal.

Yang lebih menyedihkan lagi, pemerintah di India, Myanmar dan Thailand membuat kebijakan dan peraturan yang awalnya bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, namun dalam realisasinya malah merugikan dan mengancam keselamatan umat Islam di negara tersebut. Undang-undang kewarganegaraan di India, UU Darurat di Thailand serta pengaruh yang kuat Junta Militer dalam pemerintahan di Myanmar membuat umat Islam semakin mengalami tekanan di dalam negeri mereka sendiri. Itu sebabnya, sejumlah organisasi dan masyarakat internasional mendesak pemerintah negara seperti Amerika Serikat dan PBB

untuk mengambil tindakan tegas terhadap negara-negara yang melanggar hak asasi manusia dalam wajah Islamofobia.

2. Strategi Pencegahan Nasional dan Regional

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, serta kerangka teori yang ditawarkan oleh Earl Conteh-Morgan (2005) maka para penulis mengusulkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah Indonesia dan ASEAN dalam mengatasi Islamofobia yang telah terjadi dan mencegah Islamofobia berkembang semakin luas. Dengan mengedepankan tiga kondisi, yaitu pendekatan budaya, identitas dan bersifat *bottom-up* untuk membangun perdamaian dan keamanan manusia serta keamanan nasional, bagian ini akan memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan organisasi regional terutama ASEAN, dalam mengatasi Islamofobia yang terjadi.

2.1. Rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia

Sebagai sebuah negara demokratis dengan penduduk mayoritas beragama Islam di Indo-Pasifik, Indonesia memiliki peran penting dalam mengatasi Islamofobia yang terjadi baik di Indonesia maupun di kawasan saat ini. Untuk itu ada sejumlah program yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia, di antaranya:

- Kementerian Agama bersama-sama para pemimpin agama di Indonesia perlu membangun teologia yang memberikan motivasi dan mendukung umat Islam dan warga non-Muslim untuk bekerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Kerjasama ini bukan dalam bentuk ibadah melainkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sehari-hari seperti misalnya melakukan proyek-proyek kemanusiaan

secara bersama-sama yang bertujuan untuk memajukan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sosial kemasyarakatan ini diharapkan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik yang beragama Islam maupun non-Islam.

- Kementerian Agama dengan melibatkan organisasi keagamaan yang diakui oleh pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) serta organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memfasilitasi dan mengembangkan *interfaith dialog* yang dilakukan terus menerus dan secara berkelanjutan. Melalui dialog ini umat non-Muslim perlu mengklarifikasi ketakutan mereka terhadap Muslim di Indonesia terutama yang dikaitkan dengan pendirian negara Islam dan bagaimana sikap kelompok Muslim terhadap radikalisme, terorisme serta intoleransi yang terjadi di Indonesia. Di sisi lain umat Islam juga harus membuka diri untuk menyampaikan sikap mereka yang mendukung negara kebangsaan. Seperti yang dilakukan oleh kelompok NU dan Muhammadiyah ketika menyatakan “NKRI adalah harga mati.” Kelompok-kelompok seperti NU dan Muhammadiyah juga perlu menyebarkan pemahaman yang sama untuk menentang

radikalisme, terorisme dan intoleransi kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Dengan cara demikian diharapkan perbedaan persepsi antara umat Islam dan warga non-Muslim dapat dijumpai dan tercipta persepsi yang sama tentang kehidupan bermasyarakat antar umat beragama di Indonesia.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu menyusun dan memastikan kurikulum serta bahan ajar yang diberikan kepada anak didik sejak Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Atas serta Pendidikan Tinggi adalah kurikulum yang membangun budaya toleransi umat beragama serta mencegah timbul radikalisme dan intoleransi. Kurikulum seperti ini sangat penting untuk mencegah adanya persepsi yang keliru tentang ajaran agama tertentu, sekaligus mendorong terciptanya sikap yang saling menghormati di antara umat beragama.
- Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian serta lembaga-lembaga penegak hukum lainnya perlu memastikan penegakan hukum serta pelaksanaan kebijakan yang non-diskriminatif, tegas dan tidak pandang bulu terhadap pelaku aksi radikalisme, intoleransi dan terorisme, terlebih yang menargetkan pada kelompok non-Muslim. Dengan aturan yang konsisten dan penegakan hukum tanpa pandang bulu serta mengedepankan penghormatan dan perlindungan HAM, Islamofobia di Indonesia bisa diminimalisir.

- Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama perlu mengoptimalisasikan peran Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) yang diarahkan untuk membangun pemahaman yang sama di antara umat beragama, yaitu untuk mengatasi ketakutan dan sentimen negatif kepada Islam dan umat Islam. Upaya menciptakan persepsi yang sama tentang Islam sebagai agama yang mendatangkan rahmat dan kedamaian bagi seluruh umat manusia dan alam semesta perlu dilakukan untuk mencegah adanya ketakutan dan sentiment anti-Islam baik itu di antara kelompok umat beragama yang berbeda maupun di dalam umat Islam itu sendiri.

2.2. Rekomendasi bagi *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*

Di antara semua organisasi regional yang ada di Indo-Pasifik, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menjadi salah satu organisasi yang paling dekat dengan keberadaan fenomena Islamofobia di kawasan. Indonesia, Myanmar dan Thailand jelas merupakan anggota ASEAN, sedangkan India dan Korea Selatan merupakan negara mitra penting dan strategis bagi ASEAN yang tergabung dalam ASEAN+6.

Satu hal yang membuat ASEAN menjadi penting dalam tulisan ini adalah karena sejauh ini ASEAN dianggap telah berhasil mencapai tujuan pembentukannya sejak tahun 1967 yaitu menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan. Sampai hari ini, ASEAN telah mengembangkan berbagai kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Kerjasama tersebut bukan hanya di antara negara anggotanya

tetapi juga dengan negara-negara lain yang menjadi mitra strategisnya.

Sebagai sebuah organisasi di kawasan, ASEAN bukan hanya peduli tentang keamanan negara dan kawasan tetapi juga keamanan insani. Itu sebabnya, ASEAN membentuk komisi yang khusus mengurus HAM - ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) – sejak tahun 2009. Dari sinilah, isu Islamofobia yang terjadi pada negara anggota dan mitranya menjadi penting untuk diperhatikan oleh ASEAN.

Namun dalam menjalankan peran dan fungsinya di kawasan, ASEAN menghadapi tiga tantangan terkait kondisi internalnya dan prinsip-prinsip yang tercatat dalam Piagam ASEAN. Tiga tantangan tersebut adalah: (1) adanya prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara anggotanya, (2) adanya prinsip sentralitas di tengah banyaknya kerjasama bilateral dan multilateral negara-negara anggotanya, dan (3) lemahnya komisi HAM ASEAN terutama dalam penanganan isu Rohingya.

Terkait prinsip non-intervensi yang tertulis dalam Piagam ASEAN, ada kekhawatiran bahwa ASEAN tidak akan mampu mengatasi Islamofobia di kawasan. Tentang hal ini, Indra dan Utama (2018) menyebutkan keteguhan memegang prinsip ini membuat ASEAN tidak dapat memberikan sanksi tegas kepada Myanmar dan Thailand. Lantas bagaimana ASEAN dalam kapasitasnya dapat menangani Islamofobia tanpa harus mengubah atau melanggar kode prinsip yang dipegang sebagai dasar berdirinya organisasi?

Haacke (2008) mengatakan bahwa organisasi seperti ASEAN lebih menyukai diplomasi dan “peer pressure” daripada pemberian sanksi untuk menangani situasi yang tidak

dikehendaki dari negara anggotanya karena dibatasi oleh prinsip non-intervensinya. Oleh karena itu, diplomasi yang lebih intensif dengan memaksimalkan pembangunan kapasitas menjadi salah satu alternatif untuk ASEAN memaksimalkan instrumen yang dimilikinya dalam mengelola isu Islamofobia yang berdampak negatif bagi stabilitas di kawasan.

Untuk mengatasi tantangan tentang sentralitas dan peran pro aktif ASEAN, perluasan ranah diplomasi dan level diplomasi perlu dilakukan guna meningkatkan kapasitas dalam menangani isu negatif juga dapat digunakan. Dengan demikian, ASEAN tidak terpaku hanya pada satu jalur. Upaya penyelesaian sebuah masalah dapat diperoleh dari jalur yang lain dalam bidang yang lain pula. (Julianto, Mulyaman, dan Damaranti 2022) Oleh karena itu, diplomasi-diplomasi khusus yang multilevel, multidisiplin, dan multidimensi dalam skema dan mekanisme ASEAN dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan peran sentral sekaligus kapasitas ASEAN untuk membahas dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang mengancam perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, termasuk akibat Islamofobia.

Terkait lemahnya Komisi HAM ASEAN, isu Rohingya adalah tantangan terbesar ASEAN. Jika konflik ini tidak dapat diselesaikan, tentu saja kemungkinan pelanggaran HAM di masa depan akan terus terjadi. Dalam hal ini, diperlukan penguatan kelembagaan, khususnya pada Komisi HAM ASEAN. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun struktur yang tepat, memilih orang-orang yang kompeten dan terpercaya untuk duduk dalam struktur serta membangun instrumen yang diperlukan termasuk di dalamnya mekanisme pemberian sanksi dan teguran. Itasari (2020) secara optimis mengatakan bahwa dengan dibentuknya Komisi HAM ASEAN, negara-negara

anggota seharusnya lebih memilih penyelesaian secara regional daripada yang internasional. Tata kelola dan mekanisme penyelesaian masalah di kawasan lebih mungkin dipilih karena aturannya disesuaikan dengan kondisi negara-negara di kawasan.

Oleh karena itu ASEAN perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah dan menangani ancaman Islamofobia yang terjadi saat ini, yaitu:

- Memastikan Piagam ASEAN dan Deklarasi HAM ASEAN yang telah disepakati sejak tahun 2012 oleh negara-negara anggotanya agar sungguh-sungguh dilaksanakan dengan memperhatikan penghormatan, peningkatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga ASEAN, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, penghormatan, peningkatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersebut tetap perlu memperhatikan hak asasi dan kebebasan manusia lainnya, keamanan nasional, ketertiban masyarakat, kesehatan, kenyamanan, dan moralitas publik serta kesejahteraan bersama dalam masyarakat demokratis.
- Melakukan pendekatan dan dialog khusus dengan negara-negara anggota dan negara mitra termasuk India dan Korea Selatan yang mengalami krisis kemanusiaan dengan latar belakang Islamofobia. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme ASEAN dan mekanisme khusus yang dilakukan secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan untuk membangun rasa

saling percaya serta mencari solusi terbaik bagi umat Islam yang mengalami kekerasan fisik terutama di Myanmar, Thailand dan India.

- Membawa dan mendiskusikan isu pelanggaran HAM serta krisis kemanusiaan berwajah Islamofobia ke dalam sejumlah mekanisme dialog dan konferensi yang dimiliki oleh ASEAN. Dialog ini penting untuk dihadiri oleh para pemimpin dan pembuat kebijakan negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara mitra seperti India dan Korea Selatan agar komitmen para pemimpin negara dapat ditunjukkan secara nyata dalam melindungi keamanan umat Islam di tingkat negara maupun kawasan.
- Penguatan kelembagaan, khususnya pada Komisi HAM ASEAN dalam menangani masalah pelanggaran HAM termasuk isu-isu yang dikaitkan dengan Islamofobia di negara-negara anggota maupun negara mitra. Dalam hal ini dibutuhkan komitmen dan kesungguhan dari negara-negara anggota ASEAN untuk memastikan Komisi HAM ASEAN menjalankan perannya dengan maksimal.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulmani, L. (2013). Conflict Resolution: A Case Study of The Separatist Movement in The Southern Border Provinces of Thailand. *Qudus International Journal of Islamic Studies International Relations Department Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 1-10.
- Abrar, C.R. (2013). Multilevel approaches to human security and conflict management:: The Rohingya case. *Centre For Non-Traditional Security Studies*, 1-9.
- Ahmed, Hilal. (2020). "Making Sense of India's Citizenship Amendment Act 2019: Process, Politics, Protests." *Asie Visions*, No. 114, Ifri, June 2020.
- Alkire, Sabina. (2003). A Conceptual Framework for Human Security. *CRISE Working Paper*.
- Aljazeera. (2019). *Southern Rebel Group Says it Met Thai Government*, diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2019/08/muslim-armed-group-met-thai-government-190817060220489.html>, pada 15 April 2022.
- Allen, Chris. (2017). Towards A Working Definition Of Islamophobia: A Briefing Paper. *University Of Birmingham*, 77-79.
- Anshari, Endang Saifuddin. (1997). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Etin. (2009). "The Dialectics of Islamophobia and Radicalism in Indonesia" dalam *A Journal for Asian Studies in the Liberal Arts*. Vol. 16 (2).

- Anwary, A. (2018). Atrocities against the Rohingya Community of Myanmar. *Indian Journal of Asian Affairs*, 91-102.
- Arifianto, Alexander R. (2009). "Explaining the Cause of Muslim-Christian Conflicts in Indonesia: Tracing the Origins of Kristenisasi and Islamisasi," dalam *Christian-Muslim Relations*, Vol. 20, No. 1, hal. 73-89.
- Aritonang, Jan & Karel Steenbrink (Eds). (2008) *A History of Christianity in Indonesia*, Leiden: Koninklijke Brill NV.
- Aritonang, Jan. (2004). *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Arsyad, Edi. (2021). Denny Siregar: Gue Islam Masak Dituduh Islamophobia, Kalau Kadrunphobia Bisa jadi," dalam Fajar.co.id 23 Juni, diakses dari <https://fajar.co.id/2021/06/23/denny-siregar-gue-islam-masak-dituduh-islamophobia-kalau-kadrunphobia-bisa-jadi/> 13 April 2022.
- Barany, Z. (2019). The Rohingya Predicament.: Why Myanmar's Army Gets Away with Ethnic Cleansing. *Istituto Affari Internazionali (IAI)*, 1-27.
- BBC News. (2020). "Myanmar Rohingya: What you need to know about the crisis." January 23. <https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561>
- BBC News. (2012). "Timeline: Ayodhya Holy Site Crisis." *BBC*, December 6. www.bbc.co.uk
- Benedek, Wolfgang. (2008). Human security and human rights interaction. *International Social Science Journal*, Vol 59, 7–17.
- Bhattacharjee, Aparupa. (2014). "Islamofobia, Penyebab Sentimen Anti-Rohingya" CNN Indonesia, Kamis 25 September, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/2014092517>

5325-107-4401/islamofobia-penyebab-sentimen-anti-rohingya, pada 10 September 202.

- B.I, Kevin. (2018). The Politics of Slaughter: Why Myanmar's Military Targets The Rohingya. *Harvard International Review*, 14-15.
- Blaikie, Norman. (2010). *Designing Social Research: The Logic of Anticipation, Second Edition*, Cambridge: Polity Press: Cambridge.
- Bleich, Erik. (2010). What Is Islamophobia And How Much Is There? Theorizing And Measuring An Emerging Comparative Concept. *American Behavioral Scientist*, Vol. 55, No. 12, 1581-1600.
- Bleich, Erik. (2012). Defining And Researching Islamophobia. *Review Of Middle East Studies*, Vol. 46, No. 2, 180-189.
- Boland, B.J. (1985). *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafiti Press.
- Booth, K. (1991). Security and Emancipation. *Review of International Studies*, 17(4), 313–326.
<http://www.jstor.org/stable/20097269>.
- Brewster. David (Ed), 2016. *Indo-Pacific Maritime Security: Challenges and Cooperation*, National Security College, Australian National University.
- Brown, Lester R. (1986). Redefining National Security. *Challenge*, Vol. 29, No. 3, 25-32.
- Brown, Thanet A. (2020). *History and Politics of the Muslims in Thailand*, diakses dari <https://seap.einaudi.cornell.edu/sites/seap/files/MuslimThailand.pdf> pada 15 April 2022.
- Buaban, J. (2020). Islamophobia as Represented by Thai Buddhist Organizations. *Journal of Social Sciences Faculty of Political Science Chulalongkorn University* Vol. 50, No. 2, 125-147

- Choe, Sang Hun. (2022). How ‘Multiculturalism’ Became a Bad Word in South Korea, diakses pada 30 April 2022 dari <https://www.nytimes.com/2022/03/01/world/asia/south-korea-diversity-muslims.html>
- Ciftci, Sabri. (2012). Islamophobia and Threat Perceptions: Explaining Anti-Muslim Sentiment in the West. *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 32, No. 3, 293-309.
- Coclanis, Peter. A. (2013). “Terror in Burma: Buddhists vs. Muslims,” dalam *World Affairs*, Vol. 176, No. 4, 25-33.
- Conteh-Morgan, Earl. (2005). Peacebuilding And Human Security: A Constructivist Perspective. *International Journal of Peace Studies*, Vol. 10, No. 1, 69-86.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2008). *Strategies for Qualitative Data Analysis. Basics of Qualitative Research, Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 3rd Edition*, Sage Publication, California.
- Cornelio, Jayeel Serrano. (2013) “Religious Freedom in the Philippines: From Legalities to Lived Experience.” *The Review of Faith & International Affairs*, 11:2, 36-45, dapat diakses melalui <http://dx.doi.org/10.1080/15570274.2013.80803>
- Council on Foreign Relations. (2020). “India’s Muslims: An Increasingly Marginalized Population.” *Council on Foreign Relations*, August 20. www.cfr.org
- Damarjati, Danu. (2020). “Asal Mula Istilah Kampret-Kadrun: Dari Persaingan Jokowi vs Prabowo,” dalam detikNews 17 Desember, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5299004/asal-mula-istilah-kampret-kadrun-dari-persaingan-jokowi-vs-prabowo> pada 13 April 2022.
- Damayanti, Angel. (2017). “Muslim Christian Relationship in Indonesian Reform Era in the Framework of Democracy: Case Study of Bandung, Bekasi, Bogor (1998-2015),”

- dalam *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, vol. 129.
- Damayanti, Angel. (2018). “Radikalisme Pada Komunitas Non-Islam” dalam *Deradikalisasi: Kontra Radikalisme & Deideologisasi*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur, Kementerian Agama RI.
- Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population Myanmar. (2014). *The 2014 Myanmar Population and Housing Census*. Naypyidaw: Department of Population.
- Dey, A. (2017). “Rajasthan Hate Crime: Gruesome Murder Forgotten, Protest Rally by Muslims in Udaipur the Villain Now.” *Scroll*, December 19. www.scroll.in
- Effendy, Bahtiar. (2009) *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Eum, IkRan. (2017). *Koreas response to Islam and Islamophobia Focusin*, 825-849.
- European Union Agency for Fundamental Rights. (2017). “Second European Union Minorities and Discrimination Survey,” diakses dari https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-midis-ii-main-results_en.pdf, pada 15 September 2021.
- Faiz, Pan Mohammad. (2005). “Islam dan Persaingan Ideologi di Parlemen: Studi Kasus: Pro Kontra Pemasukan “Tujuh Kata” Piagam Jakarta ke dalam Konstitusi Pada Masa Reformasi,” di *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 35, No. 2).
- Firmansah, A. (2019). The Dynamics of Ethnic Conflict in Southern Province Thailand. *Journal of International Studies*

International Relations Department Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 1, No.1, 201-221.

- Fitriyani, Rizki Amelia, Sabilul Maarifah Karmidi, dan Putri Estian. (2015). "Terrorism and Islamophobia: Media Representation on Islam and the Middle East" dalam *Islamic Perspectives Relating to Business, Arts, Culture and Communication*, diakses dari https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-287-429-0_3, pada 10 September 2021.
- Frost, Diane. (2008). Islamophobia: Examining Causal Links Between The Media And "Race Hate" From "Below". *International Journal Of Sociology And Social Policy*.
- Gallup Poll. (2011). Islamophobia: Understanding Anti-Muslim Sentiment in the West, diakses dari <https://news.gallup.com/poll/157082/islamophobia-understanding-anti-muslim-sentiment-west.aspx>, pada 8 Februari 2022.
- Geertz, Clifford. (1960). *The religion of Java*, Glencoe: Free Press.
- Gholami, Reza. (2021). Critical Race Theory And Islamophobia: Challenging Inequity In Higher Education. *Race Ethnicity And Education*, Vol. 24, No. 3, 319–337.
- Gómez, Oscar dan Den Gasper. (1994). *Human Security: A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams*. United Nations
- Goh, Robbie B.H. (2005). *Christianity in Southeast Asia*, Singapore: ISEAS.
- Green, Penny. (2013). "Islamophobia: Burma's Racist Fault-Line," dalam *Race & Class*, Vol. 55, No. 2, Sage: Los Angeles.

- Grizold, Anton. (1994). The Concept Of National Security In The Contemporary World. *International Journal on World Peace*, Vol. 11, No. 3, 37-53.
- Gunaratna, Rohan dan Acharya Arabinda. (2013). *The Terrorist Threat from Thailand: Jihad or Quest for Justice?* Washington D.C: Potomac Books, Inc. hal. 53.
- Han, S. (2017). *Islamophobia in South Korea with a focus on Muslim migrants* [Master's Thesis, the American University in Cairo]. AUC Knowledge Fountain. 11-21, 41-56, dapat diakses melalui <https://fount.aucegypt.edu/etds/587>.
- Hakim., Rakhmat Nur. (2021). "Mengenal JAD dan MIT, Kelompok Teroris Indonesia yang Berbaiat ke Isis.," dalam Kompas.com 2 April, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/02/08000031/mengenal-jad-dan-mit-kelompok-teroris-di-indonesia-yang-berbaiat-ke-isis?page=all> pada 12 April 2022.
- Hartig, Hannah and Doherty, Carroll. (2021). "Two Decades Later, the Enduring Legacy of 9/11), diakses dari <https://www.pewresearch.org/politics/2021/09/02/two-decades-later-the-enduring-legacy-of-9-11/>, pada 8 Februari 2022.
- Hindustan Times (HT) Correspondent. (2007). "Top RSS. VHP med behind 2002 Riots," dapat diakses dari <https://www.hindustantimes.com/india/top-rss-vhp-men-behind-2002-riots/story-OWZwg6UsQMyICAS3JNUMvI.html>, 20 Juni 2022
- Human Rights Watch. (2013). "All You Can Do is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State," diakses dari <https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims> pada 25 Maret 2022.

- Human Rights Watch. (2019). "Violent Cow Protection in India: Vigilante Groups Attack Minorities," *Human Rights Watch*, 18 Februari, diakses dari <https://www.hrw.org/news/2019/02/19/india-vigilante-cow-protection-groups-attack-minorities>, pada 8 Februari 2022
- Humas Kemenko Polhukam, (2020). "Menko Polhukam: Tidak ada Islamofobia di Indonesia," dalam *Berita Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan*, 3 Januari, diakses dari <https://polkam.go.id/menko-polhukam-tidak-ada-islamofobia-indonesia/> pada 25 April 2022.
- Ibrahim, Azeem, (2020). "Modi's Slide Toward Autocracy," diakses dari <https://foreignpolicy.com/2020/07/13/modi-india-hindutva-hindu-nationalism-autocracy/>, 20 Juni 2022
- International Commission of Jurist (ICJ). (2019). *Challenges to Freedom of Religion In Myanmar*. Oslo: ICJ, dapat diakses dari <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/10/Myanmar-Freedom-of-religion-brief-Advocacy-Analysis-brief-2019-ENG.pdf>
- International Commission of Jurists (ICJ). (2018). "International-NGOs in Myanmar call for UN Security Council Action on Rohingya Crisis," 27 Agustus, diakses dari <https://www.icj.org/international-ngos-in-myanmar-call-for-un-security-council-action-on-rohingya-crisis/>, pada 25 April 2022.
- International Commission of Jurists (ICJ). (2005). *More Power, Less Accountability: Thailand's New Emergency Decree*, dapat diakses dari <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2005/08/Thailand-accountability-advocacy-2005.pdf>.
- Kemenhan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kemenhan RI.

- Ken/Fay. (2011). “Ulil Duga Target Bom Buku Para Aktivis HAM,” dalam *detikNews*, 16 Maret, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-1593222/ulil-duga-target-bom-buku-para-aktivis-ham> pada 25 April 2022/
- Khalid, Mahsuri., Mohd Khir, Nurauni Aqilah., Mazlan, Nur Nabila., Mahamad Halid, Nur Farhanah dan Jamal, Noraini. (2017). *Muslims in South Korea: The Way of Life*, 943-961.
- Imaizumi, Shinya. (2017). The Application of Islamic Law in Thailand. *IDE Discussion Papers, Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization*, No. 660.
- International Crisis Group. (2013). *Violence in Other Parts of Myanmar*. Brussels: International Crisis Group.
- Koo, G. Y. (2018). “Islamophobia and the Politics of Representation of Islam in Korea,” *Journal of Korean Religions*, Vol. 9, Issue 1, 159–192, dapat diakses melalui <https://www.jstor.org/stable/26594685>.
- Kresna, Mawa. (2019). “Perda Manokwari Kota Injil: Demo Menolak Pembangunan Mesjid,” diakses dari <https://tirto.id/perda-manokwari-kota-injil-demo-menolak-pembangunan-masjid-ddsl>, pada 4 Mei 2022.
- Kusnandar, Viva Budy. (2021). *Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam*, 30 September, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/Sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>, pada 10 April 2022.
- Laveda, Meiliza. (2021). “Erdogan Sebut Islamofobia Terus Menyebar di Eropa,” *Republika*, Kamis 13 Mei, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qt11e9459/erdogan-sebut-islamofobia-terus-menyebar-di-eropa>, pada 10 September 2021.

- Lee, Claire. (2018). Human rights report says Korea has ‘serious racism problem’, diakses dari <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20181108000721> pada 30 April 2022.
- Leffler, Melvyn P. (1990). National Security. *The Journal of American History*, Vol. 77, No. 1, 143-152.
- Maarif, Ahmad Syafii. (2005). “Hubungan Islam-Kristen dalam Percaturan Politik di Indonesia, Sebuah Evaluasi” in *Agama-agama dan Wawasan Kebangsaan*, Jakarta: Balitbang PGI and Mission 21.
- Majeed, Salman. (2019). “Islamophobia and the Mental Health of Rohingya Refugees,” dalam *Islamophobia and Psychiatry*, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/329756270_Islamophobia_and_the_Mental_Health_of_Rohingya_Refugees_Recognition_Prevention_and_Treatment, pada 10 September 2021.
- Mathieson, D. S. (2020). The Arakan Army in Myanmar: Deadly Conflict Rises in Rakhine State. *US Institute of Peace*, 1-24.
- Modood, Tariq. (2020). Islamophobia And Normative Sociology. *Journal of the British Academy*, Vol. 8, 29-49.
- Mohiyuddin, M., & Sulaiman, M. (2007). Islamic education in Myanmar: a case study. In M. Skidmore, & T. Wilson, *Dictatorship, Disorder and Decline in Myanmar* (pp. 1-240). Sydney: ANU Press.
- Mondon, Aurelien. & Winter, Aaron. (2017). Articulations of Islamophobia: from the extreme to the mainstream?. *Ethnic and Racial Studies*.
- Muhammad, Beta A, dkk. (2018). “The Roles of International Conference of Islamic Scholar (ICIS) in Conflict Resolution of South Thailand,” dalam *Journal of Law, Policy and*

- Globalization, University of Muhammadiyah Malang*, Vol. 76: 78-82.
- Muhammad, Ramizah W. (2011). The Dato' Yuthitham and the Administration of Islamic Law in Southern Thailand. *ARC Federation Fellowship Islam, Syari'ah and Governance, Melbourne Law School*.
- Munirah, Y. (2018). Preserving Ethnic Identity Through Native Language and Religion: A Case Study of the Malay-Muslims in Southern Thailand. *Global Journal Al Thaqafah*, 60.
- Mutsalimsuksa, Sun. (2017). Monarchy and Muslims in Thailand. *Bangkok Muslim Studies Center, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University*, 25-26.
- Mulyaman, Darynaufal. (2021). Diplomasi SDGs Korea Selatan di Asia Barat dan Afrika: Peluang Energi Baru. <https://yoursay.suara.com/kolom/2022/02/10/213844/diplomasi-sdgs-korea-selatan-di-asia-barat-dan-afrika-peluang-energi-baru>.
- Nanuam. (2019). *Peace Talks Chief Counters Southern Rebels' Condemnation*, diakses dari <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1623342/peace-talks-chief-counters-southern-rebels-condemnation>, pada 15 April 2022.
- Nawab, Mohamed, Bin Mohamed Osman. (2017). "Understanding Islamophobia in Asia: The Cases of Myanmar and Malaysia" dalam *Islamophobia Studies Journal*, Vol. XX, No. X.
- Nawab, Mohamed, Bin Mohamed Osman. (2019). "Understanding Islamophobia in Southeast Asia." *The Routledge International Handbook of Islamophobia*. New York: Routledge.

- Neuman, W. Lawrence. (2011). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 7th Edition*, Boston: Pearson.
- Newman, Edward. (2010). Critical human security studies. *Review of International Studies*, Vol. 36, No. 1, 77-94.
- Office Of International Religious Freedom . (2020). *2019 Report on International Religious Freedom: Burma*. Washington D.C: U.S Department of State.
- Paez, Dario. (2007). Emotional climate, human security, and cultures of peace. *Journal of Social Issues*, Vol. 63, No. 2, 233—253.
- Pamungkas, C. (2021). The Malay-Moslem and Thailand Administration: A Power Relation Perspective. *Pusat Penelitian Sumberdaya Regional (PSDR) LIPI*.
- Pathan, D, dkk. (2018). Understanding Anti-Islam Sentiment in Thailand. *Patani Forum*, 13-21.
- Peace, Timothy. (2019). “Islamophobia and the Left in France,” dalam Zempi, Irene dan Awan, Imran (Ed), *The Routledge International Handbook of Islamophobia*, New York, Routledge.
- Pettman, Ralph. (2010). Human Security as Global Security: Reconceptualising Strategic Studies. *Cambridge Review of International Affairs*, Vol. 18, No. 1, 137-150.
- Ramli, Ahmad Faizuddin, Jaffary Awang, & Zaizul Ab Rahman. (2020). “Identifying Islamophobia in Malaysian Buddhist Context,” dalam *Journal of Islamic Sciences and Comparative Studies*, Vol. 4, Issue 2.
- Sadikin, Rendy Adrikni. (2022). “Asal Muasal Label Kadrun, Ternyata Sosok ini Pencipanya hingga Viral,” dalam suara.com 17 Maret, diakses dari <https://www.suara.com/news/2022/03/17/141706/asal->

- muasal-label-kadrun-ternyata-sosok-ini-penciptanya-hingga-viral, 13 April 2022.
- Sanurdi. (2018). Islam di Thailand. *Tasmuh Jurnal Studi Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 10, No. 2: 379-390.
- Sayyid, S. (2014). A Measure Of Islamophobia. *Islamophobia Studies Journal*, Vol. 2, No. 1, 10-25.
- Schelling, Thomas C. dalam Art, R., & Jervis, R. (2009). *International Politics: Enduring concepts and contemporary issues*, Ninth Ed. New York: Pearson-Longman.
- Shaheed, Ahmed. (2021). “Countering Islamophobia/anti-Muslim hatred to eliminate discrimination and intolerance based on religion of belief,” Laporan United Nations Human Rights Council No. A/HRC/46/30, disampaikan dalam Pertemuan Sesi ke 46, 22 Februari – 19 Maret.
- Shams, S. (2016, December 16). *Is Saudi Wahhabism fueling Rohingya Muslim insurgency?* diakses dari DW: <https://www.dw.com/en/is-saudi-wahhabism-fueling-rohingya-muslim-insurgency/a-36791809> pada 20 April 2022.
- Sharma, Betwa. (2020). “One Year After Mass Protests, India’s Muslims Still Live in Fear,” dapat diakses dari <https://foreignpolicy.com/2020/12/18/one-year-mass-cao-protests-india-muslims-citizenship-amendment-act-modi/>, 20 Juni 2022
- Sheikh, Farrah. (2019). *Exploring “Korean Islam” in Climate of Exclusion and Islamophobia*, 197-204.
- Sikander, Mustaq Ul Haq Ahmad. 2021. “Islamophobia in India.” *Journal of The Contemporary Study of Islam*, Vol. 2, No. 2 (2021): Summer 2021, hal. 180–193, diakses dari <https://Doi.Org/10.37264/Jcsi.V2i2.66>.

- Siyech, Mohammed Sinan Dan Akanksha Narain. (2018). "Beef-Related Violence in India: An Expression of Islamophobia." *Islamophobia Studies Journal*, Vol. 4, No. 2, Spring, 181-194, diakses dari <https://Www.Jstor.Org/Stable/10.13169/Islastudj.4.2.0181>
- Solahudin. (2011). *NII Sampai JII: Salafy Jihadisme di Indonesia*, Jakarta: Komunitas Bambu.
- Steenbrink, Karel. (2006). *Dutch Colonialism, and Indonesian Islam: Contacts and Conflicts 1596-1950*, Netherlands: Rodopi BV.
- Syarif, Mujar Ibnu. (2016). "Spirit Piagam Jakarta dalam Undang-undang Dasar 1945" dalam *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 4 No. 1, 15-32.
- Tempo.co. (2011). "Walikota Kupang Hentikan Pembangunan Mesjid," diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/351032/wali-kota-kupang-hentikan-pembangunan-masjid/full&view=ok>, pada 4 Mei 2022.
- Tim detikcom. (2019). "Fakta Terkini Aksi Brutal Penembakan di Mesjid New Zealand, DetikNews, 17 Maret, diakses dari <https://news.detik.com/internasional/d-4470643/fakta-terkini-aksi-brutal-penembakan-di-masjid-new-zealand>, pada 15 September 2021
- Toyibah, Dzuriyatun dan Farida, Ade Rina. (2020). *Konflik dan Integrasi Muslim Tradisionalis dan Modernis di Indonesia*, Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia.
- UNTFHS. (1991). *Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*. United Nations.
- Ushama, Thameem. (2020). "Islamophobia in India: An Exploration of Its Roots, Rise and History," dalam Al-

- Shajarah, *Istac Journal of Islamic Thought and Civilization*, Vol. 25 No. 1, hal. 1-29 dapat diakses dari <https://Journals.Iium.Edu.My/Shajarah/>
- Quinley. (2019). *Attacks in Thailand's Deep South: Who, Why and What's Next?* Diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2019/01/attacks-thailand-deep-south190120233033431.html> pada 15 April 2022.
- Walton, J. M., & Hayward, S. (2014). Contesting Buddhist Narratives: Democratization, Nationalism, and Communal Violence. *East-West Center*, 1-67.
- Wanandi, Jusuf. (2002). "Islam in Indonesia: Its History, Development and Future Challenges," dalam *Asia-Pacific Review*, 9 (2), 104-112.
- Waikar, Prashant. 2018. "Reading Islamophobia in Hindutva: An Analysis of Narendra Modi's Political Discourse" dalam *Islamophobia Studies Journal*, Vol. 4, No. 2, Spring 2018, pp. 161-180 diakses dari <https://Www.Jstor.Org/Stable/10.13169/Islastudj.4.2.0161>
- Wildan, M. (2021). The Persecution of Rohingya Muslims and the Path to Democratization in Myanmar. *Jurnal Studia Islamika*, 29-53.
- Yunanto, Sri. (2018). *Islam Moderat vs Islam Radikal: Dinamika Politik Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zelikow, Philip. The Transformation of National Security: Five Redefinitions. *The National Interest*, No. 71, 17-28.
- Zempi, Irene and Imran Awan (eds.). (2019). *The Routledge International Handbook of Islamophobia*, Oxon: Routledge.